



# Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan (RIPP) Kota Bandung

Kerjasama  
Kantor Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung  
dengan  
Pusat Kajian dan Pendidikan & Pelatihan Aparatur I  
Lembaga Administrasi Negara  
Tahun 2006






# Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan (RIPP) Kota Bandung

Kerjasama  
Kantor Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung  
dengan  
Pusat Kajian dan Pendidikan & Pelatihan Aparatur I  
Lembaga Administrasi Negara  
Tahun 2006



**STRUKTUR ORGANISASI KEGIATAN PENYUSUNAN  
RENCANA INDUK PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (RIPP)  
KOTA BANDUNG**

Penanggungjawab	: Dra. Kamalia Purbani, MSP
Wakil Penanggungjawab	: Mimin Margijo, SH
Tim Ahli/ Peneliti	
Ahli Pemerintahan Daerah	: Drs. Desi Fernanda, M.Soc.Sc.
Ahli Planologi	: Dr. Ir. Firmansyah, MT
Ahli Hukum	: Wawan Dharma Setiawan, SH, M.Si
Ahli Sosial Budaya	: Drs. Ayat Suryatna, M.Si.
Ahli Ekonomi	: Baban Sobandi, SE, M.Si.
Ahli SDM	: Drs. Joni Dawud, DEA
Tim Pendukung/ Peneliti	
	: Drs. Dayat Hidayat, M.Si.
	Drs. Riyadi
	Krismiyyati, ST
Editor	: B. Undik Sani, SH
Kantor Litbang Kota Bandung	Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I - LAN
<u>Dra. Kamalia Purbani, MSP</u> Kepala	 <u>Drs. Desi Fernanda, M.Soc.Sc.</u> Kepala

## **ABSTRAK**

Kota Bandung sebagai salah satu daerah otonom yang terus berkembang kearah Kota Metropolitan, tentu saja memiliki kompleksitas kebutuhan dan permasalahan yang semakin meningkat.. Konsekuensi logis dari adanya peluang dan tantangan dari perkembangan kota yang pesat tersebut, maka pembangunan kota bandung harus dilakukan secara menyeluruh (comprehensive) dan berkelanjutan(sustainable), bukan bersifat parsial atau sektoral yang selama ini banyak kebijakan dan program pembangunan yang dibuat kurang bisa menjawab persoalan dan kebutuhan riil kota bandung.

Sering berbagai masalah timbul karena kebijakan dan program pembangunan yang dibuat, tidak didukung dengan kegiatan penelitian dan pengembangan , tapi lebih didasarkan pada sense dari pembuat kebijakan dan program saja, padahal kegiatan penelitian dan pengembangan ini dinilai memiliki peran strategis sebagai dasar atau justifikasi bagi pelaksanaan suatu kebijakan atau program tertentu.

Berlatar belakang hal-hal tersebut, selanjutnya dinilai perlu untuk membuat suatu acuan dan pedoman (guidance) dalam melaksanakan Kegiatan penelitian pengembangan di Kota Bandung, acuan atau pedoman tersebut berupa Rencana Induk Penelitian dan pengembangan (RIPP) yang dibuat agar kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan, baik oleh pemerintah kota bandung pada umumnya maupun oleh kantor litbang secara khusus, dapat dilakukan dengan topic dan tema yang sesuai dengan kebutuhan dan tahapan yang jelas dan sistematis.

RIPP merupakan gambaran menyeluruh mengenai topic dan tujuan penelitian dan pengembangan yang akan dilaksanakan di kota bandung agar dapat menunjang pencapaian visi, misi, tujuan serta sasaran yang ditetapkan oleh pemerintah kota bandung.

Sasaran yang ingin dicapai dari Rencana Induk Penelitian dan pengembangan ini adalah untuk, terumuskannya arahan kebijakan kelitbangan kota bandung hingga tahun 2013, teridentifikasinya topic dan tema kegiatan penelitian dan pengembangan yang dapat mendukung program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah kota bandung, Tersusunnya standard dan biaya penelitian dan pengembangan kota bandung dan terumuskannya arahan pengembangan kapasitas kelembagaan kelitbangan kota bandung dimasa datang.

Metodologi penyusunan Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan ini dilakukan dengan tahapan sbb:

1. Mengkaji kondisi kota bandung saat ini, serta kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah kota,
2. Memprediksikan kinerja kota bandung hingga tahun 2013,



3. Mengidentifikasi berbagai isu strategis yang muncul
4. Pengumpulan data dilakukan melalui data sekunder, studi dokumen kebijakan serta melakukan FGD dengan para pimpinan SKPD di kota bandung.

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Kota Bandung sebagai salah satu daerah yang terus berkembang ke arah kota Metropolitan tentu saja memiliki kompleksitas kebutuhan dan permasalahan yang semakin meningkat, Kota Bandung sebagai pusat pemerintahan, pusat pendidikan, pusat perdagangan yang kemudian berkembang menjadi kota jasa merupakan daya tarik tersendiri bagi kota ini. Konsekuensi dari adanya peluang dan tantangan dari perkembangan kota ini, maka pembangunan kota Bandung harus dilakukan secara menyeluruh (comprehensive) dan berkelanjutan (sustainable) bukan bersifat sektoral dan parsial. Berbagai permasalahan timbul karena seringkali kebijakan dan program pembangunan yang dibuat tidak didukung dengan kegiatan penelitian dan pengembangan, tapi lebih berdasarkan pada sense dari pembuat kebijakan atau program saja, padahal seharusnya, kegiatan penelitian dan pengembangan seyogyanya menjadi dasar dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan/program pembangunan kota Bandung.

Di kota Bandung, kegiatan penelitian dan pengembangan yang ada selama ini, dilakukan oleh kantor litbang kota Bandung. Satuan Kerja perangkat daerah (SKPD) dan lembaga penelitian lain baik perguruan tinggi maupun pusat kajian negeri maupun swasta. Hal yang seringkali terjadi adalah bahwa kegiatan penelitian dan pengembangan tersebut tidak terkoordinasi dengan baik dan hasilnya belum dapat diterapkan sepenuhnya secara proporsional untuk kepentingan pembangunan kota Bandung.

Berlatar belakang hal-hal tersebut di atas, dinilai perlu membuat suatu acuan atau pedoman (guidance) dalam melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan ini di kota Bandung. Acuan tersebut berupa Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan (RIPP) yang dibuat agar kegiatan penelitian dan pengembangan dapat dilakukan dengan topik atau tema yang sesuai dengan kebutuhan dan tahapan yang sistematis dan dapat menunjang visi, misi, tujuan serta sasaran yang ditetapkan oleh pemerintah kota Bandung. Penyusunan RIPP ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pemerintah kota Bandung dan masyarakat dengan dukungan penelitian dan pengembangan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan kota Bandung.

Adapun sasaran dari RIPP ini adalah

1. merumuskannya arah kebijakan kelitbang kota Bandung hingga tahun 2013
2. teridentifikasinya topik dan tema kegiatan penelitian dan pengembangan yang dapat mendukung program pembangunan kota Bandung
3. teridentifikasinya tahapan kegiatan serta mekanisme koordinasi, baik dari perencanaannya hingga evaluasi kegiatan yang dilakukan SKPD yang ada di wilayah kota Bandung.

Ruang lingkup dari RIPP ini dilakukan dengan 2 tujuan yaitu; pertama , adalah untuk menghasilkan penemuan baru yaitu menemukan kebijakan, strategi atau teknik baru dalam melaksanakan pembangunan daerah, kedua untuk revise and define new implementations of existing discoveries yaitu merevisi atau memperjelas pelaksanaan kebijakan, strategi atau teknik pelaksanaan pembangunan suatu daerah.

Kegiatan penyusunan RIPP kota Bandung ini, mencakup kegiatan kegiatan penelitian dan pengembangan yang bersifat strategis bukan teknis, baik yang terkait dengan pembuatan kebijakan maupun evaluasi kebijakan, sifat strategis yang dimaksud adalah sebagai kegiatan penelitian dan pengembangan yang berada pada muatan substansui dan implementasi yang berciri teknis, meskipun sebenarnya sifat strategis dan teknis ini tidak terlalu jelas batasannya, tergantung pada sifat dari penelitian tersebut. Kegiatan yang bersifat teknis tetap diserahkan pada SKPD yang bersangkutan adapun yang bersifat strategis harus dikoordinasikan baik dengan kantor litbang kota Bandung maupun dengan SKPD lain yang terkait.

Agar kegiatan penelitian dan pengembangan ini bisa menjawab setiap masalah yang ada di kota Bandung, maka harus disesuaikan dengan berbagai isu strategis yang terjadi dan yang diprediksikan akan terjadi dimasa datang.

Adapun penyusunan RIPP ini mencakup beberapa kegiatan sbb:

1. Mengidentifikasi kebutuhan penelitian, yaitu menentukan tema dan topic kegiatan penelitian dan pengembangan yang akan dilaksanakan di kota Bandung.
2. Merumuskan arah kelitbangan dan menetapkan program indikatif yang akan dilakukan tahun 2007 sampai 2013
3. Menentukan standard biaya kegiatan penelitian dan pengembangan di kota Bandung

Sebagai Rencana induk, RIPP memiliki term waktu tertentu sebagai jangka waktu perencanaan. Oleh karena itu diharapkan bahwa RIPP ini merupakan blue print atau pedoman dalam melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan di kota Bandung. Term waktu yang digunakan dalam kegiatan penyusunan RIPP ini adalah 2007 - 2013. Hal ini didasarkan atas pertimbangan politis maupun teknis.

Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan ini diharapkan dapat memayungi berbagai program kegiatan penelitian dan pengembangan di Seluruh sector/bidang yang menjadi urusan daerah kota, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Menurut pasal 14 UU Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah bahwa urusan wajib kabupaten dan kota adalah :

#### **KERANGKA PEMIKIRAN**

Rencana induk penelitian dan pengembangan ini diharapkan dapat memayungi berbagai program kegiatan dan pengembangan di seluruh sektor yang menjadi urusan daerah kota, baik urusan wajib maupun pilihan. Menurut

pasal 14 UU 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah bahwa urusan wajib kabupaten dan kota adalah :

- a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan
- b. Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang
- c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- d. Penyediaan sarana dan prasarana umum
- e. Penanganan bidang kesehatan
- f. Penyelenggaraan pendidikan
- g. Peanggulangan masalah sosial
- h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan
- i. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah
- j. Pengendalian lingkungan hidup
- k. Pelayanan pertanahan
- l. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil
- m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan
- n. Pelayanan administrasi penanaman modal
- o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya
- p. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundangan undangan

Urusan wajib tersebut merupakan urusan yang harus dilaksanakan oleh daerah termasuk oleh kota bandung. Disamping itu kota bandung juga melaksanakan urusan pilihan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhannya. Untuk itu pemerintah kota bandung telah menyusun rencana strategis (renstra) yang menetapkan visi dan misi yang ingin diwujudkan yaitu: Terwujudnya kota bandung sebagai kota jasa yang bermartabat (Bersih, makmur, taat dan bersahabat. Sedangkan misi nya adalah:

1. Mengembangkan sumber daya manusia yang handal dan religius
2. Mengembangkan perekonomian kota yang adil
3. Mengembangkan sosial budaya kota yang ramah dan berkesadaran tinggi, serta berhati nurani
4. Meningkatkan penataan kota
5. Meningkatkan kinerja pemerintah kota secara profesional, efektif, efisien, akuntabel dan transparan
6. Mengembangkan sistem keuangan kota

RIPP yang dibuat harus pula mempertimbangkan prioritas pembangunan yang menetapkan 7 bidang atau sektor prioritas pembangunan kota bandung yaitu:

1. Bandung cerdas 2008
2. Bandung sehat 2007
3. Bandung Hijau 2006
4. Bandung makmur 2008
5. Bandung Kota Seni Budaya 2008

6. Bandung berprestasi 2008
7. Bandung agamis 2008.

Metodologi penyusunan RIPP dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Mengkaji kondisi kota Bandung saat ini serta kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah kota
  2. Memprediksikan kinerja kota Bandung hingga tahun 2013
  3. Mengidentifikasi isu strategis yang muncul
  4. Merumuskan arah kebijakan dan program atau kegiatan prioritas
  5. Mengkaji mekanisme koordinasi dan standar biaya penelitian di kota Bandung
  6. Mengkaji langkah-langkah yang harus ditempuh dalam mengembangkan kapasitas kelembagaan kelurahan di kota Bandung
- Pengumpulan data dilakukan melalui studi data sekunder, studi dokumen kebijakan serta melakukan FGD dengan para pimpinan SKPD di Kota Bandung.

## KONDISI KOTA BANDUNG

### A. SUMBER DAYA MANUSIA

Kondisi kependudukan kota Bandung dari tahun 2000 terus mengalami kenaikan sampai dengan tahun 2004, sampai akhirnya berdasarkan hasil sensus tahun 2004, jumlah penduduk kota Bandung adalah 2.232.624 jiwa. Selain itu berdasarkan hasil FGD yang dilakukan oleh SKPD di kota Bandung, diidentifikasi kondisi SDM kota Bandung sebagai berikut:

- Arus Urbanisasi yang sulit dikendalikan
- Penyebaran penduduk yang kurang merata
- Tingkat pengangguran yang tinggi

### B. KONDISI PEREKONOMIAN

Kondisi perekonomian kota Bandung yang bercirikan struktur perekonomian urban atau kota yang tengah mengalami perbaikan dan peningkatan di semua sektor, selain berdasarkan hasil FGD yang dilakukan di hampir seluruh SKPD Kota Bandung, terungkap kondisi perekonomian kota Bandung saat ini mempunyai karakteristik penyebaran sentra sentra perdagangan yang belum optimal serta upaya penggalan pendapatan asli daerah yang masih belum optimal.

### C. INFRASTRUKTUR KOTA

1. Sanitasi/limbah
2. Drainase
3. Sampah

4. Air Minum/ Air Bersih
5. Telekomunikasi
6. Jaringan listrik
7. Jaringan gas

Berdasarkan hasil FGD yang dilakukan dengan hampir seluruh SKPD yang ada di kota Bandung diperoleh data berkenaan dengan kondisi obyektif berikut dengan permasalahan infrastruktur dan penataan kota Bandung pada saat ini:

1. adanya masalah kurang memadainya komposisi berkenaan dengan ruang terbuka hijau di kota Bandung saat ini
2. Semakin kompleksnya permasalahan penanganan sampah saat ini
3. Semakin mendesaknya penanganan permasalahan pusat primer gedebage dalam waktu dekat.

#### D.KONDISI SOSIAL BUDAYA

Kondisi sosial budayakota Bandung dicirikan dengan perubahan sosial budaya yang demikian cepat. Hal ini disebabkan oleh mobilitas penduduk yang memperlihatkan sebagai kota jasa. Salah satu implikasi yang makin terasa adalah pergeseran nilai dan norma budaya lokal berganti dengan budaya kosmopolitan, dengan indikator mulai asingnya penggunaan bahasa Sunda dikalangan kaum muda, etika atau sopan santun dalam kehidupan bermasyarakat, dilanggarnya norma norma kesusilaan dan makin ditinggalkannya jenis kesenian yang menjadi identitas masyarakat Bandung.

Berdasarkan hasil FGD yang dilakukan hampir semua SKPD di kota Bandung, dapatlah diperoleh beberapa permasalahan kondisi sosial budaya yang perlu perhatian dimasa datang, yakni:

- a. kuatnya perubahan sosial menjadikan permasalahan pergeseran nilai, khususnya dalam kesetiakawanan sosial semakin nyata di kota Bandung. Permasalahan terutama tertuju dari masyarakat beruntung kepada yang tidak beruntung.
- b. Semakin menguatnya budaya metropolitan akan melahirkan permasalahan budaya kosmopolitan yang mengganti dan mereform budaya lokal secara acak. Ini diindikasikan semakin ditinggalkannya kesenian tradisional

#### D. VISI DAN MISI KOTA BANDUNG HINGGA AKHIR TAHUN 2008.

Visi kota Bandung dalam jangka waktu 2004 –2008 adalah kota Bandung sebagai kota jasa yang bermartabat (bersih, makmur, taat, dan bersahabat)

1. Mengembangkan sumber daya manusia yang handal dan religius, yang mencakup pendidikan, kesehatan dan moral keagamaan.

2. Mengembangkan perekonomian kota yang adil, yang mencakup peningkatan perekonomian kota yang tangguh, sehat dan berkeadilan dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat.
  3. Mengembangkan sosial budaya kota yang ramah dan berkesadaran tinggi, berhati nurani.
  4. Meningkatkan penataan kota, yang mencakup pemeliharaan serta peningkatan sarana dan prasarana kota agar sesuai dengan dinamika peningkatan kegiatan kota yang memperhatikan tata ruang dan daya dukung lingkungan kota.
- E. POTENSI, PELUANG DAN ANCAMAN YANG DIHADAPI
1. Potensi  
Pengertian potensi dalam hal ini adalah kemampuan, kekuatan, kesanggupan, dan daya yang dimiliki oleh kota bandung yang memungkinkan untuk dikembangkan. Digali dan dijadikan sebagai sarana untuk membangun kota.
  2. Peluang  
Selanjutnya peluang dan pemahaman mengenai peluang yang dimiliki oleh kota bandung yang apabila disikapi dengan bijaksana memiliki dampak positif bagi upaya pengembangan kota bandung. Beberapa peluang yang dimiliki kota bandung yang dapat dijadikan dasar atau bahan pertimbangan dalam penyusunan RIPP sebagai berikut:
    - a. Peluang untuk investasi
    - b. Daerah tujuan wisata
    - c. Pengembangan kota konferensi
    - d. Pengembangan sister city
  3. Kendala dan tantangan  
Kendala dan tantangan yang dimiliki kota bandung adalah:
    - a. rendahnya daya saing
    - b. menurunnya daya dukung lingkungan
    - c. keterbatasan kemampuan pemerintah kota.

#### TREND PERKEMBANGAN BEBERAPA INDIKATOR UTAMA KINERJA PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG HINGGA TAHUN 2013

Untuk dapat merumuskan isu-isu strategis yang diperkirakan berkembang di masa datang, selain perlu memahami kondisi riil saat ini dan arah kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya, juga perlu dilakukan forecasting atau peramalan dari data empirik yang ada.

Secara rinci mengenai perkiraan kondisi kota bandung di masa datang adalah sebagai berikut:

- a. jumlah penduduk masih akan terus bertambah
- b. Jumlah keluarga miskin akan mengalami sedikit penurunan
- c. Pertumbuhan ekonomi akan mengalami peningkatan yang signifikan

- d. Tingkat pengangguran relatif tetap
- e. Peran sektor jasa tetap mendominasi

#### ISU ISU STRATEGIS

##### A. Isu strategis sumber daya manusia

- 1. isu kualitas SDM yang masih relatif kurang
- 2. isu tentang kurang nya sarana dan prasarana bagi pengembangan kualitas SDM
- 3. Isu keterhubungan antara sektor pendidikan dengan kebutuhan lapangan kerja
- 4. Isu komersialisasi pendidikan
- 5. Isu kesejahteraan tenaga pendidik
- 6. Isu disparitas (perbedaan/kesenjangan) kelengkapan sarana prasarana
- 7. Isu peduli pendidikan
- 8. Isu SDM aparatur pemerintah
- 9. Isu tentang rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat untuk membiayai kesehatan
- 10. Isu rendahnya kualitas kesehatan masyarakat
- 11. Isu merebaknya penyakit menular

##### B. Isu strategis bidang perekonomian kota

Dikaitkan dengan tuntutan akan kondisi perekonomian dimasa yang akan datang, beberapa isu strategis yang dihadapi kota bandung dapat diidentifikasi antara lain sebagai berikut:

- 1. Isu kemiskinan ekonomi perkotaan
- 2. Isu meningkatnya jumlah pengangguran
- 3. Isu merebaknya sektor ekonomi informal
- 4. Isu masih lemahnya penanganan terhadap sektor usaha kecil dan menengah
- 5. Isu keseimbangan struktur ekonomi
- 6. Isu pengembangan daya tarik investasi
- 7. Isu tentang efisiensi alokasi APBD
- 8. Isu tentang efisiensi Perusahaan daerah
- 9. Isu tentang kurang optimalnya penggalan PAD

##### C. ISU STRATEGIS BIDANG SOSIAL BUDAYA

- 1. Isu pembumian nilai budaya lokal
- 2. Isu peningkatan partisipasi sosial
- 3. Isu solusi kepedulian sosial
- 4. Isu kesetiakawanan sosial
- 5. Isu pengendalian sosial
- 6. Isu penguatan karakter masyarakat bermartabat
- 7. Isu ketahanan sosial



D. ISU STRATEGSI BIDANG PENATAAN KOTA

1. Isu penataan struktur tata ruang kota
2. Isu penanganan transportasi
3. Isu penataan sarana dan prasarana kota
4. Isu pemanfaatan ruang kota

E. ISU STRATEGIS BIDANG PEMERINTAHAN KOTA

1. Isu persaingan
2. Isu daya tarik investasi
3. Isu kemiskinan/Disparitas sosial
4. Isu integritas sosial
5. Isu pemberdayaan
6. Isu pengendalian mobilitas sosial dan bencana alam
7. Isu peningkatan infrastruktur
8. Isu pemerataan kesejahteraan
9. Isu profesionalisme aparatur/SDM
10. Isu kelembagaan pemerintah

ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM INDIKATIF KELITBANGAN  
KOTA BANDUNG

1. ARAH KEBIJAKAN KELITBANGAN

Berdasarkan kondisi empirik yang ada saat ini dan kecenderungan perkembangan kota bandung ke depan serta isu isu strategis yang muncul dan mungkin muncul dimasa datang, maka arah kebijakan kota bandung adalah sebagai berikut:

- a. Litbang sumber daya manusia
- b. Litbang bidang ekonomi
- c. Litbang bidang sosial budaya
- d. Litbang bidang penataan kota
- e. Litbang bidang pemerintahan kota

2. PRIORITAS TEMA DAN TOPIK (PROGRAM KEGIATAN INDIKATIF)

Berdasarkan berbagai analisis, maka dapat diprediksi indikasi kebutuhan kajian kota bandung sebagai kota jasa dimasa datang adalah sebagai berikut:

TERM I ( 2007 – 2008)

- a. Bagaimana meningkatkan sumber daya manusia masyarakat dan aparatur agar dapat bersaing serta memiliki kompetensi yang direfleksikan dalam sikap , perilaku serta kemampuan intelektual dan spiritual sehingga terbentuk integritas yang didukung oleh pola disiplin yang baik dan amanah.

- b. Bagaimana memanfaatkan lembaga lembaga pendidikan yang ada dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia di kota bandung.

TERM II (2009 – 2013)

- a. Bagaimana meningkatkan keterkaitan/keterhubungan antara kompetensi yang dikembangkan di lembaga pendidikan dengan kebutuhan tenaga kerja
- b. Bagaimana mengembangkan pendidikan dan kesehatan yang dapat terjangkau seluruh lapisan masyarakat
- c. Bagaimana meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik dan tenaga kesehatan di kota bandung
- d. Bagaimana meningkatkan sarana prasarana dan pembiayaan pendidikan dan kesehatan di kota bandung
- e. Bagaimana meningkatkan peran serta swasta dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan di kota bandung
- f. Bagaimana merubah pola hidup masyarakat tradisional yang kurang memperhatikan sektor pendidikan dan kesehatan

PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN MEKANISME KOORDINASI DI KOTA BANDUNG

A. PENGEMBANGAN KAPASITAS

1. pengembangan kuantitas peneliti:  
dengan cara melakukan job analysis dan melakukan pengukuran beban kerja dan memperkirakan kebutuhan pegawai.
2. pengembangan kompetensi peneliti  
dengan mengelompokkan tiga aspek yaitu knowledge, skill dan attitude yang harus dimiliki seorang peneliti,

B. MEKANISME KOORDINASI

- 1, Koordiansi perencanaan
3. Koordinasi pelaksanaan
4. Koordinasi evaluasi

## KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah kami panjatkan ke khadirat Illahi Rabbi karena atas perkenan-Nya-lah kami dapat menyelesaikan Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan (RIPP) Kota Bandung ini sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Kota Bandung merupakan daerah otonom yang berkembang pesat ke arah kota metropolitan. Akibatnya, kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh Kota Bandung menjadi semakin kompleks. Oleh sebab itu pembangunan Kota Bandung haruslah bersifat menyeluruh dan berkelanjutan, bukan bersifat parsial dan sektoral.

Berbagai kebijakan dan program pembangunan yang telah dilakukan Pemerintah Kota Bandung seringkali tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena tidak sesuai dengan situasi dan kebutuhan. Hal ini muncul karena kebijakan dan program pembangunan tersebut tidak didukung oleh penelitian dan pengembangan yang tepat, tetapi lebih berdasarkan pada *sense* dari pembuat kebijakan/ program saja. Padahal semestinya penelitian dan pengembangan menjadi dasar dalam merumuskan berbagai kebijakan/ program pembangunan. Namun demikian pada dasarnya objek penelitian berupa penggalian dan pencarian solusi atas permasalahan Kota Bandung sudah banyak dilakukan, namun belum sepenuhnya diterapkan secara proporsional untuk kepentingan pembangunan dan masyarakat. Di samping itu penelitian dan pengembangan oleh berbagai instansi di Pemerintah Kota Bandung yang dilakukan seringkali tidak terkoordinasi dengan baik.

Untuk kepentingan tersebut maka diperlukan suatu perencanaan penelitian dan pengembangan yang akan memayungi setiap penelitian yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung. Adapun bentuk kegiatan dimaksud

adalah Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan (RIPP) Kota Bandung yang akan berisikan acuan untuk pelaksanaan penelitian dan pengembangan pembangunan Kota Bandung.

Selanjutnya semoga RIPP ini dapat dimanfaatkan dan dipergunakan untuk kepentingan terutama dalam bidang Penelitian dan Kajian Pemerintah Kota Bandung.

Terimakasih

Bandung, Desember 2006

Kantor LITBANG KOTA BANDUNG  
Kepala,

Dra. Kamalia Purbani, MSP

## DAFTAR ISI

### RENCANA INDUK PENGEMBANGAN (RIPP) KOTA BANDUNG

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
<b>BAB I      PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Maksud dan Tujuan Kegiatan.....	3
C. Sasaran Kegiatan.....	4
D. Ruang Lingkup RIPP.....	5
E. Kerangka Pemikiran.....	7
F. Metodologi Penyusunan RIPP.....	13
 <b>BAB II      KONDISI KOTA BANDUNG.....</b>	 <b>14</b>
A. Sumber Daya Manusia.....	14
B. Kondisi Perekonomian.....	18
C. Infrastruktur Kota.....	22
D. Kondisi Sosial Budaya.....	33
E. Visi dan Misi Kota Bandung Hingga Tahun 2008.....	35
F. Potensi, Peluang, dan Ancaman yang Dihadapi.....	36
 <b>BAB III      TREND PERKEMBANGAN BABERAPA INDIKATOR UTAMA                  KINERJA PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG HINGGA TAHUN                  2013.....</b>	  <b>42</b>
A. Jumlah Penduduk Masih akan Terus Meningkat.....	43

B.	Jumlah Keluarga Miskin akan Mengalami Sedikit Penurunan	44
C.	Pertumbuhan Ekonomi akan Mengalami Peningkatan yang Signifikan.....	46
D.	Tingkat Pengangguran Relatif Tetap.....	49
E.	Peran Sector Jasa Tetap Mendominasi: Laebih dari 62% PDRB.....	51
F.	Pengeluaran Pemerintah akan Meningkatkan Tajam Seiring dengan Makin Tingginya Tuntutan Pelayanan, Namun Proporsi Belanja Aparatur Lebih Tinggi Dibanding Belanja Publik.....	55
<b>BAB IV</b>	<b>ISU-ISU STRATEGIS .....</b>	<b>60</b>
A.	Isu Strategis Bidang Sumber Daya Manusia.....	60
B.	Isu Strategis Bidang Perekonomian Kota .....	65
C.	Isu Strategis Bidang Sosial Budaya .....	72
D.	Isu Strategis Bidang Penataan Kota .....	76
E.	Isu Strategis Bidang Pemerintahan Kota .....	81
<b>BAB V</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM INDIKATIF KELITBANGAN KOTA BANDUNG.....</b>	<b>87</b>
A.	Arah Kebijakan Kelitbangan.....	87
B.	Prioritas Tema dan Topik Kajian .....	89
1.	Program Indikatif Sumber Daya Manusia.....	89
2.	Program Indikatif Bidang Perekonomian Kota dan Keuangan Daerah.....	92
3.	Program Indikatif Bidang Sosial Budaya.....	94
4.	Program Indikatif Bidang Penataan Kota.....	96
5.	Program Indikatif Bidang Pemerintahan Kota.....	98
<b>BAB VI</b>	<b>PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN MEKANISME KOORDINASI</b>	

KELITBANGAN KOTA BANDUNG.....	102
A. Pengembangan Kapasitas.....	102
1. Pengembangan Kuantitas Peneliti.....	103
2. Pengembangan Kompetensi Peneliti.....	104
B. Mekanisme Koordinasi.....	107
1. Koordinasi Perencanaan .....	107
2. Koordinasi Pelaksanaan .....	108
3. Koordinasi Evaluasi .....	109
DAFTAR PUSTAKA.....	112

# BAB I

## Pendahuluan



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Kota Bandung sebagai salah satu daerah otonom yang terus berkembang ke arah Kota Metropolitan tentu saja memiliki kompleksitas kebutuhan dan permasalahan yang semakin meningkat. Kota Bandung sebagai pusat pemerintahan, pusat pendidikan, pusat perdagangan yang kemudian berkembang menjadi kota jasa merupakan daya tarik tersendiri bagi kota ini. Di satu sisi, perkembangan Kota Bandung yang pesat tersebut merupakan keuntungan, namun di sisi lain apabila tidak direncanakan, dimanfaatkan dan dikendalikan dengan baik maka akan menimbulkan kendala dan permasalahan yang kompleks.

Konsekuensi logis dari adanya peluang dan tantangan dari perkembangan kota yang pesat tersebut, maka pembangunan Kota Bandung harus dilakukan secara menyeluruh (*comprehensive*) dan berkelanjutan (*sustainable*), bukan bersifat parsial dan sektoral. Selama ini, banyak kebijakan dan program pembangunan yang dibuat kurang bisa menjawab persoalan dan kebutuhan riil Kota Bandung.

Berbagai permasalahan timbul karena sering kali kebijakan dan program pembangunan yang dibuat tidak didukung dengan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan, tapi lebih didasarkan pada *sense* dari pembuat kebijakan/program saja. Padahal seharusnya, Kegiatan Penelitian dan Pengembangan seyogyanya menjadi dasar dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan/program pembangunan Kota Bandung. Dalam hal ini, Kegiatan Penelitian dan Pengembangan dapat dilihat sebagai suatu bentuk investasi pada sektor pembangunan, untuk selanjutnya dapat ditindaklanjuti dengan program dan kebijakan pembangunan yang sesuai. Sebagai suatu

investasi, setiap Kegiatan Penelitian dan Pengembangan memiliki sejumlah kegiatan yang terdiri dari berbagai unsur yang mencakup dana, daya, maupun waktu yang mendukungnya menjadi suatu kesatuan yang utuh sehingga dapat berperan secara penuh bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan Penelitian dan Pengembangan dapat pula dilihat sebagai suatu kesatuan dari berbagai kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan untuk memperoleh manfaat dari pengorbanan biaya (*costs*) di masa sekarang. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan selalu mempunyai titik awal kegiatan (*starting point*) dan titik akhir kegiatan (*ending point*) serta selalu mempunyai tujuan berupa manfaat tertentu yang ingin dicapai. Dengan perkataan lain Kegiatan Penelitian dan Pengembangan merupakan suatu “langkah kebijaksanaan” yang berisikan sejumlah kegiatan yang merupakan suatu kesatuan, dan mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu. Tujuan yang utama adalah untuk mendukung atau mendasari setiap program dan kebijakan pembangunan yang diambil, yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Kota Bandung.

Di Kota Bandung, Kegiatan Penelitian dan Pengembangan yang ada selama ini, dilakukan oleh Kantor Litbang Kota Bandung, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan lembaga penelitian lain baik Perguruan Tinggi maupun Pusat Kajian negeri maupun swasta. Hal yang sering kali terjadi adalah bahwa Kegiatan Penelitian dan Pengembangan tersebut tidak terkoordinasi dengan baik. Sebenarnya, banyak kegiatan penelitian yang objek kajiannya menggali permasalahan Kota Bandung namun hasil kajiannya belum sepenuhnya dapat diterapkan secara proporsional untuk kepentingan pembangunan Kota Bandung itu sendiri.

Kaitannya dengan pembangunan, Kegiatan Penelitian dan Pengembangan dinilai memiliki peran strategis sebagai dasar/justifikasi bagi pelaksanaan suatu program atau kebijakan pembangunan tertentu. Untuk itu,

agar dapat berperan sebagai peralatan strategis yang efektif dan efisien, setiap Kegiatan Penelitian dan Pengembangan memerlukan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian yang baik. Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian Kegiatan Penelitian dan Pengembangan merupakan bagian dari sistem dan proses administrasi pembangunan, khususnya dalam proses perencanaan, baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang yang dapat dilihat sebagai suatu bentuk aplikasi bagi tercapainya Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung.

Berlatar belakang hal-hal tersebut di atas, selanjutnya dinilai perlu untuk membuat suatu acuan atau pedoman (*guidance*) dalam melaksanakan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Kota Bandung. Acuan atau pedoman ini berupa Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan (RIPP) yang dibuat agar Kegiatan Penelitian dan Pengembangan yang dilakukan, baik oleh Pemerintah Kota Bandung pada umumnya maupun oleh Kantor Litbang Kota Bandung secara khusus, dapat dilakukan dengan topik atau tema yang sesuai dengan kebutuhan dan tahapan yang jelas dan sistematis. RIPP merupakan gambaran menyeluruh mengenai topik dan tujuan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan yang akan dilaksanakan di Kota Bandung agar dapat menunjang pencapaian visi, misi, tujuan serta sasaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bandung.

Di samping itu, perlu juga dibuat suatu rumusan mengenai arah kebijakan kelitbangan Kota Bandung dan pengkajian mengenai tuntutan strategis bidang kelitbangan Kota Bandung yang dikaitkan dengan pentingnya upaya penguatan kapasitas kelembagaan Kegiatan Kelitbangan Kota Bandung.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN

Penyusunan RIPP ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Kota Bandung dalam pembangunan dan pelayanan kepada

masyarakat dengan dukungan penelitian dan pengembangan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan riil Kota Bandung.

Untuk mewujudkan maksud tersebut maka Penyusunan RIPP ini bertujuan agar pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Kota Bandung lebih terkoordinasi, baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Selanjutnya, RIPP ini akan dijadikan sebagai payung dan panduan bagi rencana dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Bandung. Juga dimaksudkan untuk merumuskan suatu arahan kebijakan kelitbangan Kota Bandung dan arahan pengembangan kapasitas kelembagaan kelitbangan Kota Bandung di masa mendatang.

### C. SASARAN KEGIATAN

Berdasarkan maksud dan tujuan tersebut di atas, selanjutnya sasaran yang ingin dicapai dengan tersusunnya RIPP ini adalah untuk :

1. Terumuskannya arahan kebijakan kelitbangan Kota Bandung hingga Tahun 2013;
2. Teridentifikasinya topik dan tema Kegiatan Penelitian dan Pengembangan yang dapat mendukung program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung.
3. Teridentifikasinya tahapan kegiatan serta mekanisme koordinasi, baik koordinasi perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi Kegiatan Penelitian dan Pengembangan yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di wilayah Kota Bandung.
4. Tersusunnya Standar Biaya Penelitian dan Pengembangan di Kota Bandung.
5. Terumuskannya arahan pengembangan kapasitas kelembagaan kelitbangan Kota Bandung di masa mendatang.

#### D. RUANG LINGKUP RIPP

Kegiatan Penelitian dan Pengembangan dilakukan dengan 2 tujuan; *pertama*, adalah untuk menghasilkan penemuan baru (*new discoveries*) yaitu menemukan kebijakan, strategi atau teknik baru dalam melaksanakan pembangunan daerah; *kedua*, untuk "*revise and define new implementations of existing discoveries*" yaitu merevisi atau memperjelas pelaksanaan kebijakan, strategi dan atau teknik pelaksanaan pembangunan suatu daerah.

Di Kota Bandung sendiri, Kegiatan Penelitian dan Pengembangan (*Research and Development*) yang dilakukan, lebih banyak merupakan bentuk-bentuk penelitian aplikatif dan penelitian untuk kebijakan (*Policy Research*) baik yang bersifat evaluasi kebijakan (*Policy Evaluation*) maupun rekomendasi kebijakan (*Policy Recommendation*). Maksudnya adalah bahwa penelitian dilakukan untuk mengungkap fakta, kenyataan empiris atau permasalahan yang ada di lapangan yang kemudian dicarikan solusi, strategi atau teknik yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan ataupun untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan dari objek yang diteliti. Dalam penelitian aplikatif, seperti halnya *policy research*, penelitian dilakukan sampai tahapan aplikasi (*application*) dan pengembangan (*development*):

Kegiatan Penyusunan Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan (RIPP) Kota Bandung ini mencakup kegiatan-kegiatan penelitian dan pengembangan yang bersifat strategis, bukan teknis, baik yang terkait dengan pembuatan kebijakan maupun evaluasi kebijakan. Sifat strategis yang dimaksudkan di sini diartikan sebagai Kegiatan Penelitian dan Pengembangan yang berada pada muatan substansi bukan implementasi yang berciri teknis, meskipun sebenarnya sifat strategis dan teknis ini tidak terlalu jelas batasannya, tergantung pada sifat dari penelitian tersebut. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan yang bersifat teknis tetap menjadi otoritas dari

SKPD yang bersangkutan, sehingga dalam hal ini tidak ada kesan bahwa SKPD di Kota Bandung akan "kehilangan lahan garapan", karena RIPP ini dibuat tidak dimaksudkan supaya Kantor Litbang Kota Bandung mengambil alih seluruh Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Kota Bandung. Jadi, Kegiatan Penelitian dan Pengembangan yang bersifat teknis tetap diserahkan sepenuhnya kepada SKPD yang bersangkutan, namun untuk Kegiatan Penelitian dan Pengembangan yang bersifat strategis harus dikoordinasikan baik dengan Kantor Litbang Kota Bandung maupun dengan SKPD lain yang terkait. Jadi, SKPD masih memiliki hak dan wewenang atas kegiatan-kegiatan yang bersifat teknis.

Agar Kegiatan Penelitian dan Pengembangan yang dilakukan mampu menjawab setiap persoalan dan permasalahan yang ada di Kota Bandung, maka Kegiatan Penelitian dan Pengembangan tersebut harus disesuaikan dengan berbagai isu strategis yang terjadi sekarang dan yang diprediksikan terjadi di masa mendatang. Untuk itu, pengkajian mengenai kondisi riil (eksisting) Kota Bandung dan kondisi Kota Bandung di masa mendatang (*forecasting*) sangat diperlukan. Gambaran mengenai kondisi riil dan kondisi di masa mendatang dari Kota Bandung tersebut selanjutnya digunakan sebagai bahan untuk menetapkan tuntutan kebutuhan untuk kemudian digunakan sebagai dasar merumuskan isu strategis.

Selanjutnya Penyusunan RIPP ini mencakup beberapa kegiatan sebagai berikut:

- 1) Mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan penelitian, yaitu menentukan tema dan topik Kegiatan Penelitian dan Pengembangan yang akan dilaksanakan di Kota Bandung;
- 2) Merumuskan arah kelitbangan dan menetapkan Program Indikatif yang akan dilakukan dari 2007 - 2013;

- 3) Menentukan mekanisme dan prosedur koordinasi Kegiatan penelitian dan Pengembangan di Kota Bandung, baik mekanisme perencanaan kajian, mekanisme pelaksanaan kajian, mekanisme pengendalian kajian dan mekanisme evaluasi kajian.
- 4) Menentukan standard biaya Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Kota Bandung;
- 5) Merumuskan arahan pengembangan kapasitas kelembagaan kelitbangan Kota Bandung di masa mendatang.

Sebagai Rencana Induk, RIPP memiliki *term* waktu tertentu sebagai jangka waktu perencanaan. Berkenaan dengan permasalahan ini, disadari bahwa RIPP ini merupakan *blueprint* atau pedoman dalam melaksanakan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Kota Bandung. Dalam kenyataannya, RIPP Kota Bandung baru berjalan setelah pemerintahan yang ada sekarang, oleh karena itu diharapkan RIPP ini akan tetap menjadi panduan sekalipun terjadi pergantian kepemimpinan nantinya. Karena itu, jangka waktu perencanaan yang dipergunakan adalah jangka menengah 5 tahun yang diambil setelah berakhirnya kepemimpinan yang ada sekarang, yaitu berakhir tahun 2008. Jadi *term* waktu perencanaan yang digunakan dalam kegiatan penyusunan RIPP ini adalah 2007-2013. Hal ini didasarkan atas pertimbangan politis maupun teknis.

#### E. KERANGKA PEMIKIRAN

Rencana Induk Penelitian Pengembangan ini diharapkan dapat memayungi berbagai program Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di seluruh sektor/bidang yang menjadi urusan daerah kota, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Menurut Pasal 14 UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa urusan wajib kabupaten dan kota adalah :

- a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan;

- b. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
- c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. Penyediaan sarana dan prasarana umum;
- e. Penanganan bidang kesehatan;
- f. Penyelenggaraan pendidikan;
- g. Penanggulangan masalah sosial;
- h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan;
- i. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- j. Pengendalian lingkungan hidup;
- k. Pelayanan pertanahan;
- l. Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
- m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan;
- n. Pelayanan administrasi penanaman modal;
- o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
- p. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Urusan wajib tersebut merupakan urusan yang harus dilaksanakan oleh daerah termasuk oleh Kota Bandung. Di samping itu Kota Bandung juga melaksanakan urusan pilihan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhannya. Dalam pelaksanaan urusan wajib dan pilihan, Pemerintah Kota Bandung telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang menetapkan Visi dan Misi yang ingin diwujudkan. Adapun visi Kota Bandung adalah "Terwujudnya Kota Bandung Sebagai Kota Jasa Yang Bermartabat (Bersih, Makmur, Taat dan Bersahabat)". Sedangkan misi Kota Bandung adalah sebagai berikut :



1. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang handal dan religius;
2. Mengembangkan perekonomian kota yang adil;
3. Mengembangkan sosial budaya kota yang ramah dan berkesadaran tinggi, serta berhati nurani;
4. Meningkatkan penataan kota;
5. Meningkatkan kinerja pemerintah kota secara profesional, efektif, efisien, akuntabel dan transparan;
6. Mengembangkan sistem keuangan kota

✓ RIPP yang dibuat harus pula mempertimbangkan prioritas pembangunan Kota Bandung yang menetapkan 7 bidang atau sektor prioritas pembangunan Kota Bandung yaitu :

- 1) Bandung Cerdas 2008,
- 2) Bandung Sehat 2007,
- 3) Bandung Hijau 2006,
- 4) Bandung Makmur 2008,
- 5) Bandung Kota Seni Budaya 2008,
- 6) Bandung Berprestasi 2008
- 7) Bandung Agamis 2008.

Untuk memperkuat nilai urgensi dan kebermanfaatannya, RIPP ini perlu juga mempertimbangkan kebutuhan *stakeholders* Kota Bandung selain pemerintah, yaitu sektor swasta dan masyarakat. Sebagaimana diketahui, sektor swasta dan masyarakat pun berharap bahwa kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan pemerintah tidak hanya sekedar menghabiskan dana publik tetapi memberikan manfaat, baik secara langsung maupun tidak

langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

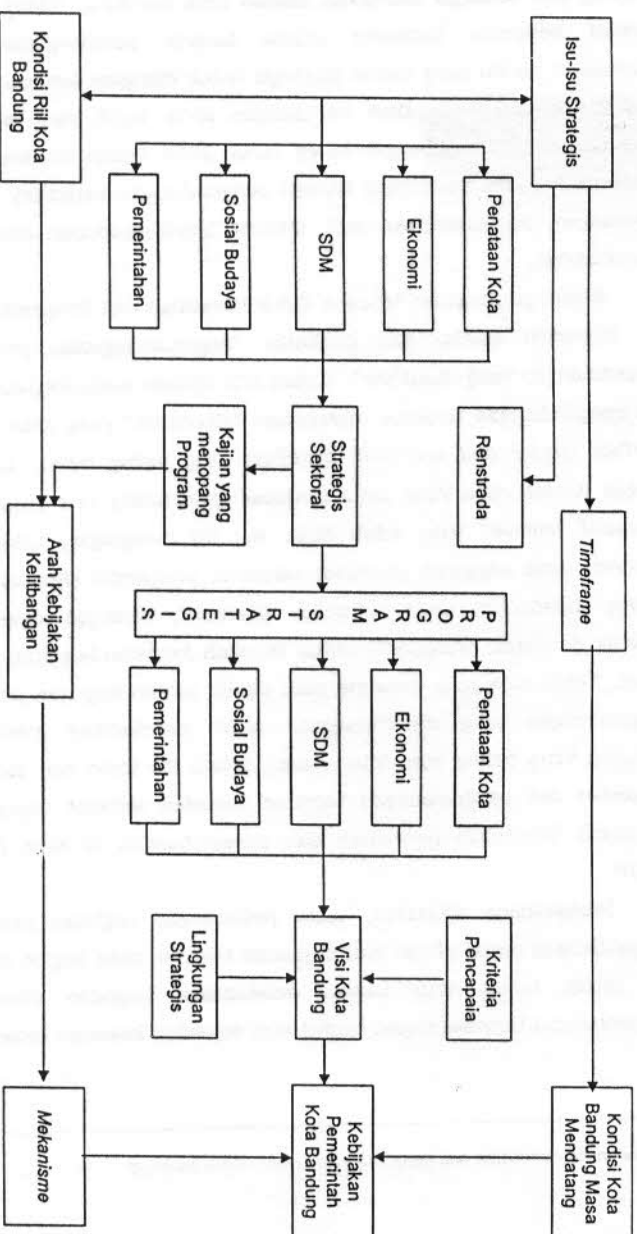
RIPP meliputi Asas atau Prinsip Penelitian dan Pengembangan. Prinsip atau Asas ini harus menjadi acuan setiap program Kegiatan Penelitian dan Pengembangan yang akan dilakukan. Prinsip tersebut nantinya akan dijadikan sebagai dasar filosofis yang harus dianut oleh setiap SKPD yang ingin menyelenggarakan Program/Kegiatan Penelitian dan Pengembangan. Prinsip atau Asas juga merupakan komitmen bagi pelaksana Program Penelitian dan Pengembangan untuk mementingkan kualitas dan integritas dalam pembuatan atau pelaksanaan penelitian dan pengembangan.

RIPP juga memuat prosedur atau mekanisme yang dapat mengarahkan program penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh SKPD di Kota Bandung agar tetap mengacu kepada RIPP tersebut. Prosedur dan mekanisme tersebut berfungsi sebagai alat kontrol agar skenario pembangunan yang didukung oleh hasil penelitian dan pengembangan dapat diwujudkan. RIPP ini mencakup ruang lingkup penelitian dan pengembangan serta sektor atau bidang yang menjadi objek penelitian serta target atau sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian dan pengembangan bidang atau sektor tertentu. Adapun mekanisme koordinasi yang dimaksud mencakup beberapa hal yaitu:

- 1) mekanisme perencanaan kajian;
- 2) mekanisme pelaksanaan kajian;
- 3) mekanisme pengendalian kajian;
- 4) mekanisme evaluasi kajian.

Didasarkan pada deskripsi tersebut, secara garis besar alur pikir dalam kegiatan Penyusunan Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan (RIPP) adalah sebagai berikut :

GAMBAR 1 : ALUR PIKIR



Diawali dengan melakukan kajian terhadap kondisi empirik kota Bandung dan berbagai kebijakan daerah Kota Bandung, dilanjutkan dengan prediksi beberapa indikator utama kinerja pembangunan, kemudian dirumuskan isu-isu yang dinilai strategis untuk diangkat sebagai bahan untuk menentukan arah kebijakan kelitbangan serta topik dan tema Kegiatan Penelitian dan Pengembangan hingga Tahun 2013. Selain itu dirumuskan juga beberapa program penunjang seperti pengembangan kapasitas kelembagaan kelitbangan, pengembangan staf, standar biaya penelitian dan mekanisme koorninasinya.

Dalam penyusunan Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan (RIPP) ini, dilakukan seleksi dan penilaian "kegiatan-kegiatan penelitian dan pengembangan yang diusulkan", dalam arti apakah suatu kegiatan penelitian dan pengembangan tersebut merupakan "alternatif" yang akan memberikan manfaat (*social and economic benefits*) yang paling besar, atau mungkin dengan jumlah dana yang sama terdapat *opportunity cost* atau "alternatif-alternatif lainnya" yang lebih baik. Hal ini mengingat, umumnya untuk sejumlah dana anggaran (*plafond*) tertentu, pengambil keputusan (*decision maker*) dihadapkan pada sejumlah alternatif, sehingga diperlukan cara ("teknik dan/atau prosedur") untuk memilih kegiatan-kegiatan yang paling sesuai. Tentu saja yang diterima atau dipilih adalah kegiatan penelitian dan pengembangan yang diperhitungkan akan memberikan manfaat (sosial ekonomi) yang paling atau lebih besar. Selain itu tema dan topik kegiatan penelitian dan pengembangan tersebut haruslah sedapat mungkin mampu menjawab kebutuhan penelitian dan pengembangan di Kota Bandung itu sendiri.

Sebagaimana diketahui, suatu pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan dapat dibagi atas sejumlah tahapan atau bagian pelaksanaan, dan setiap tahap atau bagian pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan tersebut dapat terdiri atas sejumlah kegiatan tertentu. Antara

tahap dan bagian dari kegiatan pelaksanaan yang satu terdapat saling hubungan dan keterkaitan dengan yang lainnya, sehingga tahap, bagian-bagian ataupun kegiatan pelaksanaan yang satu akan ditentukan atau tergantung dengan yang lainnya.

#### F. METODOLOGI PENYUSUNAN RIPP

Penyusunan Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan (RIPP) Kota Bandung ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Mengkaji kondisi Kota Bandung saat ini serta kebijakan yang telah diambil oleh Pemerintah Kota,
2. Memprediksikan kinerja Kota Bandung hingga Tahun 2013,
3. Mengidentifikasi berbagai isu strategis yang muncul,
4. Merumuskan arah kebijakan dan program atau kegiatan prioritas,
5. Mengkaji mekanisme koordinasi dan standar biaya penelitian di Kota Bandung.
6. Mengkaji langkah-langkah yang harus ditempuh dalam mengembangkan kapasitas kelembagaan kelitbangan di Kota Bandung.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi data sekunder, studi dokumen kebijakan, serta melakukan FGD (*Forum Group Discussion*) dengan para pimpinan SKPD di Kota Bandung.

# BAB II

## Kondisi Kota Bandung

## BAB II

### KONDISI KOTA BANDUNG ✓

Pengkajian mengenai kondisi riil Kota Bandung digunakan sebagai dasar untuk menetapkan beberapa tuntutan kebutuhan, dan selanjutnya untuk merumuskan isu strategis. Secara rinci mengenai kondisi riil Kota Bandung per bidang dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### A. SUMBER DAYA MANUSIA ✓

Kondisi kependudukan Kota Bandung dari tahun 2000 terus mengalami kenaikan sampai dengan tahun 2004, sampai akhirnya berdasarkan hasil Susenas tahun 2004, jumlah penduduk Kota Bandung adalah 2.232.624 jiwa. Kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar adalah Kecamatan Bandung Kulon (127.079 jiwa), Kecamatan Babakan Ciparay (126.376 jiwa) dan Kecamatan Kiaracondong (124.986 jiwa). Dilihat dari kondisi kependudukannya, SDM Kota Bandung dari tahun 2000 terus mengalami kenaikan sampai dengan tahun 2004 sampai akhirnya berdasarkan hasil Susenas tahun 2004, jumlah penduduk Kota Bandung adalah 2.232.624 jiwa.

Lebih rinci mengenai perkembangan jumlah penduduk Kota Bandung dari tahun 2000 - 2004 dirinci menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.1**  
**Jumlah Penduduk Kota Bandung Menurut Kecamatan**  
**Dari Tahun 2000-2004**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk				
		2000	2001	2002	2003	2004
1	Bandung Kulon	118807	121613	94585	126860	127079
2	Babakan Ciparay	119975	120911	84253	126114	126376
3	Bojongloa Kaler	112245	110822	84834	115590	115830
4	Bojongloa Kidul	70419	72720	59142	75848	76008
5	Astanaanyar	69808	68877	69936	71847	71978
6	Regol	74245	73973	69697	77164	77298
7	Lengkong	70399	70136	69751	73162	73290
8	Bandung Kidul	47286	42678	34229	44518	44600
9	Margacinta	111616	101681	73712	106065	106259
10	Rancasari	61005	61661	51613	64320	64435
11	Cibiru	75450	75927	58985	79198	79350
12	Ujungberung	72749	73506	59598	76670	76825
13	Arcamajik	59241	59813	69816	62389	62512
14	Cicadas	92053	94357	85704	98423	98611
15	Kiaracondong	118504	119598	103865	124753	124986
16	Batununggal	114788	114298	103016	119221	119451
17	Sumur Bandung	38306	36654	39285	38231	38311
18	Andir	90058	95890	88767	100022	100211
19	Cicendo	96363	86703	85274	90442	90602
20	Bandung Wetan	31517	35167	55098	36683	36751
21	Cibeunying Kidul	103175	104154	91066	108636	108860
22	Cibeunying Kaler	66579	66928	54392	69802	69963
23	Coblong	114334	112699	97096	117532	117827
24	Sukajadi	95242	95709	79933	99833	100021
25	Sukasari	73360	73191	60396	76345	76490
26	Cidadap	44313	46594	42967	48599	48700
Jumlah		2.136.260	2.146.360	2.142.194	2.228.267	2.232.624

Sumber : Hasil Kompilasi Kota Bandung Dalam Angka

Secara kualitas Sumber Daya Manusia Kota Bandung dari tahun ke tahun menunjukkan adanya suatu kecenderungan mengalami peningkatan. Hal tersebut diindikasikan dengan semakin membaiknya Angka Melek Huruf yang hampir mendekati 100% terlihat dalam tabel berikut, hal ini menandakan jumlah penduduk yang tidak bisa baca tulis hampir sudah tidak ada di Kota



Bandung. Kalau pun ada adalah SDM (penduduk) pendatang dari luar Kota Bandung yang mencoba mengadu nasib di Kota Bandung.

**Tabel 2.2**  
Rincian Angka Melek Huruf di Kota Bandung Tahun 1998 - 2002

No	Tahun	AMH (%)
1.	1998	98,65
2.	1999	98,07
3.	2000	98,97
4.	2001	99,10
5.	2002	99,10

Sumber : LKPJ Tahun 2003

Lebih detail lagi Angka Partisipasi Kotor maupun Angka Partisipasi Murni dari SDM Kota Bandung tahun ke tahun mengalami perbaikan dengan demikian dapat ditafsirkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat untuk menempuh pendidikan di bangku sekolah semakin meningkat. Namun demikian APK dan APM semakin tinggi tingkatan sekolahnya semakin menurun. APK dan APM Kota Bandung yang melebihi 100% disebabkan banyaknya SDM/penduduk Luar Kota Bandung yang menempuh pendidikan di Kota Bandung. APK dan APM SLTA masih dibawah 100% hal ini menandakan bahwa tidak semua penduduk usia sekolah Kota Bandung yang dapat menempuh pendidikan ke jenjang SLTA. Rincian APK dan APM terlihat dalam tabel berikut :

**Tabel 2.3**  
Rincian Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni di Kota Bandung Tahun 1998 - 2005

TAHUN	SD		SLTP		SLTA	
	APK	APM	APK	APM	APK	APM
1998	108,37	91,63	107,75	77,86	99,26	76,38
1999	96,17	89,76	80,12	68,59	64,53	52,39
2000	97,90	92,03	93,09	41,87	91,08	35,00
2001	129,13	107,66	97,11	69,82	98,10	52,00
2002	130,91	109,69	98,01	77,44	102,07	74,12
2003	127,86		100,75		81,83	
2004	138,41		106,85		82,33	
2005	138,41		106,85		82,33	

Sumber : LKPJ 2003 - 2005

SDM Kota Bandung dilihat dari rata-rata lama sekolah menunjukkan angka yang memperlihatkan Wajib Belajar Pendidikan (Wajardikdas) 9 tahun sudah mulai terlampaui bahkan sudah mencapai rata-rata di atas 10 tahun sehingga pada tahun 2013 kemungkinan sudah bisa menggapai RLS diatas 12 tahun. Dengan demikian pada tahun 2013 SDM kota Bandung sudah menempuh pendidikan SLTA. Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kota Bandung dari tahun 1998 sampai dengan 2005 terlihat dalam tabel berikut :

**Tabel 2.4**  
**Rata-rata Lama Sekolah di Kota Bandung (1998 - 2005)**

No.	Tahun	RLS (Tahun)
1.	1998	9,60
2.	1999	9,60
3.	2000	9,60
4.	2001	9,11
5.	2002	9,27
6.	2003	Na
7.	2004	10,32
8.	2005	10,54

Sumber : LKPJ 2003 - 2005

Perkembangan kualitas SDM penduduk dengan indikator-indikator tersebut cenderung mengalami kenaikan/perbaikan namun seiring dengan hal tersebut ada suatu kecenderungan lain dimana pertumbuhan jumlah sekolah mengalami penurunan hanya TK yang mengalami peningkatan jumlah, sedangkan jumlah SD, SLTP, SMA dan SMK mengalami penurunan. Baru pada tahun 2004 terjadi peningkatan jumlah SMK di Kota Bandung. Dengan Visi bandung sebagai Kota Jasa dan tuntutan peningkatan kompetensi masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan maka kebutuhan akan SMK kedepan sangat dibutuhkan/diperlukan. Pertumbuhan Jumlah sekolah terlihat dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.5**  
**Pertumbuhan Jumlah Sekolah di Kota Bandung**  
**Tahun 1999 - 2004**

Tahun	TK	SD	SLTP	SMA	SMK
1999	338	1087	219	131	67
2000	342	1090	219	131	67
2001	348	1036	212	136	70
2002	354	943	210	135	69
2003	354	943	210	135	69
2004	379	923	207	135	75

Sumber : BPS 1999 - 2004

Selain itu, berdasarkan hasil FGD yang dilakukan dengan hampir seluruh SKPD di Kota Bandung, dapat diidentifikasi kondisi SDM Kota Bandung sebagai berikut:

- Jumlah penduduk yang tidak terkendali dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi.
- Arus urbanisasi yang sulit untuk dikendalikan
- Penyebaran penduduk yang kurang merata.
- Tingkat pengangguran yang tinggi.
- Bandung Sehat 2007 menjadi sulit untuk dapat dicapai.
- Kurang profesionalnya SDM di bidang kesehatan.

#### B. KONDISI PEREKONOMIAN

Kondisi perekonomian Kota Bandung yang bercirikan struktur perekonomian *urban* atau kota yang tengah mengalami perbaikan dan peningkatan dalam semua sektor. Hal ini dapat dilihat indikatornya dari Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Bandung yang mengalami pertumbuhan yang tinggi, yaitu pada masa krisis (1998) LPE sebesar -19,69%. Seiring dengan pulihnya perekonomian pada tingkat nasional dan regional, pertumbuhan ekonomi Kota Bandung sejak tahun 2000 mengalami perbaikan dan peningkatan positif sebesar 5,41% pada tahun 2000, 7,57% pada tahun 2001

dan pada tahun 2002 sebesar 7,13%. Tingkat inflasi pada periode tersebut adalah sebesar 5,05% pada tahun 2000, 11,26% pada tahun 2001 dan 11,09% pada tahun 2002 dengan tingkat pengangguran pada tahun 2002 adalah sebesar 8,84% dari jumlah penduduk angkatan kerja. ✓

Dalam konteks pembangunan, perekonomian merupakan sektor yang menjadi salah satu indikator keberhasilan suatu negara, wilayah maupun pemerintah. Barometer potensi tersebut dinilai dari bagaimana pemenuhan kebutuhan barang dan jasa: warga masyarakat suatu wilayah (kota/kabupaten) tersebut. Dalam pemahaman sebagai potensi, perekonomian harus mendukung faktor-faktor pembangunan kota itu sendiri, seperti pendukung pembangunan di sektor infrastruktur dan suprastruktur (prasarana dan sarana) pendukung regulasi pemerintah, pelayanan kepada masyarakat serta pembangunan pendukung kegiatan perekonomian kemasyarakatan, seperti pembangunan dengan pengarah dan penyusunan sentra-sentra ekonomi tertentu (perdagangan dan jasa).

✓ Struktur ekonomi Kota Bandung pada tahun 2002 terdiri atas : *pertama*, sektor primer yang berkontribusi 0,40% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB); *kedua*, sektor sekunder yang berkontribusi 39,86% terhadap PDRB; dan *ketiga*, sektor tersier (jasa) yang berkontribusi 59,74% terhadap PDRB. Dari struktur ekonomi tersebut menunjukkan bahwa sektor tersier (jasa) merupakan sektor yang dominan dalam struktur ekonomi kota. Sektor tersier ini terdiri atas: sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, lembaga keuangan, persewaan, jasa-jasa perusahaan serta jasa pemerintahan.

Sementara itu jumlah penduduk miskin di Kota Bandung saat ini masih relatif banyak, baik penduduk asli Kota Bandung maupun pendatang yang mengadu nasib di Kota Bandung. Berikut jumlah keluarga miskin di Kota Bandung:

**Tabel 2.6**  
**Jumlah Penduduk Miskin di Kota Bandung Tahun 1999 - 2004**

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (KK)	Pertumbuhan (%)
1999	92.153	
2000	71.684	-22,2
2001	71.684	0
2002	62.660	-12,59
2003	84.288	34,52
2004	82.914	-1,63

Sumber: LKPJ Walikota Bandung 2003 - 2005

Sebagaimana nampak pada tabel secara umum, pasca krisis ekonomi tahun 1997-1998 jumlah keluarga miskin di Kota Bandung relatif tinggi, yaitu 92.153 KK pada Tahun 1999. Meskipun sejak 1999 mengalami penurunan, namun secara umum dari Tahun 2000 sampai dengan 2004 jumlah penduduk miskin justru mengalami peningkatan. Kondisi ini mengharuskan Pemerintah Daerah Kota Bandung berfikir secara keras untuk mencari jalan keluar dalam mengatasi kemiskinan ini.

Selain itu, meskipun laju pertumbuhan ekonomi Kota Bandung saat ini sudah relatif baik, namun kontribusi sektoral terhadap pertumbuhan tersebut (*share*) belum optimal dalam mendukung visi Kota Bandung sebagai Kota Jasa.

**Tabel 2.7**  
**Laju Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Harga Konstan di Kota Bandung Tahun 1990 - 2005**

Tahun	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)
1990	10,01
1991	10,77
1992	11,81
1993	12,52
1994	9,94
1995	11,27
1996	9,31
1997	4,47
1998	-19,69

1999	2,8
2000	5,41
2001	7,54
2002	7,13
2003	7,10
2004	7,49
2005	7,53

Sumber: Kota Bandung Dalam Angka, beberapa edisi

Pertumbuhan ekonomi Kota Bandung sbelum krisis 1997-1998 secara umum selalu melebihi 9%, bahkan hingga 1993 melebihi 10%. Krisis ekonomi telah menurunkan laju pertumbuhan ekonomi menjadi 4,47% pada Tahun 1997 dan mencapai terendah -19,69% pada Tahun 1998, lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi nasional yang pada tahun yang sama hanya -14%. Meskipun sejak Tahun 1999 perekonomian Kota Bandung sudah mulai bangkit kembali, namun belum mampu menyamai sebelum krisis.

**Tabel 2.8**  
Jumlah Tenaga Kerja dan Rasio Jumlah Tenaga Kerja Terhadap  
Jumlah Penduduk di Kota Bandung Tahun 1990 - 2004

Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah Tenaga Kerja	Rasio Jumlah Pddk Terhadap TK
1990	1.810.917	633.821	2.86
1991	1.824.399	607.525	3.00
1992	1.817.140	761.712	2.39
1993	1.819.336	765.416	2.38
1994	1.816.391	813.992	2.23
1995	1.809.964	604.887	2.99
1996	1.822.913	822.956	2.22
1997	2.435.328	847.104	2.87
1998	2.501.506	895.688	2.79
1999	2.543.476	968.994	2.62
2000	2.136.260	777.191	2.75
2001	2.146.360	826.620	2.60
2002	2.142.194	804.558	2.66
2003	2.228.267	823.375	2.71
2004	2.232.624	847.077	2.64

Sumber: Kota Bandung Dalam Angka, beberapa edisi

✓ Selama 15 Tahun terakhir, laju pertumbuhan penduduk dan laju pertumbuhan tenaga kerja di Kota Bandung relatif sebanding, sehingga rasio antara jumlah penduduk terhadap jumlah tenaga kerja relatif tetap berkisar sekitar 2,6. Hal ini menunjukkan bahwa angka beban tanggungan tenaga kerja masih relatif tinggi, rata-rata setiap orang tenaga kerja harus menanggung 2,6 penduduk.

✓ Selain itu, berdasarkan hasil FGD yang dilakukan dengan hampir seluruh SKPD di Kota Bandung, terungkap juga kondisi perekonomian Kota Bandung saat ini yang mempunyai karakteristik penyebaran sentra-sentra perdagangan dan jasa yang belum optimal, serta upaya penggalan Pendapatan Asli Daerah yang masih belum optimal.

### C. INFRASTRUKTUR KOTA ✓

Sebagaimana disebutkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2013, bahwa dalam konteks nasional, Kota Bandung mempunyai kedudukan dan peran yang strategis. Dalam PP No. 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Kota Bandung ditetapkan sebagai salah satu Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Selain itu, dalam RTRWN tersebut, Kota Bandung dan sebagian wilayah Kabupaten Bandung ditetapkan sebagai Kawasan Andalan Cekungan Bandung dan sekitarnya dengan sektor unggulan industri, pertanian tanaman pangan, pariwisata, dan perkebunan.

Selanjutnya dilihat dari prasarana perkotaannya, transportasi Kota Bandung merupakan sistem transportasi jalan raya, rel dan udara. Pergerakan lalu lintas di Kota Bandung yang sebagian besar menuju pusat kota/perdagangan (*Central Business District*) di sekitar Jl. Dewi Sartika, Jalan Asia Afrika, Jalan Merdeka, Jalan Diponegoro, dsb. Juga karena adanya pergerakan arus yang memasuki Kota Bandung pada hari-hari libur untuk

keperluan wisata ataupun hanya melintasi. Untuk pergerakan orang/penduduk pada skala pengangkutan regional, penduduk Kota Bandung umumnya memanfaatkan fasilitas bus angkutan antar kota yang berada di Leuwi Panjang dan Cicaheum. Tujuan dan arah pergerakan orang melalui terminal-terminal bus tersebut yang terdiri atas beberapa trayek. Pola angkutan barang yang memasuki Kota Bandung umumnya berupa truk, kendaraan bak terbuka, merupakan pergerakan dalam memenuhi kebutuhan pasar (perdagangan). Jalur pengiriman barang seperti ke Pasar Induk Gedebage, Caringin, Makro, dan lain-lain yang umumnya berasal dari Jakarta, Jawa atau kota-kota lainnya di Jawa Barat.

Dalam sistem pergerakan di Kota Bandung, jalan rel juga memegang peranan penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kota Bandung. Stasiun Kereta Api Bandung melayani pergerakan orang maupun barang ke arah barat maupun timur yaitu ke Kota Jakarta dan kota-kota besar lain di Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Stasiun Bandung hanya melayani penumpang untuk kelas bisnis dan eksekutif, sedangkan untuk kelas ekonomi dilayani oleh Stasiun Kiaracondong. Sedangkan untuk jalur pendek disediakan KRD yang umumnya dimanfaatkan oleh para pelajar pekerja maupun para pedagang untuk melakukan aktivitasnya di Kota Bandung, sehingga membentuk pergerakan *commuter* (ulang-alik). Selain itu untuk pergerakan lalu lintas juga ditunjang oleh Pelabuhan Udara Husein Sastranegara, sebagai penerbangan domestik yang datang sebanyak 198.263 orang, sedangkan penerbangan internasional yang datang sebanyak 16.484 orang dan yang berangkat sebanyak 14.765 orang.

Pola perjalanan yang ada di Kota Bandung menunjukkan bahwa pergerakan penduduk di luar Kota Bandung (eksternal/regional) menuju wilayah internal (Kota Bandung) adalah cukup besar (perjalanan eksternal-internal). Hal ini disebabkan oleh banyaknya penduduk di luar Kota Bandung yang bekerja di Kota Bandung. Sedangkan untuk perjalanan yang ada di Kota



Bandung sendiri (internal) pada umumnya dibangkitkan dari kawasan perumahan menuju pusat kota sebagai pusat kegiatan Kota Bandung.

Pola jaringan transportasi di Kawasan Kota Bandung menunjukkan karakteristik sebagai berikut:

1. Pola jaringan cenderung membentuk pola kombinasi radial konsentris sesuai dengan pola guna lahannya dengan beberapa poros utama kota, serta pada sebagian besar ruas jalan utama terdapat interaksi (simpangan) dengan jarak antara sangat dekat.
2. Pola jaringan pada kawasan perluasan (internal kota) membentuk pola radial untuk mengarahkan arus pergerakan tidak melalui pusat kota.
3. Pola jaringan pada kawasan pinggiran (luar kota) dilayani oleh jaringan jalan tol untuk memisahkan arus pergerakan regional tidak bercampur dengan pergerakan internal kota.

Jaringan jalan di Kota Bandung terdiri atas jaringan jalan primer untuk lalu lintas regional dan antarkota serta jaringan jalan sekunder untuk lalu lintas perkotaan. Total jaringan jalan di Kota Bandung sampai tahun 2000 adalah 1.139.219 km, yang terdiri atas jalan primer 42.140 km, jalan arteri sekunder 22.990 km, jalan kolektor primer 30.712 km; jalan kolektor sekunder 37.308 km, jalan lokal sepanjang 1.005.069 km.

Moda angkutan yang melayani pergerakan penduduk Kota Bandung terdiri atas kendaraan pribadi dan angkutan umum (angkutan kota). Jumlah angkutan umum non-bis dalam Kota Bandung sebanyak 5.521 unit armada yang terbagi menjadi 38 trayek (rute angkutan). Jumlah trayek terpadat/terbanyak armada pendukungnya adalah rute angkutan Abdul Muis - Cicaheum - via Binong dan rute angkutan Cicadas - Elang, dengan jumlah kendaraan masing-masing 369 dan 300 unit kendaraan.

Secara umum tempat-tempat kegiatan seperti pertokoan di wilayah Kota Bandung belum menyediakan lahan parkir. Akibatnya untuk beberapa

jalur jalan tertentu parkir kendaraan masih menggunakan badan jalan (*on street*) sebagai sarana perparkiran. Hal tersebut merupakan salah satu penyebab (pemicu) terjadinya kemacetan lalu lintas kota karena ruas jalan menjadi terganggu, seperti sering terjadi di Jalan Ahmad Yani, Kiaracondong, Otto Iskandardinata, Dewi Sartika, RE. Martadinata, dan lain-lain. Sedangkan sarana perparkiran lain adalah tempat parkir yang berada di luar badan jalan (*off street*). Tempat parkir ini biasanya disediakan oleh kawasan-kawasan perdagangan, perkantoran, pendidikan dan lain-lain.

#### 1. Sanitasi/ Limbah ✓

Kondisi penanganan limbah pada saat ini di Kota Bandung adalah sebagai berikut:

- Air dari dapur, mandi dan cuci:
  - a. *On-site disposal system*, seperti dibuang langsung ke pekarangan rumah, tanpa menggunakan saluran.
  - b. *Imperfect sewerage system*, yaitu dengan menggunakan saluran (*sewerage system*)
  - c. Sistem terpusat (*on-site*)
- Kotoran manusia:
  - a. *On-site disposal system*, yang meliputi penggunaan cubluk dan *septic tank*.
  - b. Sistem terpusat (*on-site*)

Pada saat ini sistem terpusat hanya melayani kurang 20% dari penduduk Kota Bandung, sedangkan sisanya berupa *on-site disposal* dan *Imperfect system*.

Air limbah di Kota Bandung diolah hanya dengan menggunakan satu buah Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), yang terletak di Bojongsoang yang kapasitasnya hanya 400.000 jiwa atau hanya

melayani lebih kurang 15% dari penduduk Kota Bandung saat ini. IPAL Bojongsoang ini melayani sistem terpusat Bandung Timur serta Tengah/ Selatan. Sistem terpusat yang melayani Bandung Barat langsung dialirkan menuju Sungai Citepus tanpa pengolahan, demikian juga dengan wilayah pelayanan Bandung Utara yang tidak diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke badan badan air. Kondisi ini menunjukkan tingginya tingkat pencemaran yang ditimbulkan oleh air limbah, terutama pencemaran air.

Pada saat ini di sebagian besar wilayah, saluran air kotor masih bercampur dengan saluran drainase (sistem campuran) dalam bentuk saluran terbuka. Saluran tertutup untuk limbah domestik maupun non domestik masih sangat terbatas.

Sistem pembuangan air limbah di Kota Bandung, baik setempat maupun terpusat, masih menghadapi permasalahan teknis dan non teknis dalam operasi pengelolaannya yang secara umum akibat kurangnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan sarana yang ada. Selain itu pengelolaan limbah non domestik, seperti limbah pabrik, masih banyak yang belum memenuhi standar yang telah ditentukan, bahkan masih banyak pabrik yang belum memiliki instalasi pengolahan limbah.

## 2. Drainase

Sistem drainase di Kota Bandung belum terencana dengan baik. Sebagian besar masih mengikuti pola alamiah, sebagian lagi berupa sistem drainase jalan. Secara umum sistem drainase di Kota Bandung terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu drainase makro dan mikro. Saluran pembuangan makro adalah saluran pembuangan yang secara

alami telah ada di Kota Bandung yang terdiri atas 15 sungai sepanjang 265,05 km, yaitu Sungai Cikapundung, Cipamokolan, Cidurian, Cicadas, Cinambo, Ciwastra, Citepus, Cibedung, Curug Dog-dog, Cibatuyut, Cikahyangan, Cibuntu, Cigondewah, Cibeureum dan Cinanjur. Sungai utama yang menampung air hujan Kota Bandung adalah Sungai Cikapundung dengan panjang 62,10 km yang memiliki 9 anak sungai yang mengalir dari utara ke selatan. Saluran drainase Kota Bandung di bagian utara yang dibangun oleh pemerintah Kolonial Belanda pada umumnya bermuara di Sungai Cikapundung.

Saluran pembuangan mikro adalah saluran yang sengaja dibuat mengikuti pola jaringan jalan. Pada akhirnya saluran ini bermuara pada saluran makro yang dekat dengan saluran mikro tersebut. Berdasarkan karakteristiknya, saluran mikro terbagi atas:

- Saluran yang berada di kota lama, sudah tidak dapat lagi menampung/menyalurkan limpahan air hujan sehingga sering terjadi *flash flood* terutama di wilayah Bandung Utara;
- Saluran yang berada di wilayah pengembangan, sebagian letaknya lebih rendah dari permukaan sungai, pembangunannya terintegrasi secara internal dalam wilayah Kota Bandung maupun secara eksternal dengan Kabupaten Bandung.

Kondisi saluran mikro ini di beberapa tempat terputus (tidak berhubungan dengan saluran di bagian hilirnya). Pada saat ini hanya sekitar 70% ruas jalan yang memiliki saluran drainase. Secara keseluruhan sistem drainase di Kota Bandung masih belum terencana dengan baik. Sebagai dampaknya adalah timbulnya daerah-daerah rawan banjir di beberapa lokasi, misalnya di Wilayah Gedebage dan

Arcamanik. Pada tahun 2001 luas daerah genangan banjir di Kota Bandung seluas 314,9 Ha dengan penyebaran sebagai berikut:

- Bandung Barat 90,4 ha,
- Bandung Timur 197 ha, dan
- Bandung Utara 27,5 ha

Penyebab terjadinya daerah rawan banjir ini adalah karena tertutupnya *street inlet* oleh beberapa aktivitas, sehingga air hujan tidak bisa masuk ke dalam saluran drainase, adanya pendangkalan di beberapa bagian saluran serta konstruksi drainase yang tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

### 3. Sampah ✓

Masalah persampahan di Kota Bandung adalah tingginya produksi sampah yang berasal dari permukiman penduduk, pasar, pusat perdagangan dan industri, dan pada sisi lain tingginya produksi sampah ini belum dapat diimbangi sepenuhnya oleh prasarana dan sarana yang dimiliki oleh PD Kebersihan Kota Bandung. Kegiatan pengumpulan dan pengangkutan sampah dari sumber sampah/permukiman hingga TPS menjadi tanggung jawab masyarakat yang dikoordinasikan oleh RT/RW, LKMD atau LSM secara swadaya dan swakelola, sedangkan pengolahan sampah dari TPS ke TPA dilaksanakan oleh PD Kebersihan.

Tempat penampungan sampah sementara (TPS) yang digunakan di Kota Bandung pada saat ini berjumlah 202 buah, dengan perincian 68 TPS berada di Bandung Barat, 69 di Bandung Tengah, dan 65 di Bandung Timur. Volume sampah yang dapat diangkut pada tahun 2001 adalah 887.990 m<sup>3</sup>.

Tempat pembuangan akhir (TPA) sampah milik PD Kebersihan pada saat ini terdapat di enam lokasi, yaitu TPA Pasir Impun, Leuwi Gajah, Cicabe, Cieunteung dan Jelekong dan Sarimukti Cipatat. Cieunteung dan Cicabe telah ditutup, sedangkan TPA Leuwi Gajah dan Jelekong masih digunakan. TPA Leuwi Gajah yang mempunyai kapasitas  $3.187.409 \text{ m}^3$ , menggunakan sistem *Open Dumping*, sedangkan TPA Jelekong dengan kapasitas  $650.490 \text{ m}^3$  menggunakan sistem *Control Landfill*. TPA Sarimukti merupakan TPA terbaru yang digunakan Kota Bandung untuk pengelolaan sampahnya

#### 4. Air Minum/Air Bersih ✓

Untuk Kota Bandung sendiri terdapat dua buah sumber air bersih, yaitu sungai (air permukaan) dan artesis (air tanah dalam) berdasarkan data tahun 2000, kapasitas produksi PDAM rata-rata 2.200 liter/detik dengan presentase kehilangan air jernih rata-rata per tahun 47% (berdasarkan pembayaran air pelanggan pada tiap bulannya). Untuk air permukaan diperoleh dari aliran Sungai Cikapundung dengan debit air baku 600 liter/detik dan Sungai Cikapundung (Siliwangi) dengan debit air baku 200 liter/detik, dan Sungai Cibeureum sekitar 40 liter/detik. Selain itu terdapat pula sumber air bersih yang dapat dimanfaatkan oleh Penduduk Kota Bandung yaitu mata air. PDAM menggunakan 10 buah mata air utama yang terletak di daerah Ledeng. Debit air yang mengalir dari mata air sebagian dialirkan ke reservoir XI dan sebagian lagi langsung didistribusikan kepada konsumen. Untuk sumur bor, PDAM menggunakan 19 buah sumur bor produksi yang dipompakan ke reservoir IX dan X serta sumur bor lokal. Jumlah pelanggan air bersih di Kota Bandung hingga tahun 2000 sebanyak 144.309 sambungan langsung dengan cakupan pelayanan sekitar 53%.

## 5. Telekomunikasi ✓

Media Telekomunikasi yang umumnya digunakan di Kota Bandung adalah telepon, telex, dan faksimili, di mana segala pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana telekomunikasi tersebut baik dari segi kualitas maupun jumlah sambungannya, harus disediakan oleh PT TELKOM yang merupakan salah satu badan usaha milik negara yang bergerak dalam pelayanan jasa telekomunikasi. Selain itu PT Telkom juga memberikan pelayanan berupa pelayanan pengaduan gangguan, pengaduan tagihan, pemasangan baru dan jasa telekomunikasi lainnya seperti mutasi telepon, balik nama, fax, SLI dan *hunting* dengan pelayanan Service Point.

Pelayanan telekomunikasi di Kota Bandung sudah cukup merata hingga ke seluruh kota, khususnya telekomunikasi telepon, telegram dan fax. Selain itu pelayanan telekomunikasi inipun didukung dengan telah meratanya fasilitas kios-kios telekomunikasi serta box-box telepon umum di seluruh penjuru kota dan keterhubungannya dengan jaringan telepon selular dan internasional. Penggunaan telepon selular di Kota Bandung juga menunjukkan peningkatan yang signifikan dari waktu ke waktu seiring dengan kebutuhan komunikasi masyarakat yang cepat. Selanjutnya dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat juga telah tumbuh jasa-jasa telekomunikasi lainnya seperti warung *internet* (warnet). Jasa ini tumbuh tentunya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi global, walaupun sudah banyak masyarakat yang memasang *internet* secara pribadi.

Distribusi pelayanan yang diberikan PT Telkom di Bandung dalam Sistem Sambungan Telepon (SST) pada tahun 2003 berkapasitas 498.044 SST, dimana 15.000 SST disediakan oleh badan lain yang bekerjasama dengan PT Telkom. Dari kapasitas yang tersedia terdapat 407.959 SST yang telah berfungsi dan dari jumlah tersebut 392.838 SST telah digunakan (tersambung). Dari jumlah yang tersambung tersebut 389.900 SST digunakan untuk pelayanan umum, yang meliputi 16.456 SST untuk telepon umum, dan 373.444 SST untuk pemesanan, yang terdiri atas bisnis, perumahan dan sosial.

#### 6. Jaringan Listrik

Pelayanan kebutuhan listrik di Kota Bandung saat ini sebagian besar sudah dapat dilayani, dimana pola jaringan listrik yang ada sebagian besar mengikuti pola jaringan jalan dan berupa sistem jaringan udara. Untuk Kota Bandung seluruh wilayahnya sudah terlayani dengan aliran listrik. Walaupun demikian permintaan untuk pembukaan sambungan baru dan peningkatan kapasitas senantiasa meningkat sebagai akibat dibukanya kawasan baru dan peningkatan kegiatan industri/ perdagangan. Sumber listrik yang melayani Kota Bandung dan sekitarnya berasal dari Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), yaitu PLTA Saguling (S. Citarum), PLTA Cikalong, PLTA Lamajang, PLTA Pangalengan (S. Cisangkuy), dan PLTA Bengkok (S. Cikapundung). Sedangkan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) berasal dari Kamojang. Selain itu terdapat pula Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang berada di dalam kota, yaitu di Cigereleng, Kiaracondong, dan Cibabat.

#### 7. Jaringan Gas

Untuk memenuhi kebutuhan akan gas khususnya untuk keperluan masyarakat, Kota Bandung memiliki fasilitas jaringan gas kota untuk



melayani penduduk. Gas ini disalurkan melalui jaringan pipa tertutup ke penjurong kota yang hingga kini daerah pelayanannya masih sangat terbatas. Jaringan pipa yang ada sekarang merupakan peninggalan dari jaman Belanda dan umurnya sudah sangat tua dan diperlukan peremajaan. Pendistribusian gas kota ini dikelola oleh Perum Gas Negara (PGN), hingga saat ini produksi gas dari tahun ke tahun relatif konstan bahkan ada kecenderungan menurun. Produksi PGN ini sangat sulit untuk berkembang mengingat pipa jaringan distribusinya sangat terbatas dan gas jenis ini juga penawarannya kalah bersaing dengan gas tabung yang relatif lebih murah dan praktis dan tersedia di mana-mana. Sehingga penyaluran gas melalui jaringan pipa ini sulit untuk terus dilanjutkan. PGN masih dapat mengembangkan produksi gasnya dengan menggunakan tabung gas seperti yang sekarang dilakukan, tentunya bersaing ketat dengan perusahaan-perusahaan yang melakukan usaha yang sama yang sekarang ada di Kota Bandung.

✓ Selain itu, berdasarkan hasil FGD yang dilakukan dengan hampir seluruh SKPD yang ada di Kota Bandung diperoleh data berkenaan dengan kondisi objektif berikut dengan permasalahan infrastruktur dan penataan Kota Bandung pada saat ini dalam point berikut:

1. Adanya keterkaitan dengan permasalahan berkenaan dengan pengendalian bidang kawasan terbangun (*built up area*).
2. Adanya masalah kurang memadainya komposisi berkenaan dengan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kota Bandung saat ini.
3. Semakin kompleksnya permasalahan mengenai penanganan sampah saat ini di Kota Bandung.
4. Semakin mendesaknya penanganan permasalahan pusat primer gedebage dalam waktu dekat.

5. Gejala semakin tingginya berbagai jenis pencemaran pada lingkungan kehidupan Kota Bandung.
6. Masalah pengendalian lingkungan kota yang belum konsisten dengan seharusnya.
7. Semakin kompleksnya permasalahan transportasi berkenaan dengan sistem jaringan jalan berikut dengan sarana dan prasarana yang ada di Kota Bandung saat ini.

#### D. KONDISI SOSIAL BUDAYA ✓

✓ Kondisi sosial budaya Kota Bandung dicirikan dengan perubahan sosial budaya yang demikian cepat. Hal ini disebabkan oleh penambahan dan mobilitas penduduk yang memperlihatkan sebagai Kota Jasa. Kenyataan ini telah berimplikasi pada perubahan kehidupan sosial budaya penduduk Kota Bandung saat ini.

✓ Salah satu implikasi yang terasa semakin hari semakin kuat adalah persoalan perubahan budaya yang demikian cepat. Gejala ini dikenali dengan semakin terasa pergeseran *nilai dan norma budaya lokal* dan berganti dengan budaya kosmopolitan. Nilai budaya lokal diperlihatkan dengan indikator mulai asingnya penggunaan bahasa Sunda (khususnya di kalangan kaula muda), etika atau sopan santun dalam kehidupan bersama, dilanggarnya norma-norma kesusilaan, dan semakin ditinggalkannya jenis kesenian yang menjadi identitas masyarakat Bandung.

✓ Implikasi pergeseran budaya juga mengena kepada *ethos budaya*, yakni lebih mementingkan karakter individu tinimbang menampakkan karakter kolektif sebagai komunitas. Kenyataan ini menunjukkan semakin melemahnya sistem kepribadian masyarakat kota yang bersumber dari kepribadian Ki Sunda. Individualitas semakin terasa dengan makin mahalnnya partisipasi dalam kehidupan sosial. Demikian juga sikap kesetiakawanan sosial, khususnya individu atau kelompok sosial beruntung kepada kelompok penduduk yang

tidak beruntung tidak menunjukkan sebagaimana yang diharapkan. Menurunnya derajat ethos dapat ditunjukkan dengan wujud budaya berupa kelakuan dan hasil karya penduduk di Kota Bandung yang memperlihatkan semakin maraknya berbagai jenis hunian penduduk yang berskala besar (*real estate*) yang terasa memisahkan diri dengan hunian penduduk yang berkategori sedang dan miskin. Perbedaan wujud dan kelakuan ini menunjukkan jarak atau distansi sosial antarkelompok sosial yang mengancam integrasi sosial.

Jumlah penduduk Kota Bandung saat ini kurang lebih mencapai 2,5 juta jiwa. Secara umum penduduk Kota Bandung memiliki potensi sumber daya manusia tergolong potensial. Sebanyak 25,65% penduduk tergolong usia pelajar dan mahasiswa, yang tentunya akan menjadi sumber daya manusia yang unggul di kemudian hari. Selain itu juga pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, yang ditunjang oleh berbagai sektor jasa, fasilitas perdagangan dan sarana dan prasarana umum yang akan mewujudkan sistem sosial budaya Kota Bandung yang Bermartabat.

Sekalipun demikian, saat ini Kota Bandung juga masih menyisakan sejumlah 143.300 jiwa penduduk yang tergolong belum beruntung, diantara kelompok ini terbagi dalam: (a) kategori miskin 84.288 jiwa; (b) gelandangan 7.655 jiwa; (c) pengemis 3.949; (d) anak terlantar 4.336 jiwa; rawan bencana 2000 orang; dan sisanya kelompok lain. Sekalipun tidak terlalu besar, kenyataan kemiskinan di Kota Bandung dengan variasinya tidak bisa diabaikan dalam rencana pengentasan di masa depan.

✓ Berdasarkan hasil FGD yang dilakukan dengan hampir seluruh SKPD di ada di Kota Bandung, dapatlah diperoleh beberapa permasalahan kondisi sosial budaya Kota Bandung yang perlu mendapat perhatian di masa datang, yakni:

- a. Kuatnya perubahan sosial menjadikan permasalahan pergeseran nilai, khususnya dalam partisipasi sosial dan kesetiakawanan sosial semakin

nyata di Kota Bandung. Permasalahan kesetiakawanan terutama tertuju dari masyarakat beruntung kepada yang tidak beruntung.

- b. Semakin menguatnya budaya metropolitan akan melahirkan permasalahan budaya kosmopolitan yang mengganti dan mereform budaya lokal secara acak. Permasalahan ini diindikasikan semakin maraknya jenis kesenian modern yang meninggalkan kesenian tradisional.
- c. Bervariasinya kemunculan kelompok sosial baru berikut dengan *subcultur* yang menjadikan permasalahan kehidupan sosial budaya masyarakat Kota Bandung memasuki era kehidupan masyarakat plural. Hal ini secara langsung dan tidak langsung akan membawa implikasi pada semakin maraknya kriminalitas dan kejahatan yang akan terjadi di masa datang.
- d. Menurunnya kepribadian lokal seperti penggunaan kesenian, bahasa dan perilaku etika mengharuskan usaha merumuskan dan merevitalisasi nilai budaya lokal untuk menjadi bahan penanganan sosial budaya di Kota Bandung di masa depan.

#### E. VISI DAN MISI KOTA BANDUNG HINGGA TAHUN 2008 ✓

Visi Kota Bandung dalam jangka waktu tahun 2004-2008 adalah Kota Bandung sebagai Kota Jasa yang BERMARTABAT (Bersih, Makmur, Taat dan Bersahabat).

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan dalam lima tahun ke depan (2004-2008) yang bertumpu pada potensi sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta ditunjang dengan semangat kebersamaan, tanggungjawab yang optimal dan proporsional dari seluruh komponen kota, maka Misi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan sumber daya manusia yang handal dan religius, yang mencakup pendidikan, kesehatan dan moral keagamaan.

2. Mengembangkan perekonomian kota yang adil, yang mencakup peningkatan perekonomian kota yang tangguh; sehat dan berkeadilan dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha.
3. Mengembangkan sosial budaya kota yang ramah dan berkesadaran tinggi, serta berhati nurani, yang mencakup peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan ketenagakerjaan, meningkatkan kesejahteraan sosial, keluarga, pemuda dan olahraga serta kesetaraan gender.
4. Meningkatkan penataan kota, yang mencakup pemeliharaan serta peningkatan prasarana dan sarana kota agar sesuai dengan dinamika peningkatan kegiatan kota dengan tetap memperhatikan tata ruang kota dan daya dukung lingkungan kota.
5. Meningkatkan kinerja pemerintah kota secara profesional, efektif, efisien, akuntabel dan transparan, yang mencakup pemberdayaan aparatur pemerintah dan masyarakat.
6. Mengembangkan sistem keuangan kota, yang mencakup sistem pembiayaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, swasta dan masyarakat.

#### F. POTENSI, PELUANG, DAN ANCAMAN YANG DIHADAPI

##### 1. Potensi

Kaitannya dengan perumusan program penelitian dan pengembangan ke depan, maka mengetahui dan memahami berbagai potensi yang dimiliki oleh Kota Bandung adalah sangat penting. Pengertian potensi dalam hal ini adalah kemampuan, kekuatan, kesanggupan, dan daya yang dimiliki oleh Kota Bandung yang memungkinkan untuk dikembangkan, digali dan dijadikan sebagai sarana untuk membangun kota. Berikut ini beberapa potensi per bidang kajian yang dimiliki oleh Kota Bandung yang dapat dijadikan dasar alasan atau bahan pertimbangan dalam penyusunan RIPP.

**Tabel 2.9**  
**Potensi Kota Bandung Per Bidang Kajian**

No.	Bidang Kajian	Potensi
1.	Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kota Bandung dikenal sebagai kota dengan nuansa pendidikan, budaya, sosial, ekonomi, pusat industri, teknologi dan jasa yang telah banyak mencetak ahli dalam berbagai bidang termasuk tersedianya pemuka-pemuka agama dan agamawan, SDM dengan kemampuan tersebut merupakan potensi yang sangat besar bila dapat dimanfaatkan secara tepat dapat membantu mewujudkan Kota Bandung yang BERMARTABAT.</li> </ul>
2.	Perekonomian	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Bandung mengalami pertumbuhan tinggi, yaitu pada masa awal krisis (1998) LPE sebesar - 19,69%. Ini berarti bahwa kondisi perekonomian Kota Bandung tengah mengalami perbaikan dan peningkatan dalam semua sektor.</li> <li>Dari struktur ekonomi Kota Bandung, sektor tersier (jasa) merupakan sektor yang dominan dalam struktur ekonomi kota. Sektor tersier ini terdiri atas sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, lembaga keuangan, persewaan, jasa-jasa perusahaan serta jasa pemerintahan.</li> <li>Pertumbuhan ekonomi Kota Bandung yang cukup tinggi telah berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat kota. Hal ini ditunjukkan dengan makin meningkatnya rata-rata pendapatan per kapita masyarakat yaitu pada tahun 2000 sebesar Rp. 6.834.500,00 tahun 2001 sebesar Rp. 7.317.265,00 dan pada tahun 2002 sebesar Rp. 7.851.319,00.</li> </ul>
3.	Sosial Budaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>Faktor multietnik, kultur/budaya yang muncul sejalan dengan perkembangan kota, bila dikoordinasikan secara apresiatif serta akulturatif akan dapat membentuk suatu tatanan masyarakat Kota Bandung yang berwawasan luas dan dapat menjadi model dalam pembentukan masyarakat metropolitan;</li> <li>Dengan adanya dimensi dinamisasi, keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat dalam semua lini dan tingkatan pembangunan Kota Bandung, maka hal tersebut dapat menjadi kontribusi positif pendorong dalam pembangunan itu;</li> <li>Tingginya kreatifitas dan inovasi warga Kota Bandung untuk mendorong kemajuan pembangunan;</li> <li>Berkembangnya masyarakat madani yang menggali potensi agama sebagai bagian mendasar dari aspek kehidupan beragama dan bermasyarakat;</li> <li>Integrasi sosial multi dimensi yang terbentuk pada tatanan kehidupan bermasyarakat Kota Bandung menunjukkan bahwa integrasi sosial dapat mewujudkan kondisi-kondisi sesuai dengan harapan, dimana barometer integrasi sosial tersebut ditunjukkan dengan keamanan, ketertiban, ketentraman dan situasi yang relatif terkendali menyangkut hubungan SARA.</li> </ul>
4.	Penataan Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dalam perspektif sejarah, Kota Bandung merupakan kota</li> </ul>

		<p>peristirahatan yang telah berubah fungsi menjadi salah satu kota metropolitan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Berbagai prasarana dan sarana fisik kota telah dibangun mengikuti berbagai tuntutan perkembangan aktivitas kota. Bangunan-bangunan fisik tersebut, mulai dari prasarana dan sarana pelayanan pemerintahan, pendidikan, penelitian, perdagangan, lembaga keuangan sampai dengan sarana penunjang lainnya seperti saluran drainase kota, jalan-jalan kota, serta prasarana dan sarana persampahan.</li> <li>kondisi perkembangan fisik Kota Bandung saat ini belum menunjukkan keteraturan yang cukup menunjang pencapaian visi kota. Kepadatan penduduk yang tinggi yaitu sebesar 11.200 jiwa per km<sup>2</sup> pada tahun 2002 dianggap sebagai salah satu penyebab ketidak-sepadanan dalam pelayanan infrastruktur dan utilitas kota.</li> </ul>
5.	Pemerintahan Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keberadaan UU No. 22 tahun 1999 (sekarang diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004) dan UU No. 25 tahun 1999 (sekarang diganti dengan UU No. 33 Tahun 2004) merupakan potensi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik. Perubahan paradigma pembangunan yang lebih mendedepankan peran serta masyarakat akan menjadi pemicu pertumbuhan dan perkembangan pembangunan.</li> <li>Dari aspek kehidupan politik masyarakat, Kota Bandung telah menjadi barometer kehidupan politik nasional. Di Kota Bandung relatif tidak pernah terjadi gejolak yang berhubungan dengan masalah politik. Hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat dan peran Pemerintah Kota Bandung dalam mensosialisasikan dan menanamkan pemahaman perilaku politik yang kondusif.</li> </ul>
6.	Pendapatan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pendapatan pemerintah kota dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang cukup berarti, dan menjadi indikator peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat kota.</li> <li>Partisipasi masyarakat dan swasta dalam membantu pencapaian pendapatan tersebut telah tumbuh dan berkembang seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi kota, baik dalam bentuk swadaya masyarakat maupun kemitraan pemerintah dengan swasta.</li> </ul>

## 2. Peluang

Selanjutnya pengenalan dan pemahaman mengenai peluang-peluang yang dimiliki oleh Kota Bandung yang apabila disikapi dengan bijaksana memiliki dampak positif bagi upaya pengembangan Kota Bandung. Berikut ini beberapa peluang yang dimiliki oleh Kota Bandung yang dapat dijadikan dasar alasan atau bahan pertimbangan dalam penyusunan RIPP.

**Tabel 2.10**  
**Peluang Yang Dimiliki Kota Bandung**

No.	Peluang	Penjelasan
1.	Terbukanya Peluang Kota Untuk Investasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kota Bandung memiliki infrastruktur yang cukup lengkap. Hal ini ditunjukkan dengan keberadaan pusat-pusat pelayanan pendidikan, perdagangan, kesehatan, pemerintahan dan pelayanan sosial lainnya. Kondisi ini membuka peluang bagi pengembangan investasi.</li> </ul>
2.	Daerah Tujuan Wisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>Potensi kota yang bervariasi memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan sebagai produk wisata. Sejalan dengan meningkatnya aktivitas perdagangan dan jasa, kondisi ini diharapkan akan menjadi daya tarik bagi wisatawan domestik dan mancanegara. Dengan demikian terbuka peluang untuk mengembangkan Kota Bandung sebagai daerah tujuan wisata.</li> </ul>
3.	Pengembangan Kota Konferensi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Secara historis, Kota Bandung memiliki andil yang besar dalam penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika. Momentum ini dapat membangun kesan bahwa Bandung merupakan kota konferensi berskala Internasional. Kondisi ini sekaligus dapat dijadikan peluang untuk promosi penyelenggaraan konferensi sejenis.</li> </ul>
4.	Pengembangan <i>Sister City</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kerjasama antara Kota Bandung dengan sejumlah kota lain di negara-negara sahabat merupakan peluang yang dapat dikembangkan, baik dalam rangka membangun kerjasama pendidikan, pemuda, olah raga, sosial dan budaya, maupun kerjasama dalam bidang ekonomi. Model kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan aktivitas pertukaran informasi, teknologi, perdagangan dan jasa antar kota bersahabat.</li> </ul>
5.	Pemanfaatan Peran sebagai Ibu Kota Propinsi Jawa Barat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peran Kota Bandung sebagai ibu kota propinsi merupakan peluang yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur kota. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur kota ini tidak hanya dibebankan kepada pemerintah kota melainkan juga Pemerintah Propinsi Jawa Barat serta Pemerintah Pusat.</li> </ul>
6.	Pengembangan Perekonomian	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang didukung dengan kondusifitas dari berbagai aspek lingkungan, partisipasi masyarakat dan swasta dalam pembiayaan pembangunan kota merupakan peluang yang mendukung pembangunan. Demikian pula dengan makin meningkatnya bantuan keuangan dari pemerintah pusat dan propinsi akan menjadikan peluang pembiayaan dari sektor pemerintah.</li> </ul>
7.	Kota Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dikenalnya status Kota Bandung sebagai kota pendidikan maka diharapkan akan menjadi peluang pada pengembangan pembangunan berbasis intelektualitas, akademisi dan komunitas terdidik.</li> </ul>
8.	Kota Agamis	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masyarakat Bandung merupakan masyarakat dengan basis keyakinan dan kepatuhan beragama yang cukup kental. Hal</li> </ul>



		tersebut dapat dilihat dari keberadaan tempat-tempat ibadah, lembaga keagamaan dan aktivitas keagamaan yang terdapat di seluruh bagian kota, merupakan peluang untuk menjadikan agama sebagai bagian pengembangan Kota Bandung.
9.	Kota Cendekiawan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dengan keberadaan para cendekiawan, ilmuwan dan intelektual dari berbagai disiplin keilmuan yang berada di Kota Bandung, merupakan peluang melahirkan gagasan dan pemikiran bagi perkembangan dan kemajuan Kota Bandung bila dapat diwadahi secara profesional dan tepat.</li> </ul>

### 3. Kendala dan Tantangan

Selain harus memahami tentang potensi yang dimilikinya, dalam perumusan program penelitian dan pengembangan ke depan juga harus mengenali berbagai kendala dan tantangan yang kemungkinan akan menghambat apabila tidak ditangani dengan baik. Berikut ini beberapa kendala dan tantangan yang dimiliki oleh Kota Bandung yang dapat dijadikan dasar alasan atau bahan pertimbangan dalam penyusunan RIPP.

**Tabel 2.11**  
**Kendala dan Tantangan Kota Bandung**

No.	Kendala dan Tantangan	Penjelasan
1.	Rendahnya Daya Saing	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menghadapi era globalisasi dewasa ini, Kota Bandung memiliki keterbatasan baik yang menyangkut fisik kota maupun sumber daya manusia, peraturan dan perundangan serta birokrasi pemerintahan.</li> <li>Di bidang infrastruktur dan utilitas kota, saat ini terjadi ketidakseimbangan antara penyediaannya dengan dinamika aktivitas kota, sehingga tingkat pelayanannya menjadi tidak optimal.</li> <li>Dalam bidang Sumber Daya Manusia, perlu dipersiapkan tenaga-tenaga yang dapat berkompetisi dengan tenaga-tenaga kerja dari luar negeri.</li> <li>Demikian pula dengan aspek peraturan dan perundang-undangan serta birokrasi belum sepenuhnya mendukung daya tarik investasi.</li> </ul>
2.	Menurunnya Daya Dukung Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tuntutan dan dinamika perkembangan kota telah menyebabkan kurang terkendalinya pengembangan kawasan-kawasan terbangun, sehingga menurunkan daya dukung lingkungan. Hal ini yang membatasi kemampuan lingkungan dalam penyediaan kebutuhan prasarana dan sarana dasar bagi wilayah permukiman.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Berkurangnya potensi air baku baik dalam bentuk air bawah tanah maupun air permukaan pada kawasan lindung, serta pemanfaatan tanah yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang merupakan salah satu bentuk penurunan daya dukung lingkungan.</li> </ul>
3.	Terjadinya perubahan perilaku sosial dan tatanan nilai masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Salah satu yang menjadi faktor penghambat dalam pembangunan adalah terjadinya perubahan perilaku sosial pada masyarakat kota seiring dengan tumbuhnya Bandung menjadi Kota Metropolitan yang mendorong masuknya arus informasi dan kebebasan individu yang datang dari luar, sehingga mengakibatkan menipisnya rasa kesetiakawanan sosial pada masyarakat yang dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan sosial.</li> </ul>
4.	Keterbatasan Kemampuan Pemerintah Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kemampuan aparaturnya dalam menganalisis permasalahan yang terjadi dan akan berkembang di masyarakat merupakan tuntutan yang harus segera dipenuhi dalam rangka perwujudan pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>).</li> <li>Demikian pula dengan permasalahan birokrasi terutama dalam bidang pelayanan perijinan harus menjadi prioritas pemerintah kota.</li> <li>Hal lain yang menjadi kendala pembangunan adalah adanya keterbatasan pembiayaan, efisiensi dan efektivitas pengelolaan APBD Pemerintah Kota.</li> </ul>
5.	Masalah transportasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keterbatasan prasarana dan sarana transportasi serta kurang terkendalinya beberapa kegiatan perkotaan pada lokasi-lokasi tertentu merupakan penyebab utama masalah kemacetan lalu lintas di Kota Bandung.</li> <li>Kerusakan jalan, parkir di badan jalan serta Pedagang Kaki Lima (PKL), pasar tumpah dan rendahnya disiplin pengguna jalan adalah penyebab lainnya dari kemacetan lalu lintas.</li> </ul>
6.	Masalah Banjir	<ul style="list-style-type: none"> <li>Banjir merupakan salah satu kendala yang terjadi di Kota Bandung, karena topografinya yang berupa cekungan dan menurunnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berfungsi sebagai daerah resapan air.</li> </ul>

### BAB III

## TREND PERKEMBANGAN BEBERAPA INDIKATOR UTAMA KINERJA PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG HINGGA TAHUN 2013

Untuk dapat merumuskan isu-isu strategis yang diperkirakan berkembang di masa mendatang, selain perlu memahami kondisi riil saat ini dan arah kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya, juga perlu dilakukan *forecasting* atau peramalan dari data-data empirik yang ada. Hal ini dapat terkait dengan data jumlah penduduk, kepadatan penduduk, standar sarana dan prasarana yang harus disediakan, baik fasilitas sosial maupun fasilitas umum, misalnya fasilitas pendidikan, kesehatan, dan perkiraan permasalahan-permasalahan yang akan timbul atau tetap menjadi masalah di kemudian hari. Pada intinya data olahan dari data empirik ini akan dijadikan sebagai dasar untuk melakukan justifikasi terhadap penting tidaknya sebuah isu dinilai sebagai isu strategis.

Dari beberapa gambaran mengenai kondisi riil Kota Bandung sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, selanjutnya dapat dilihat tingkat kecenderungannya (*trend*) sehingga dapat diperkirakan fenomena dan kebutuhan riil Kota Bandung di masa mendatang melalui peramalan (*forecasting*). Kondisi Kota Bandung di masa mendatang ini selanjutnya juga akan digunakan untuk merumuskan isu-isu strategis di masa mendatang. Selain itu, dengan mengetahui kondisi riil Kota Bandung dan kondisinya di masa mendatang, selanjutnya dapat dianalisis "gap nya dimana" dan disinilah Kegiatan Kelitbangan Kota Bandung seharusnya berperan. Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, Kegiatan Penelitian dan Pengembangan seringkali tidak dijadikan dasar untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan/program pembangunan yang diharapkan mampu berperan dalam

pencapaian visi Kota Bandung yang juga berkontribusi pada kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Bandung.

Secara rinci mengenai perkiraan kondisi Kota Bandung di masa mendatang dirinci sebagai berikut:

#### A. JUMLAH PENDUDUK MASIH AKAN TERUS MENINGKAT

Secara umum, laju pertumbuhan penduduk Kota Bandung per tahun adalah 1,67%. Selanjutnya, dari hasil perhitungan ini dapat dilakukan peramalan atau *forecasting* mengenai jumlah penduduk dan tingkat kepadatan penduduk di tahun-tahun mendatang sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan perencanaan pembangunan, baik dalam hal pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana dasar maupun kemungkinan permasalahan yang muncul di kemudian hari. Dengan menggunakan rumus bunga berganda<sup>1</sup>, maka hasil perkiraan jumlah penduduk Kota Bandung untuk tahun 2005-2013 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Perkiraan Jumlah Penduduk Kota Bandung Tahun 2005-2013**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk						
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Bandung Kulon	133553	135783	138050	140356	142700	145083	147506
2	Babakan Ciparay	132814	135032	137287	139579	141910	144280	146690
3	Bojongloa Kaler	121731	123763	125830	127932	130068	132240	134449
4	Bojongloa Kidul	79880	81214	82570	83949	85351	86776	88226
5	Astanaanyar	75645	76908	78192	79498	80826	82176	83548
6	Regol	81236	82592	83972	85374	86800	88249	89723
7	Lengkong	77023	78310	79618	80947	82299	83673	85071
8	Bandung Kidul	46872	47655	48451	49260	50082	50919	51769
9	Margacinta	111672	113537	115433	117361	119321	121313	123339
10	Rancasari	67717	68848	69998	71167	72356	73564	74792
11	Cibiru	83392	84785	86201	87640	89104	90592	92105

<sup>1</sup>  $P_t = P_o (1+n)^t$ , keterangan :  $P_t$  = Jumlah penduduk pada tahun  $t$ ,  $P_o$  = Jumlah penduduk pada tahun dasar,  $n$  = laju pertumbuhan penduduk,  $t$  = tahun.

12	Ujungberung	80739	82087	83458	84851	86269	87709	89174
13	Arcamanik	65696	66794	67909	69043	70196	71368	72560
14	Cicadas	103634	105365	107125	108914	110733	112582	114462
15	Kiaracondong	131353	133547	135777	138044	140350	142693	145076
16	Batununggal	125536	127632	129764	131931	134134	136374	138652
17	Sumur Bandung	40263	40935	41619	42314	43020	43739	44469
18	Andir	105316	107075	108863	110681	112529	114408	116319
19	Cicendo	95217	96808	98424	100068	101739	103438	105165
20	Bandung Wetan	38623	39268	39924	40591	41269	41958	42658
21	Cibeunying Kidul	114405	116316	118259	120233	122241	124283	126358
22	Cibeunying Kaler	73527	74755	76003	77273	78563	79875	81209
23	Coblong	123829	125897	128000	130137	132311	134520	136767
24	Sukajadi	105116	106872	108656	110471	112316	114192	116098
25	Sukasari	80387	81729	83094	84481	85892	87327	88785
26	Cidadap	51181	52036	52905	53788	54686	55600	56528
Jumlah		2346357	2385541	2425380	2465883	2507064	2548932	2591499

Sumber : Hasil Analisis



Dari data perkiraan jumlah penduduk tersebut, Penduduk Kota Bandung dalam kurun Waktu 2007 - 2013 akan terjadi pertambahan jumlah penduduk sebanyak 321.590 jiwa. Dengan kondisi

tersebut maka kebutuhan penduduk akan semakin berkembang, pemerintah berkewajiban memfasilitasi pemenuhan kebutuhan masyarakat tersebut.

#### B. JUMLAH KELUARGA MISKIN AKAN MENGALAMI SEDIKIT PENURUNAN ✓

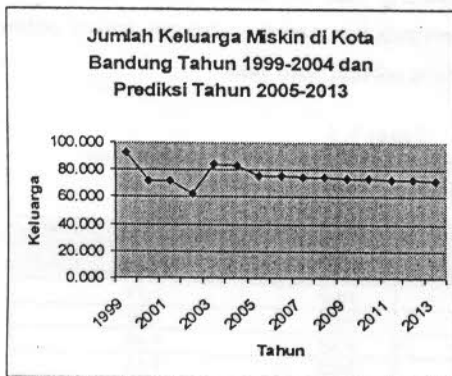
Jumlah penduduk miskin di Kota Bandung hingga saat ini masih relatif tinggi. Kemiskinan ini bukan hanya secara mutlak (*kemiskinan absolut*) tetapi juga kemiskinan relatif, yaitu berupa ketimpangan antar individu, ketimpangan antar desa dan kota, ketimpangan antar daerah, dan ketimpangan antar sektor. Dengan demikian, Kota Bandung di samping harus

mampu mengeliminasi berbagai kemiskinan dan ketimpangan yang ada, juga harus mampu memberikan kontribusi terhadap upaya pemecahan masalah kemiskinan dan ketimpangan nasional. Terlebih lagi, jumlah penduduk miskin di Kota Bandung saat ini masih relatif banyak, baik penduduk asli Kota Bandung maupun pendatang yang mengadu nasib di Kota Bandung. Salah satu indikator mengenai hal ini adalah masih banyaknya penduduk yang menerima BLT (Bantuan Langsung Tunai) dan maraknya pengemis dan gelandangan di Kota Bandung. Berikut jumlah keluarga miskin di Kota Bandung sebagai salah satu indikator ketimpangan mutlak yang ada:

**Tabel 3.2**  
**Jumlah Keluarga Miskin di Kota Bandung Tahun 1999 - 2004**  
**dan Prediksi Tahun 2005 - 2013**

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (KK)	Pertumbuhan (%)
1999	92.153	-
2000	71.684	-22.212
2001	71.684	0.000
2002	62.660	-12.589
2003	84.288	34.516
2004	82.914	-1.630
2005	75.823	-8.552
2006	75.326	-0.656
2007	74.828	-0.660
2008	74.331	-0.665
2009	73.834	-0.669
2010	73.336	-0.674
2011	72.839	-0.678
2012	72.342	-0.683
2013	71.844	-0.687

Sumber: LKPJ Walikota Bandung 2003-2005



Sebagaimana nampak pada tabel secara umum, pasca krisis ekonomi Tahun 1997-1998 jumlah keluarga miskin di Kota Bandung relatif tinggi, yaitu 92.153 KK pada Tahun 1999. Meskipun sejak 1999 mengalami penurunan, namun secara umum dari Tahun 2000 sampai dengan 2004 jumlah

penduduk miskin justru mengalami peningkatan.

Bahkan berdasarkan trend tahun 1999-2004 tersebut, jumlah keluarga miskin di Kota Bandung hingga Tahun 2013 tetap masih relatif tinggi, meskipun mengalami penurunan. Kondisi ini mengharuskan Pemerintah Daerah Kota Bandung berfikir secara keras untuk mencari jalan keluar dalam mengatasi kemiskinan ini.

### C. PERTUMBUHAN EKONOMI AKAN MENGALAMI PENINGKATAN YANG SIGNIFIKAN ✓

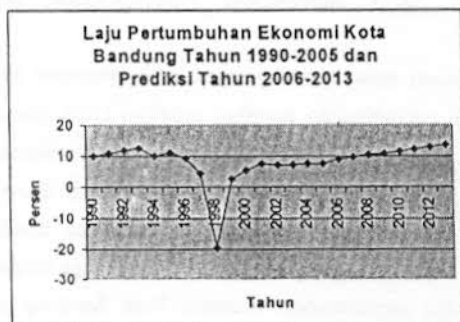
Laju pertumbuhan ekonomi Kota Bandung sejak krisis ekonomi 1997-1998 belum mampu menyamai pertumbuhan sewaktu sebelum krisis ekonomi terjadi, sebagaimana halnya laju pertumbuhan ekonomi nasional. Berbagai faktor mempengaruhi penciptaan iklim perekonomian di Kota Bandung khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Terlebih lagi Kota Bandung merupakan Ibu Kota Propinsi Jawa Barat yang merupakan penyangga terdekat Ibu Kota Jakarta. Walaupun laju pertumbuhan ekonomi Kota Bandung pun, meskipun saat ini sudah relatif tinggi dan stabil, namun sangat rentan terhadap kondisi perekonomian nasional. Selain itu, meskipun laju

pertumbuhan ekonomi Kota Bandung saat ini sudah relatif baik, namun kontribusi sektoral terhadap pertumbuhan tersebut (*share*) belum optimal dalam mendukung visi Kota Bandung sebagai Kota Jasa.

**Tabel 3.3**  
**Laju Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Harga Konstan**  
**di Kota Bandung Tahun 1990 - 2001**

Tahun	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	Tahun	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)
1990	10,01	2002	7,13
1991	10,77	2003	7,10
1992	11,81	2004	7,49
1993	12,52	2005	7,53
1994	9,94	2006	8,99
1995	11,27	2007	9,63
1996	9,31	2008	10,27
1997	4,47	2009	10,91
1998	-19,69	2010	11,55
1999	2,8	2011	12,19
2000	5,41	2012	12,83
2001	7,54	2013	13,46

Sumber: Kota Bandung Dalam Angka, beberapa edisi



Pertumbuhan ekonomi Kota Bandung sebelum krisis 1997-1998 secara umum selalu melebihi 9%, bahkan hingga 1993 melebihi 10%. Krisis ekonomi telah menurunkan laju pertumbuhan ekonomi menjadi 4,47% pada Tahun 1997 dan mencapai terendah -

19,69% pada Tahun 1998, lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi nasional yang pada tahun yang sama hanya -14%. Meskipun sejak Tahun 1999



perekonomi Kota Bandung sudah mulai bangkit kembali, namun belum mampu menyamai sebelum krisis.

Berdasarkan trend pertumbuhan ekonomi tahun-tahun sebelumnya, baru pada tahun 2010 pertumbuhan ekonomi Kota Bandung akan mampu menyamai pertumbuhan sebelum krisis. Sudah barang tentu untuk mencapai tingkat pertumbuhan tersebut perlu dukungan berbagai faktor yang digerakkan oleh kebijakan pemerintah Kota Bandung. Oleh karena itu, untuk merumuskan kebijakan-kebijakan tersebut, perlu terlebih dahulu dilakukan berbagai kajian yang akurat.

Beberapa faktor yang signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kota Bandung tersebut antara lain:

1. Kesempatan kerja yang hingga saat ini bahkan hingga tahun 2013 mendatang masih tetap akan menjadi permasalahan jika tidak dilakukan kebijakan perluasan kesempatan kerja ini.
2. Peran sektor jasa dalam struktur PDRB Kabupaten Bandung yang hingga saat ini masih sangat dominan. Sudah barang tentu, sesuai dengan visi Kota Bandung sebagai kota jasa, hal ini perlu dipertahankan, namun juga tetap memacu sektor lainnya secara seimbang;
3. Pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) dalam struktur PDRB merupakan salah satu komponen disamping konsumsi masyarakat, investasi swasta, dan ekspor bersih. Berkaitan dengan pengeluaran pemerintah ini, yang perlu diperhatikan adalah mengenai "pola alokasi" kepada berbagai sektor dan *target group* (masyarakat).
4. Investasi, juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Dalam hal ini yang perlu dipikirkan adalah, bagaimana kebijakan pemerintah untuk meningkatkan daya tarik investor agar mau menanamkan modalnya di Kota Bandung.

5. Sektor Usaha Kecil Menengah dan Sektor Informal. Pengalaman menunjukkan bahwa sektor-sektor ini mampu menjadi katup pengaman saat krisis ekonomi terjadi. Oleh karena itu, perlu pembinaan agar sektor-sektor ini mampu memberikan kontribusi yang optimal terhadap perekonomian Kota Bandung ke depan.

#### D. TINGKAT PENGANGGURAN RELATIF TETAP

Tingkat pengangguran nasional masih relatif tinggi, hal ini disebabkan oleh tidak seimbangnya antara jumlah usia kerja dengan jumlah kesempatan kerja. Kondisi ini juga dihadapi oleh Kota Bandung, dimana jumlah penduduk yang bekerja masih relatif rendah, atau dengan kata lain jumlah pengangguran masih relatif tinggi, baik pengangguran terbuka maupun setengah menganggur (*disguised unemployment*). Tanpa adanya kebijakan yang berani membuka peluang dunia usaha untuk menginvestasikan modalnya di Kota Bandung, serta memperbaiki kondisi birokrasi yang menghambat arus investasi, maka kesempatan kerja akan tetap rendah dan pengangguran akan tetap tinggi.

Sementara itu, kalau dilihat dari aspek produktivitas tenaga kerjanya, secara umum masih belum optimal. Rendahnya produktivitas secara umum dapat dipahami, karena masih adanya pengangguran terselubung (setengah menganggur). Oleh karena itu sektor-sektor dengan produktivitas tinggi masih memungkinkan untuk menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi, terutama dengan merelokasi tenaga kerja dari sektor yang sudah berlebihan tenaga kerjanya.

Berdasarkan daya serap tenaga kerja sektoral dan tingkat produktivitas kerjanya, maka diprediksikan beberapa sektor masih memberikan harapan terjadi peningkatan dalam penyerapan tenaga kerja dan peningkatan daya serapnya. Ini terutama untuk sektor perdagangan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, sektor perdagangan, hotel dan restoran. Tidak tertutup kemungkinan untuk sektor-sektor lainnya. Hal ini

tentunya jika suasana lebih kondusif tercipta, yang memberikan harapan kepada para investor akan keamanan investasinya. Disamping peran aktif pemerintah daerah dalam memberikan stimulus yang berkaitan dengan aturan dan kebijakan yang mampu merangsang para investor untuk nyaman dan aman dalam menanam modalnya di Kota Bandung khususnya.

**Tabel 3.4**  
**Jumlah Penduduk dan Jumlah Tenaga Kerja**  
**di Kota Bandung Tahun 1990 - 2001**

Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah Tenaga Kerja	Prosentase Jumlah TK Terhadap Penduduk (%)	Ratio Penduduk Terhadap Tenaga Kerja (Angka Ketergantungan)
1990	1.810.917	633,821	35.00	2.86
1991	1.824.399	607,525	33.30	3.00
1992	1.817.140	761,712	41.92	2.39
1993	1.819.336	765,416	42.07	2.38
1994	1.816.391	813,992	44.81	2.23
1995	1.809.964	604,887	33.42	2.99
1996	1.822.913	822,956	45.15	2.22
1997	2.435.328	847,104	34.78	2.87
1998	2.501.506	895,688	35.81	2.79
1999	2.543.476	968,994	38.10	2.62
2000	2.136.260	777,191	36.38	2.75
2001	2.146.360	826,620	38.51	2.60
2002	2.142.194	804,558	37.56	2.66
2003	2.228.267	823,375	36.95	2.71
2004	2.232.624	847,077	37.94	2.64
2005	2.269.909	842,980	37.14	2.69
2006	2.307.816	854,384	37.02	2.70
2007	2.346.357	864,318	36.84	2.71
2008	2.385.541	873,377	36.61	2.73
2009	2.425.380	883,428	36.42	2.75
2010	2.465.883	899,043	36.46	2.74
2011	2.507.064	895,884	35.73	2.80
2012	2.548.932	922,016	36.17	2.76
2013	2.591.499	940,201	36.28	2.76

Sumber: Kota Bandung Dalam Angka, diprediksikan



Selama 15 Tahun terakhir, laju pertumbuhan penduduk dan laju pertumbuhan tenaga kerja di Kota Bandung relatif sebanding, sehingga rasio antara jumlah tenaga kerja terhadap jumlah penduduk relatif tetap berkisar sekitar 33-45%

atau rasio penduduk terhadap tenaga kerja sebesar 2,2-3,0. Hal ini menunjukkan bahwa angka beban tanggungan tenaga kerja masih relatif tinggi, rata-rata setiap orang tenaga kerja harus menanggung 2,2 s.d. 3 orang penduduk. Hingga Tahun 2013, jika tidak ada kebijakan yang mampu meningkatkan kesempatan kerja atau menekan jumlah penduduk, maka kondisi ini masih tidak berubah. Bahkan trend perkembangan penduduk sedikit lebih tinggi dibandingkan trend perkembangan tenaga kerja.

#### E. PERAN SEKTOR JASA TETAP MENDOMINASI: LEBIH DARI 62% PDRB

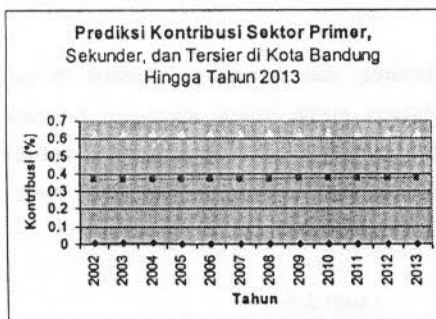
Hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa lembaga penelitian di Indonesia, makin seimbang struktur PDB suatu Negara maka makin stabil perekonomian Negara tersebut. Yang harus dicatat di sini bahwa keseimbangan struktur perekonomian bukan berarti kesamaan kontribusi sektoral, melainkan sektor-sektor yang ada mampu bergerak secara sinergis, dalam arti misalnya sektor pertanian mampu memenuhi kebutuhan konsumsi dan memberikan supply bahan baku terhadap sektor industri, sektor industri mampu menampung dan mengolah hasil sektor pertanian, sektor jasa mampu

memfasilitasi sektor-sektor lainnya, dan seterusnya. Kondisi di Indonesia, nampak bahwa kontribusi sektoral masih belum seimbang. Demikian juga kontribusi masing-masing sektor terhadap PDRB di Kota Bandung untuk saat ini maupun untuk masa mendatang masih menyandarkan diri pada sektor perdagangan, sektor jasa, dan sektor industri.

**Tabel 3.5**  
**Peran Sektor Primer, Sekunder dan Tersier Terhadap**  
**Perekonomian Kota Bandung Tahun 2002-2004 dan Prediksi**  
**Tahun 2005-2013**

Tahun	Sektor Primer		Sektor Sekunder		Sektor Tersier		Total	
	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%
2002	23,748	0.35	2,468,369	36.87	4,202,216	62.77	6,694,333	100
2003	23,860	0.33	2,650,843	36.95	4,499,154	62.72	7,173,857	100
2004	24,362	0.32	2,850,366	37.00	4,829,918	62.69	7,704,646	100
2005	24,604	0.30	2,996,422	37.04	5,069,027	62.66	8,090,054	100
2006	25,019	0.29	3,170,590	37.07	5,356,992	62.64	8,552,601	100
2007	25,319	0.28	3,321,177	37.10	5,604,496	62.61	8,950,993	100
2008	25,696	0.27	3,485,942	37.13	5,876,468	62.59	9,388,106	100
2009	26,021	0.27	3,640,434	37.16	6,130,792	62.58	9,797,248	100
2010	26,381	0.26	3,801,457	37.18	6,396,364	62.56	10,224,202	100
2011	26,718	0.25	3,957,972	37.20	6,654,188	62.55	10,638,877	100
2012	27,070	0.24	4,117,427	37.22	6,917,072	62.53	11,061,569	100
2013	27,412	0.24	4,274,893	37.24	7,176,534	62.52	11,478,839	100

Sumber: Kota Bandung Dalam Angka, dan hasil prediksi



Memperhatikan data di atas nampak bahwa peran sektor tersier sejak tahun 2002 telah mendominasi struktur PDRB Kota Bandung. Dengan kata lain, sebenarnya Kota Bandung sudah sejak beberapa lama menjadi

Kota Jasa. Jadi, perumusan visi Kota Bandung sebagai Kota Jasa sebenarnya telah terjadi, namun sudah barang tentu yang dimaksudkan adalah Kota Jasa dengan tingkat kesejahteraan ekonomi yang lebih tinggi. Secara lebih rinci struktur perekonomian (Struktur PDRB) Kota Bandung dapat dilihat pada tabel berikut:

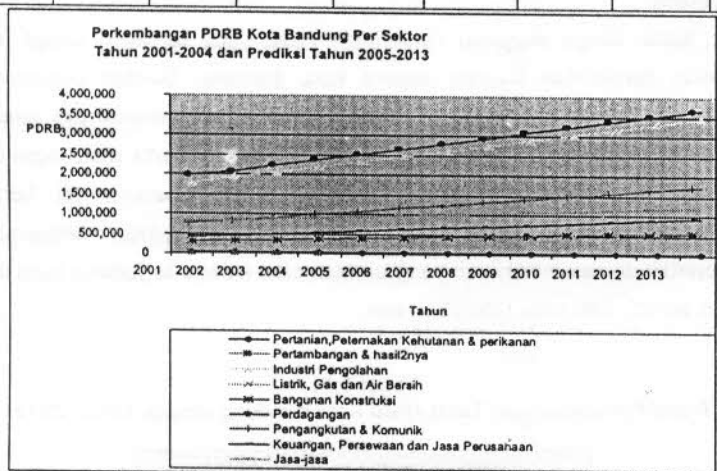
**Tabel 3.6**  
**Nilai Produk Domestik Regional Bruto Kota Bandung**  
**Atas Dasar Harga Konstan**

No	LAPANGAN USAHA	2001	2002	2003	2004
1	Pertanian, Peternakan Kehutanan & perikanan	24,181	23,747	23,861	24,363
2	Pertambangan & hasil2nya	-	-	-	-
3	Industri Pengolahan	1,756,275	1,921,987	2,050,570	2,186,545
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	199,612	221,624	253,824	292,034
5	Bangunan Konstruksi	308,693	324,758	346,449	371,787
6	Perdagangan	1,974,737	2,076,128	2,221,455	2,380,741
7	Pengangkutan & Komunikasi	761,053	833,591	902,441	999,609
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	419,585	444,373	495,271	538,500
9	Jasa-jasa	822,493	848,124	879,985	911,067
PDRB		6,266,629	6,694,332	7,173,856	7,704,646

Sumber: Kota Bandung Dalam Angka

**Tabel 3.7**  
**Prediksi Nilai Produk Domestik Regional Bruto Kota Bandung Per Sektor**  
**Atas Dasar Harga Konstan**

2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
24203	24511	24682	24756	24995.5	25118	25274.75	25455.75	25595.375
2333692.5	2465972	2607533	2747246	2884166	3024803	3163120	3301899	3441375.719
319140	354345	387003	418158.5	452090	483996.8	516540.3	549459.4	581684.5
390665	414179.5	436287.5	457483.8	480295	501947.1	523950.9	546182.6	568010.5
2504100	2656407	2797729	2935562	3082376	3221954	3364278	3507474	3648424.188
1070303	1153312	1237243	1314095	1397565	1477956	1558117	1640047	1720323.125
576343	623406.5	663942.5	706395.8	750195.5	791690.1	834816.6	877463.8	919774.375
939813	971284.5	1001199	1031307	1062000	1092011	1122412	1152764	1182970.25
8158259.5	8663417	9155618	9635004	10133683	10619476	11108509	11600745	12088158.03



**F. PENGELUARAN PEMERINTAH AKAN MENINGKAT TAJAM SEIRING DENGAN MAKIN TINGGINYA TUNTUTAN PELAYANAN, NAMUN PROPORSI BELANJA APARATUR LEBIH TINGGI DIBANDING BELANJA PUBLIK**

Isu strategis lain yang nampaknya cenderung akan makin menjadi perhatian pada masa yang akan datang adalah keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah. Oleh karena itu, berbagai kebijakan nasional digulirkan dalam rangka mengatasi keterbatasan anggaran pemerintah tersebut, seperti kebijakan yang diarahkan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan. Contoh konkritnya adalah beberapa sektor pembangunan mulai diserahkan kepada masyarakat, misalnya dengan melakukan perubahan status Perguruan Tinggi dan Rumah Sakit menjadi BHMN atau BUMN.

Bukan hanya anggaran Pemerintah Pusat yang terbatas, tetapi juga anggaran Pemerintah Daerah, seperti Kota Bandung. Sumber penerimaan pemerintah Daerah Kota Bandung dapat dikelompokkan menjadi tiga sumber utama yaitu pendapatan asli daerah; dana perimbangan serta sumbangan dan bantuan. Sedangkan pinjaman pemerintah daerah selama ini kurang dioptimalkan, dan sisa anggaran tahun lalu merupakan kemampuan pemerintah daerah melakukan penghematan atau karena terjadinya kelebihan target penerimaan pada tahun berjalan.

**Tabel 3.8.**  
**Trend Perkembangan Total APBD Kota Bandung Hingga Tahun 2013**

Tahun	Total APBD
1990	48.439.955
1991	63.829.311
1992	78.902.021
1993	93.764.005
1994	103.843.675
1995	116.844.006
1996	131.986.304
1997	160.726.960



1998	204.649.737
1999	304.721.861
2000	291.835.597
2001	759.557.958
2002*	902.793.029
2003	648.409.749
2004	731.778.339
2005	820.682.533
2006	914.150.115
2007	1.010.705.007
2008	1.107.354.183
2009	1.201.362.349
2010	1.289.111.538
2011	1.368.257.680
2012	1.436.803.762
2013	1.500.931.434

Sumber: Kota Bandung dalam Angka (beberapa edisi)



Secara total, APBD Kota Bandung dari sisi penerimaan secara umum terus mengalami peningkatan. Ini tentunya sejalan dengan tuntutan pembangunan yang terus meningkat, yang memerlukan

dukungan dana untuk mampu mendukung pembangunan tersebut. Selanjutnya dapat diinformasikan bahwa kontribusi masing-masing sumber penerimaan daerah Kota Bandung adalah cukup bervariasi. Penerimaan yang bersumber dari PAD, sebagaimana juga daerah lainnya belum cukup untuk menopang anggaran belanja rutin, padahal PAD ini merupakan bukti riil kemampuan daerah dalam membiayai pembangunannya secara mandiri.

APBD Kota Bandung sejak 10 Tahun terakhir mengalami peningkatan. Peningkatan yang sangat tajam terutama sejak Tahun 1999, namun

peningkatan tersebut lebih disebabkan oleh nilai tukar rupiah yang semakin melorot sejak krisis ekonomi Tahun 1997/1998.

Jika ditinjau dari sisi pengeluaran, belanja pemerintah dapat digolongkan menjadi dua kelompok utama yaitu belanja publik dan belanja aparatur (dulu pengeluaran rutin dan pembangunan). Isu nasional dan daerah terkait dengan pengeluaran atau belanja pemerintah ini adalah tidak efisiennya pengeluaran pemerintah. Selain itu, struktur pengeluaran pemerintah ini pun belum menunjukkan struktur yang optimal. Kondisi ini juga berlaku di Kota Bandung. Sebagai ilustrasi, semasa alokasi belanja dikategorikan ke dalam anggaran rutin dan pembangunan, anggaran rutin mendominasi belanja di Kota Bandung. Demikian juga saat ini, belanja aparatur masih jauh lebih tinggi dari pada belanja publik. Dengan komposisi seperti itu maka kegiatan pembangunan yang bersumber dari sektor pemerintah akan cukup kecil dampaknya bagi masyarakat. Dan ini tentunya akan terkait dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk kompensasi tersebut, maka pemerintah daerah harus mampu mendorong pertumbuhan investasi sektor swasta agar target pertumbuhan ekonomi bisa dicapai.

**Tabel 3.9.**  
**Belanja Rutin, Belanja Pembangunan, dan Total Belanja Pemerintah Kota Bandung Tahun 1990 - 2002 (dalam Ribu Rupiah)**

Tahun	Belanja Rutin	Belanja Pembangunan	Total Belanja	Rasio Belanja Rutin Terhadap Total Belanja
1990	26555337	21884618	48439955	0.55
1991	34243998	29585313	63829311	0.54
1992	42377307	36524714	78902021	0.54
1993	50032446	43731559	93764005	0.53
1994	59272951	44570724	103843675	0.57
1995	66936674	49907332	116844006	0.57
1996	78283828	53702476	131986304	0.59
1997	101550991	59175969	160726960	0.63
1998	144021330	60628407	204649737	0.70
1999	200472418	104249443	304721861	0.66

2000	209293945	82541652	291835597	0.72
2001	562268169	197289789	759557958	0.74
2002*	676065143	226727886	902793029	0.75
2003	475501012	169618745	640850681	0.74
2004	540324483	189002707	724891412	0.75
2005	609305084	209392378	813670624	0.75
2006	681609950	230684873	906376504	0.75
2007	755829695	252713325	1001551891	0.75
2008	830371861	274665909	1096856414	0.76
2009	902533228	296170402	1189225503	0.76
2010	969717346	316376886	1275216049	0.76
2011	1030346054	334591363	1352500005	0.76
2012	1084406108	348774301	1419709368	0.76
2013	1131866592	365531053	1484084855	0.76

Sumber: Kota Bandung Dalam Angka, beberapa edisi

Rasio belanja rutin terhadap APBD (Total Belanja) sebagaimana nampak pada tabel secara umum terus mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa



belanja untuk pemeliharaan kondisi yang ada terus mengalami peningkatan, sementara itu belanja untuk peningkatan kapasitas pembangunan secara relatif mengalami penurunan.

Sebagai implikasi dari trend perkembangan beberapa indikator utama pembangunan Kota Bandung tersebut, maka di masa depan diperkirakan akan terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Tingkat pengangguran diramalkan akan tetap tinggi.
2. Bandung Sehat 2007 diperkirakan tidak akan tercapai untuk seluruh itemnya, sehingga isu ini akan tetap ada di masa mendatang.

3. Permasalahan ketidakseimbangan komposisi kawasan terbangun (*built up area*) dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) tidak seimbang
4. Ketidakkonsistenan pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah sehingga diperkirakan akan tetap menjadi permasalahan di masa mendatang.
5. Perkembangan Kota Bandung sebagai pusat jasa perdagangan diperkirakan akan berdampak pada permasalahan transportasi, persampahan dan pencemaran di Kota Bandung.
6. Kebutuhan pengembangan pusat primer gedebage menjadi lebih kongkret.
7. Karena pertumbuhan penduduk diperkirakan pesat, maka permasalahan penyediaan infrastruktur akan lebih tinggi.
8. Berkembangnya Kota Bandung sebagai kota jasa memerlukan beberapa penanganan lebih lanjut terkait dengan penyebaran kegiatan ekonomi di Kota Bandung.
9. Kebutuhan akan perlunya reformasi birokrasi diperkirakan akan tetap menjadi isu sentral dalam bidang ini, termasuk didalamnya terkait dengan pengelolaan keuangan daerah.

## BAB IV

### ISU-ISU STRATEGIS

Memperhatikan kondisi empirik kota Bandung saat ini, kebijakan yang telah dicanangkan hingga saat ini, serta trend perkembangan beberapa indikator utama kinerja pembangunan di Kota Bandung hingga Tahun 2013, maka dapat diidentifikasi beberapa isu strategis sebagai berikut:

#### A. ISU STRATEGIS BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA

Keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam suatu daerah dan dalam proses pembangunan merupakan suatu aspek yang sangat penting dan sangat determinan. Dengan SDM yang memiliki kualifikasi baik akan dapat mendorong perwujudan tujuan pembangunan daerah secara lebih efektivitas dan efisiensi. Didasarkan pada kenyataan tersebut maka Sumber Daya Manusia (*human resource*) dalam konteks ini, didefinisikan sebagai orang yang siap, mau dan dapat berkontribusi terhadap pembangunan daerah.

Dengan perkembangan kehidupan manusia dan semakin meningkatnya tuntutan dan kebutuhan daerah maka kebutuhan akan SDM dalam suatu daerahpun akan mengalami perubahan dan pergeseran. Sejalan dengan adanya perubahan tersebut, peran dan fungsi SDM di suatu Daerah Otonom mengalami perluasan peranan dan fungsinya karena SDM menjadi semakin penting dan strategis bagi suatu organisasi.

Terlepas dari keberhasilan yang telah didapat dari pembangunan SDM di Kota Bandung, SDM Kota Bandung masih menghadapi permasalahan-permasalahan yang pada masa yang akan datang setahap demi setahap perlu dilakukan pembenahan. Permasalahan-permasalahan yang akan dijelaskan kemudian merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi juga merupakan suatu peluang yang harus dapat dimanfaatkan. Permasalahan-permasalahan

yang dianggap sebagai suatu isu-isu strategis Kota Bandung dalam Bidang Sumber Daya Manusia dapat dikemukakan, sebagai berikut :

*Pertama, isu kualitas SDM yang masih relatif kurang.* Penduduk Kota Bandung di dasar pada kondisi tahun 2004 seperti yang telah dijabarkan dalam Bab sebelumnya bahwa 26% tamat atau sedang menempuh SD, kemudian 31 % (25% telah menyelesaikan SMU dan 6% menyelesaikan SMK) namun demikian komposisi yang baru menyelesaikan SD dan SLTP masih cukup dominan yaitu mencapai 46%. Dengan demikian kualitas SDM masyarakat Kota Bandung rata-rata masih rendah. Rendahnya tingkat pendidikan SDM Kota Bandung terjadi karena berbagai persoalan yang masih menyelimutinya, persoalan-persoalan tersebut adalah : (a) masalah tingkat kesejahteraan masyarakat yang masih rendah sehingga prioritas pengeluaran masyarakat masih didominasi untuk pemenuhan kebutuhan pangan, kebutuhan pendidikan masih belum menjadi prioritas utama; (b) masalah kesadaran dan pola pikir akan pentingnya pendidikan belum cukup baik masih banyaknya orang tua yang belum memprioritaskan pendidikan; (c) masalah kondisi perekonomian yang belum cukup menggairahkan sehingga laju pertumbuhan lapangan kerja yang tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah angkatan/tenaga kerja sehingga menimbulkan masih banyaknya pengangguran akibatnya jaminan mendapatkan kerja setelah menyelesaikan jenjang pendidikan yang lebih tinggi tidak menjadi jaminan.

*Kedua, isu tentang kurangnya sarana dan prasarana bagi pengembangan kualitas SDM.* Pertumbuhan Sekolah-sekolah di Kota Bandung dari tahun 1999 sampai dengan 2004 menunjukkan kecenderungan penurunan kuantitas, hal tersebut menunjukkan terdapat sejumlah sekolah yang bubar atau digabungkan dengan sekolah yang lain. Secara kualitas pendidikan di Kota Bandung sangat bervariasi, terdapat sekolah-sekolah baik negeri maupun swasta yang berkualitas baik sehingga mampu meloloskan murid-muridnya ke

Perguruan tinggi negeri atau swasta yang favorit, namun banyak pula sekolah-sekolah yang kualitasnya sangat minim sehingga sulit bersaing untuk mendapatkan tempat di Perguruan tinggi ternama. Ketidakmerataan kualitas pendidikan Kota Bandung bisa disebabkan beberapa persoalan : (a) minimnya sarana dan sarana pendidikan, proses pendidikan diselenggarakan dalam kondisi sarana dan prasarana belajar dan mengajar yang tidak memadai sehingga proses belajar mengajar tidak optimal; (b) minimnya tenaga pendidik yang berkualitas serta tingkat kesejahteraan tenaga pendidik yang kurang memotivasi dan kurang menarik untuk bekerja secara optimal; (c) dukungan Pemerintah Daerah terhadap sektor pendidikan yang belum sepenuhnya optimal, anggaran untuk pendidikan belum mencapai 20%.

*Ketiga, isu keterhubungan (matching) antara sektor pendidikan dengan kebutuhan lapangan kerja.* Dalam konteks pendidikan kurikulum yang diajarkan belum sepenuhnya dibutuhkan lapangan kerja. Orientasi kompetensi yang dilahirkan dunia pendidikan cenderung generalis tidak nyambung dengan kebutuhan dunia kerja yang cenderung spesialis. Sekolah-sekolah SMK yang memberikan bekal keterampilan jumlahnya tidak banyak dan pola pikir masyarakat masih menempatkan SMK bukan pilihan utama. Kerjasama antara dunia pendidikan dengan dunia kerja masih belum terjalin secara baik sehingga menyulitkan dalam melaksanakan program praktek kerja.

*Keempat, isu komersialisasi pendidikan.* Komersialisasi pendidikan menjadi salah satu fenomena dunia pendidikan saat ini, akibatnya biaya pendidikan semakin mahal, masyarakat semakin tidak mampu menjangkau biaya pendidikan yang sedemikian mahalnya. Hanya masyarakat menengah ke atas-lah yang dapat menikmati pendidikan yang berkualitas, sedangkan masyarakat menengah ke bawah hanya mendapatkan pendidikan alakadarnya bahkan hanya sebagai penonton saja. Dengan adanya fenomena demikian, intervensi Pemerintah dibutuhkan agar masyarakat baik yang mampu atau

tidak, akan mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Pendidikan atau sekolah gratis yang dewasa ini mulai dikembangkan di beberapa daerah dapat menjadi inspirasi untuk diterapkan di Kota Bandung.

*Kelima, isu kesejahteraan tenaga pendidik.* Faktor Tenaga pendidik sebagai salah satu kunci keberhasilan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas menjadi salah satu perhatian dalam pembangunan pendidikan di Indonesia umumnya dan khususnya di Kota Bandung. Tenaga pendidik baik PNS, Honorer maupun Sukarelawan/wati yang memiliki tugas yang tidak jauh berbeda karena status kepegawaiannya yang berbeda berimplikasi kepada tingkat kesejahteraannya, karier dan kejelasan masa depan. Hal tersebut berpengaruh terhadap standar kualitas pendidikan yang ingin dicapai.

*Keenam, isu disparitas (perbedaan/kesenjangan) kelengkapan sarpras.* Sarana dan prasarana sekolah sebagai pendukung proses belajar mengajar di Kota Bandung sangat bervariasi, terdapat sekolah yang sangat lengkap baik sarana kelas, sarana olah raga dan bermain anak, namun banyak pula sekolah-sekolah yang ruang kelasnya belum memadai dan tidak memiliki sarana untuk olah raga dan bermain anak. Dengan perkembangan perkotaan yang begitu pesat, keberadaan beberapa sekolah sudah tidak lagi sesuai dengan situasi lingkungannya misalnya keberadaan sekolah di lingkungan kawasan perdagangan atau kawasan hiburan.

*Ketujuh, isu peduli pendidikan.* Pembangunan pendidikan merupakan kewajiban semua pihak bukan hanya pemerintah tetapi swasta dan masyarakat pun termasuk ikut berkewajiban pula. Partisipasi swasta dan masyarakat dalam pengembangan pendidikan, baik dalam penyediaan sarana prasarana, pembiayaan maupun dalam substansi pelajaran, pembentukan dewan pendidikan, komite sekolah merupakan salah satu upaya untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas pendidikan di kota Bandung. Bentuk partisipasi masyarakat dalam hal pembiayaan misalnya



dengan program anak asuh pada beberapa tahun lalu pernah ada seperti Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA) terus ditumbuhkembangkan.

*Kedelapan, isu SDM aparatur pemerintah.* Dalam konteks yang lebih spesifik SDM aparatur, baik secara kuantitas maupun kualitas membutuhkan kajian lebih lanjut. Apakah dengan jumlah pegawai Kota Bandung yang berjumlah 28.801 orang sudah sesuai dengan kebutuhan? apakah terlalu lebih atau terlalu kurang? Secara konseptual besaran organisasi pemerintah Kota Bandung perlu dilakukan reformasi, *right seizing* dengan mencari besaran yang ideal dibutuhkannya SDM Aparatur. Secara kualitas SDM aparatur juga perlu mendapatkan perhatian, kompetensi SDM Aparatur dalam mendukung dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Kota Bandung.

*Kesembilan, isu tentang rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat untuk membiayai kesehatan.* Tingkat kemampuan masyarakat dalam membiayai kesehatannya masih rendah, jaminan kesehatan melalui program-program saat ini dalam pelaksanaannya masyarakat miskin mendapatkan layanan kesehatan tidak optimal, untuk itu pengembangan asuransi kesehatan bagi seluruh penduduk sebagai jaminan perlu lebih dikembangkan, sehingga masyarakat menengah ke bawah mendapatkan layanan kesehatan yang baik.

*Kesepuluh, isu rendahnya kualitas kesehatan masyarakat.* Pola Hidup masyarakat yang tidak sehat, baik disebabkan oleh karena kebiasaan hidup tidak sehat seperti penggunaan jamban keluarga dan pembuangan air limbah yang sesuai standar kesehatan atau karena situasi dan kondisi seperti belum memperoleh pelayanan sarana air bersih yang ada sehingga potensi (vektor penyakit menular) penyebab angka kesakitan seperti diare dan kejadian luar biasa masih relatif tinggi;

*Kesebelas, isu merebaknya penyakit menular.* Berkembangnya tingkat kehidupan masyarakat mendorong terjadi perubahan gaya hidup masyarakat perkotaan dengan pola konsumsinya menimbulkan: 1) makin tingginya potensi

penyakit "degeneratif" seperti jantung coroner, darah tinggi dll; 2) Makin tingginya gejala *emerging diseases* (yang baru muncul) seperti HIV/AIDs, Flu Burung, kanker dll.

## B. ISU STRATEGIS BIDANG PEREKONOMIAN KOTA

Krisis ekonomi yang terjadi sejak pertengahan 1997, hingga saat ini nampak belum sembuh total. Beberapa indikator ekonomi makro yang dulu mencapai prestasi yang meyakinkan, kini belum dapat menyamai. Hal ini berlangsung bukan hanya pada tingkat nasional, melainkan juga di tingkat regional (Propinsi) dan juga lokal (kabupaten/kota). Kenyataan ini berdampak besar bagi semua masyarakat, terutama pada golongan ekonomi terbawah berupa krisis ekonomi yang ditandai dengan penurunan pertumbuhan ekonomi, penurunan kesempatan kerja (pertambahan jumlah pengangguran) akibat PHK besar-besaran di sektor swasta, inflasi yang tinggi, peningkatan jumlah penduduk miskin, dan lain-lain.

Sebagaimana daerah lainnya, perekonomian di Kota Bandung telah merasakan berbagai dampak krisis tersebut. Menurunnya laju pertumbuhan ekonomi, bertambahnya jumlah penduduk miskin, membesarnya jumlah pengangguran, dan permasalahan lain yang berlangsung dalam sektor perekonomian Kota Bandung. Dengan kata lain, Pemerintah Kota Bandung kini dihadapkan pada berbagai desakan tuntutan untuk segera merumuskan kembali strateginya guna menentukan langkah-langkah yang tepat guna menghadapi masa datang. Pemerintah Kota Bandung diharuskan untuk terus mengupayakan kemajuan ekonomi yang kuat dan meluas dimasa mendatang.

Keharusan ini didasarkan pada kecenderungan kondisi perekonomian Kota Bandung saat ini yang masih memperlihatkan banyak kesenjangan, antara lain: kesenjangan antar-sektor, kesenjangan antar-individu, dan antar-kelompok masyarakat, termasuk juga kesenjangan dalam kekuatan keuangan dan permodalan antara segolongan kecil pengusaha besar dan pejabat dengan

mayoritas rakyat. Bilamana kenyataan yang senjang tidak berhasil dikurangi, maka akan sulit bagi Pemerintah Kota Bandung untuk pemerintahan yang berciri tangguh dan kokoh dalam ekonomi lokal, khususnya dalam menghadapi persaingan nasional, dan regional yang semakin ketat.

Tuntutan dan keharusan orientasi pengembangan perekonomian Kota Bandung tersebut adalah sangat realistis, terlebih lagi jika dikaitkan dengan kebijakan pemerintah tentang otonomi daerah dengan lahirnya UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 33 Tahun 2004 yang berimplikasi terhadap berbagai kebijakan ekonomi di setiap tingkatan pemerintahan.

Dalam konteks ini, instrumen fiskal daerah serta instrumen lainnya yang secara yuridis formal merupakan kewenangan daerah (Kabupaten/Kota) dapat digunakan untuk menjadikan semua potensi dan kekuatan yang ada bergerak secara sinergis dan dinamis dalam memberdayakan ekonomi masyarakat di daerah. Selain itu, pemerintah daerah melalui berbagai instrumennya harus mampu menggiring semua sumber daya yang ada menuju pola produksi, alokasi dan distribusi yang lebih baik, sehingga pada gilirannya daerah lebih mandiri dalam kesejahteraan masyarakat yang lebih tinggi.

Berdasarkan argumentasi tersebut, maka otonomi daerah dalam konteks pembangunan ekonomi harus benar-benar diorientasikan pada optimalisasi kemaslahatan yang dapat diterima oleh masyarakat, baik manfaat tersebut dirasakan dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Jika otonomi daerah tidak dilaksanakan dengan pertimbangan tersebut, maka dapat ditafsirkan komitmen serta kesiapan daerah dalam melaksanakan otonomi tersebut bersifat rendah. Otonomi daerah bukan menimbulkan efek positif dalam pemberdayaan ekonomi daerah, melainkan justru mengancam kondisi perekonomian secara keseluruhan.

Dikaitkan dengan tuntutan akan kondisi perekonomian di masa yang akan datang, beberapa isu strategis yang dihadapi Kota Bandung dapat diidentifikasi antara lain sebagai berikut:

*Pertama, isu kemiskinan ekonomi di perkotaan.* Sebagaimana diuraikan pada Bab II dan diprediksikan pada Bab III, jumlah penduduk miskin di Kota Bandung hingga saat ini masih relatif tinggi, bahkan hingga Tahun 2013 mendatang. Kemiskinan ini bukan hanya secara mutlak (*kemiskinan absolut*) tetapi juga kemiskinan relatif, berupa ketimpangan antar-individu, ketimpangan antar-desa dan kota, ketimpangan antar-daerah, dan ketimpangan antar-sektor. Dengan demikian, Kota Bandung di samping harus mampu mengeliminasi berbagai kemiskinan dan ketimpangan yang ada, juga harus mampu memberikan kontribusi dalam memecahkan berbagai masalah kemiskinan dan ketimpangan nasional. Kenyataan jumlah penduduk yang berkategori miskin di Kota Bandung relatif masih banyak, baik penduduk asli Kota Bandung maupun pendatang. Indikator dari gejala kemiskinan adalah masih banyaknya penduduk yang menerima BLT (Bantuan Langsung Tunai) dan maraknya pengemis dan gelandangan di Kota Bandung.

*Kedua, isu meningkatnya jumlah pengangguran.* Pengangguran di Kota Bandung masih relatif tinggi bahkan hingga Tahun 2013 mendatang, baik pengangguran terbuka maupun setengah menganggur (*disguised unemployment*). Tanpa adanya kebijakan yang berani membuka peluang dunia usaha untuk menginvestasikan modalnya di Kota Bandung, serta memperbaiki kondisi birokrasi yang menghambat arus investasi, maka kesempatan kerja akan tetap rendah dan pengangguran akan tetap tinggi.

*Ketiga, isu merebaknya sektor ekonomi Informal.* Di Kota Bandung, sektor informal sangat merebak terutama PKL yang mangkal di pinggir-pinggir jalan, berkembangnya jasa perdagangan di berbagai kawasan yang bukan peruntukannya. Sudah barang tentu, pembinaan dan pengembangan sektor informal tidak selalu harus "penghilangan", karena pengalaman menunjukkan, sektor ini mampu menjadi katup pengaman tatkala krisis serta merebaknya pengangguran akibat PHK. Oleh karena itu, Pemerintah Kota harus mampu melakukan berbagai langkah kebijakan yang sangat arif untuk membina dan

mengembangkan sektor ini.

*Keempat, Isu masih lemahnya penanganan terhadap sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM).* Isu ini merupakan isu yang harus disikapi di Kota Bandung. Karakteristik sektor ini memang telah memperlihatkan perannya dalam menyerap tenaga kerja yang besar, karena itu sektor ini merupakan bagian terbesar dari seluruh usaha yang ada. Jumlah industri kecil dan industri menengah jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah industri besar. Demikian juga jumlah usaha perdagangan kecil dan menengah jauh lebih besar dibandingkan jumlah usaha perdagangan besar. Dengan kata lain secara kepemilikan, sektor usaha yang banyak dilakukan oleh masyarakat Kota Bandung adalah usaha kecil dan menengah.

Sementara itu, dilihat dari daya serapnya terhadap tenaga kerja, Sektor UKM merupakan penyerap tenaga kerja terbanyak dibandingkan usaha besar. Data tahun 1997 sampai dengan tahun 2004 menunjukkan bahwa Sektor UKM menyerap lebih dari 99% tenaga kerja dari keseluruhan tenaga kerja yang ada pada UKM dan Usaha Besar. Peran UKM dalam penyerapan tenaga kerja sangat besar, bahkan dari tahun ke tahun terus meningkat, terutama pasca krisis ekonomi. Dengan demikian, sangat beralasan jika dikatakan bahwa sektor UKM ini merupakan katup pengaman perekonomian ketika krisis ekonomi melanda Bangsa Indonesia.

Jauh dari itu, ternyata sebagian besar UKM yang bergerak pada sektor primer yaitu sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Lebih dari 50% Usaha Kecil bergerak pada sektor ini, dan sisanya bergerak pada sektor non tradisional yang meliputi sektor industri pengolahan, sektor listrik gas dan air bersih, sektor bangunan, sektor perdagangan hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, serta sektor keuangan persewaan, dan sektor jasa.

Di Kota Bandung sendiri usaha kecil, menengah dan besar merupakan pelaku usaha yang sangat dibutuhkan dalam menggerakkan roda perekonomian. Ketiga pelaku usaha tersebut akan saling sinergis (saling menguntungkan) jika ketiganya dapat bekerjasama satu sama lain dalam kerangka dan semangat maju bersama membangun perekonomian bangsa. Menurut catatan Dinas Koperasi Kota Bandung, jumlah UKM di Kota Bandung saat ini mencapai 70.000 meskipun data yang tersedia baru mencapai sekitar 3000 UKM.

Pada tahun 2004 jumlah industri besar, baik yang bersifat PMA/PMDN maupun non PMA/PMDN, terdapat tidak kurang dari 109 usaha besar dengan daya serap tenaga kerja kurang lebih 40.000 tenaga kerja. Sementara industri menengah, dengan jumlah unit usaha sebanyak 430 diperkirakan dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 53.776 orang. Adapun Industri kecil, baik formal maupun non formal dengan jumlah sekitar 10.500 unit usaha dapat menyerap kurang lebih 61.000 tenaga kerja.

Sementara dilihat dari jenis industri unggulan di wilayah Kota Bandung menurut data potensi Kabupaten/Kota Wilayah IV-2005, menunjukkan bahwa industri tekstil merupakan industri yang masih diunggulkan karena terdapat kurang lebih 1.247 unit usaha yang mampu menyerap tenaga kerja yakni mencapai 81.018 orang dengan biaya investasi sekitar Rp 736 juta. Setelah industri elektronik dan aneka serta industri logam, mesin dan alat angkut yang masih diperkirakan prospektif dengan kebutuhan investasi sebesar Rp. 379 milyar dan 357 milyar dengan total daya serap tenaga kerja tidak kurang dari 35.000 orang

*Kelima, Isu keseimbangan struktur ekonomi.* Hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa lembaga penelitian di Indonesia menyatakan, makin seimbang struktur PDB suatu Negara maka makin stabil perekonomian Negara tersebut. Harus dicatat, bahwa keseimbangan struktur perekonomian bukan berarti kesamaan kontribusi sektoral, melainkan sektor-sektor yang ada

mampu bergerak secara sinergis, dalam arti misalnya sektor pertanian mampu memenuhi kebutuhan konsumsi dan memberikan *supply* bahan baku terhadap sektor industri, sektor industri mampu menampung dan mengolah hasil sektor pertanian, sektor jasa mampu memfasilitasi sektor-sektor lainnya, dan seterusnya. Kondisi di Indonesia, nampak bahwa kontribusi sektoral masih belum seimbang. Demikian juga kontribusi masing-masing sektor terhadap PDRB di Kota Bandung untuk saat ini maupun untuk masa mendatang masih menyandarkan diri pada sektor perdagangan, sektor jasa, dan sektor industri.

*Keenam, Isu pengembangan daya tarik investasi.* Pengembangan investasi di Kota Bandung tidak lepas dari situasi perekonomian nasional, mengingat posisi geografis Kota Bandung yang berdekatan dengan pusat kekuasaan, maka harusnya situasi perekonomian nasional akan bisa cepat direspon. Sekalipun demikian, isu investasi berkaitan dengan kondisi lokal, terutama dalam kaitan dengan daya tarik investor. Berkaitan dengan hal tersebut, apabila Kota Bandung ingin menarik investasi yang ditujukan untuk membangkitkan perekonomian, maka pemerintah Kota Bandung harus berusaha menciptakan iklim yang kondusif bagi masuknya investasi tersebut. Dalam hal ini, situasi keamanan, politik, daya tarik faktor ekonomi (promosi potensi investasi) dan yang tak kalah pentingnya adalah kondisi birokrasi PEMDA harus mendapat perhatian dalam penciptaan iklim investasi.

*Ketujuh, Isu strategis lain yang nampaknya cenderung akan makin menjadi perhatian pada masa yang akan datang adalah keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah.* APBD Kota Bandung dari sisi penerimaan secara umum terus mengalami peningkatan. Ini tentunya sejalan dengan tuntutan pembangunan yang terus meningkat, yang memerlukan dukungan dana untuk mampu mendukung pembangunan tersebut. Selanjutnya dapat dilihat bahwa kontribusi masing-masing sumber penerimaan daerah Kota Bandung adalah cukup bervariasi. Penerimaan yang bersumber dari PAD, sebagaimana juga daerah lainnya belum cukup untuk menopang anggaran belanja rutin, padahal

PAD ini merupakan bukti riil kemampuan daerah dalam membiayai pembangunannya secara mandiri.

*Kedelapan, isu tentang efisiensi alokasi APBD; antara belanja aparatur dan belanja publik.* Pada saat alokasi belanja dikategorikan ke dalam anggaran rutin dan pembangunan, anggaran rutin mendominasi belanja di Kota Bandung. Demikian juga saat ini, belanja aparatur masih jauh lebih tinggi dari pada belanja publik. Dengan komposisi demikian, maka kegiatan pembangunan yang bersumber dari sektor pemerintah akan cukup kecil dampaknya bagi masyarakat. Hal ini tentunya akan terkait dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk kompensasi tersebut, maka pemerintah daerah harus mampu mendorong pertumbuhan investasi sektor swasta agar target pertumbuhan ekonomi bisa dicapai.

*Kesembilan, isu tentang efisiensi Perusahaan Daerah.* Kenyataan hingga saat ini Perusahaan Daerah Kota Bandung masih belum efisien, sehingga tidak dapat memberikan kontribusi optimal terhadap penerimaan daerah, bahkan beberapa diantaranya justru merugi. Banyak faktor yang menyebabkan tidak efisiensnya BUMD ini mulai dari kualitas SDM-nya, birokratisme di lingkungan BUMD, kurangnya inovasi, dan permasalahan lainnya.

*Kesepuluh, isu tentang kurang optimalnya penggalan PAD dan rendahnya fungsi pengaturan dari beberapa jenis sumber PAD yang ada sehingga menimbulkan kekurangtertiban kota.* Sumber PAD secara fungsional terbagi kedalam tiga kategori, yaitu yang berfungsi penerimaan, pelayanan publik, dan pengaturan. Sumber PAD yang berfungsi penerimaan dalam kenyataannya masih belum optimal digali. Kemudian sumber PAD yang berfungsi pelayanan publik, belum optimal dalam menunjang pelayanan terhadap masyarakat. Sementara itu, sumber PAD yang berfungsi pengaturan sering kali berubah fungsi menjadi fungsi penerimaan, sehingga terjadi ketidaktertiban kota.



### C. ISU STRATEGIS BIDANG SOSIAL BUDAYA

Dengan mencermati data mengenai kondisi objektif bidang sosial budaya di Kota Bandung dan memperhatikan berbagai pemikiran, kajian dan opini yang ada, maka arah rencana induk penelitian dan pengkajian ditujukan dalam dua gugus. *Pertama*, penguatan karakter dan kepribadian sistem sosial budaya pada akar nilai; dan *kedua*, pengembangan sistem sosial budaya dengan aktivitas dan partisipasi masyarakat Kota Bandung.

Untuk menjangkau sasaran tersebut, maka diperlukan kecermatan dan kemampuan menganalisis isu-isu penting yang muncul ke permukaan dalam bentuk wacana khalayak mengenai permasalahan kota Bandung. Dalam bidang sosial budaya, isu-isu strategis yang dapat digaris bawahi tersebut sebagai berikut:

*Pertama, isu pembumian nilai budaya lokal.* Isu ini banyak diutarakan oleh kaum cendikia Kota Bandung yang mengangkat kearifan budaya lokal menjadi landasan pembangunan dan penetapan karakteristik masyarakat Bandung sebagai kota jasa. Dalam rencana pembangunan daerah Kota Bandung sebagai kota jasa harus memperlihatkan citra kota yang bermartabat. Budaya lokal dijadikan pendekatan karena menyimpan berbagai nilai yang mengorientasikan pada kesejatian kepribadian kolektif dan menjadikan kearifan dapat didermakan oleh seluruh masyarakat Bandung, sehingga terbangun *character building* sebagai masyarakat Bandung adalah masyarakat kota jasa yang bermartabat.

*Kedua, isu peningkatan partisipasi sosial.* Isu ini berkaitan dengan kecenderungan umumnya kota-kota besar di Indonesia cenderung acuh tak acuh dengan pembangunan yang sedang dilaksanakan. Partisipasi sosial diwujudkan dengan dukungan sosial dalam penataan, pemeliharaan dan pemanfaatan kota jasa. Partisipasi dilakukan oleh sebagian penduduk kota Bandung telah memperlihatkan kesempatan berusaha, namun tidak memperlihatkan upaya ketertiban dan kebersihan lingkungan. Untuk itu, isu

partisipasi sosial menjadi bagian perhatian Pemerintah Kota Bandung saat ini dan ke depan hari.

Level kajian partisipasi sosial dapat dilakukan baik di tingkat keluarga. Ketetangaan ataupun kawasan hunian. Peningkatan partisipasi sosial dimaksudkan berlangsung secara horizontal ataupun vertikal, sehingga secara perlahan, karakter masyarakat Bandung sebagai kota jasa ditampilkan dalam bentuk terimplementasinya partisipasi sosial dalam berbagai level sosial seperti pada: bidang kebersihan, penataan lingkungan, sampai dengan rehabilitasi sosial.

*Ketiga, isu solusi kepedulian sosial.* Bandung sebagai kota yang menetapkan sebagai kota jasa utama, maka sektor pendidikan menjadi bagian di dalamnya. Dalam konteks perbedaan status sosial antar warga di Kota Bandung, Pemerintah Kabupaten harus dapat menjadi mediator untuk terjalinnya kemitraan yang dapat mengeliminir gejala kepincangan sosial, antara kaya dan miskin; berstatus tinggi dan rendah; yang dilakukan antarwarga. Program anak asuh; perhatian pada panti asuhan, panti jompo; bencana alam; dll adalah perwujudan kepedulian sosial.

Sumber nilai untuk terjalinnya solusi kepedulian sosial antar kelompok warga dalam kehidupan masyarakat kota jasa dapat dilakukan dengan pembumian nilai lokal yang mengarah pada saling memberdayakan. Konsep saling memberdayakan adalah dengan merevitalisasi nilai *silih asah* yang terkandung dalam kearifan budaya lokal. Arah dan tujuan saling pemberdayaan adalah tercapainya solusi perbedaan status dan peran dalam kehidupan sosial. Kongkritnya isu ini adalah isu terciptanya jalinan antar kelompok sosial yang berbeda status untuk saling mendukung dan memberdayakan.

*Keempat, isu kesetiakawanan sosial.* Berkembang pesatnya Kota Bandung dalam lima tahun belakangan harus diakui akan menggeser rasa kesetiakawanan sosial, baik antar-individu maupun antar-kelompok. Gejala

yang nampak adalah mulai menjalarnya individualisme yang telah mengikis kolektivitas sebagai kesatuan warga kota. Kondisi ini harus disikapi dengan menciptakan pendekatan dan strategi baru oleh Pemerintah Kota Bandung untuk menghidupkan kembali rasa kesetiakawanan sosial di Kota Bandung.

Landasan utama kesetiakawanan sosial dapat diambil dari sumber nilai sosial budaya masyarakat setempat, yakni dengan konsep *silih asih*. Pembumian konsep ini secara langsung maupun tidak langsung akan mendorong terwujudnya kerukunan dan keharmonisan hidup bersama antarwarga. Terlebih lagi konsep kesetiakawanan dikaitkan dengan upaya menjadikan Kota Bandung sebagai kota jasa utama di bidang pariwisata di kemudian hari.

*Kelima, isu pengendalian sosial.* Isu pengendalian sosial muncul dengan banyaknya permasalahan sosial di Kota Bandung. Besarnya angka kemiskinan, masih banyaknya pengangguran; kemanan, kejahatan, perjudian, minuman keras, peredaran obat terlarang, PSK, dll. Masalah pengendalian sosial bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah kota, melainkan juga bagian yang harus dilaksanakan oleh pihak masyarakat.

Mengingat kota Bandung sebagai kota jasa, yang salah satunya dicirikan dengan mobilitas sosial, maka permasalahan sosial budaya semakin meningkat di masa depan. Untuk itu Pemerintah Kota Bandung mengharuskan adanya model dan mekanisme pengendalian sosial yang sesuai dengan citranya sebagai kota jasa. Kajian pengendalian sosial dapat dilakukan dengan mengakuatkan kembali sistem nilai yang sudah ada yakni konsep *silih asuh*. Konsep ini bermakna terciptanya saling menjaga dari berbagai gangguan dan ancaman yang datang dari dalam maupun dari luar.

Level kajian dapat dilakukan dimulai dengan model pengendalian sosial di tingkat keluarga, ketetanggaaan maupun masyarakat luas. Konsep silih asuh harus mampu mengoperasikan upaya pengendalian sosial, baik yang dilakukan pemerintah Kota Bandung maupun masyarakatnya. Kepentingan pengendalian

sosial sangat urgen mengingat Pemerintah Kota Bandung tengah memantapkan diri sebagai kota Jasa utama bidang perdagangan di tingkat nasional.

*Keenam, isu penguatan karakter masyarakat kota bermartabat.* Isu ini berkaitan dengan isu sebelumnya, yang ditujukan untuk penguatan karakter masyarakat Kota Bandung sebagai masyarakat yang memiliki jati diri atau kepribadian kolektif. Setiap kota memang akan dihuni oleh berbagai etnis dan kultur yang berbeda. Namun Bandung sebagai kota yang didominasi masyarakat Sunda Parahyangan harus dapat mencitrakan ciri khas, baik dalam penggunaan bahasa, kebiasaan berpakaian, aneka makanan, kesenian, sampai dengan tempat hunian.

Sejak dahulu kepribadian masyarakat kota Bandung adalah masyarakat yang berkarakter terbuka, sopan, taat beribadat dan dapat mengendalikan dari kekacauan sosial. Karakter dominan ini akan diadaptasikan menjadi citra kota yang menebarkan kemaslahatan bagi para penghuni ataupun pengunjung.

Isu penguatan karakter antarwarga setempat maupun dengan luar warga Bandung menjadi krusial, terlebih dengan implikasi otonomi daerah yang mengkristalkan kesukuan. Kota Bandung akan tetap menjadi kota yang terbuka, nyaman, dan mengandung *spirit Bandung*. Kajian harus dilakukan secara komprehensif mengingat membangun karakter memperhitungkan banyak aspek. Bilamana isu tersebut dapat dilakukan niscaya karakter Kota Bandung sebagai kota yang berkarakter *silih wangi* dapat dicapai. Dengan kata lain, Bandung akan menebarkan citra dan karakternya sebagai kota *jasa ternama* di Indonesia.

*Ketujuh, isu ketahanan sosial.* Dari keseluruhan isu utama, maka pada akhirnya selain dapat mengembangkan potensi yang ada juga harus mampu mempertahankan prestasi sosial. Isu ketahanan sosial mengarah pada memantapkan sistem ketahanan sosial budaya masyarakat Bandung dalam mempertahankan prestasi yang dicapai.

Pentingnya isu ketahanan sosial budaya dilakukan dalam pengkajian mengingat kenyataan, tidak ada suatu masyarakat dimanapun adanya terus berubah. Sebagian harus ada yang bisa dipertahankan, terutama dalam menjaga nilai-nilai dasar, seperti nilai agama, nilai kerifan budaya, nilai kemanusiaan. Nilai-nilai tersebut yang menyelamatkan suatu masyarakat dari kegamangan yang diakibatkan perubahan yang terus bergulir, termasuk perubahan nilai budaya global. Dengan kata lain, kajian ketahanan sosial dipersiapkan dalam menghadapi persaingan global pada dasawarsa mendatang di tingkat regional.

#### D. ISU STRATEGIS BIDANG PENATAAN KOTA

Kota Bandung walaupun dalam Visi Pemerintah Kotanya sebagai Kota Jasa dalam kenyataannya Kota Bandung mengemban beberapa fungsi yang tentu saja pelaksanaan fungsinya membutuhkan daya dukung sarana dan prasarana perkotaan yang memadai. Fungsi-fungsi yang diemban Kota Bandung saat ini adalah :

1. Kota Bandung berfungsi sebagai pusat pemerintahan, Bandung sebagai Ibu Kota Propinsi Jawa Barat tentu saja menjadi tempat/pusat berjalannya roda pemerintahan Propinsi Jawa Barat. Dengan demikian kantor-kantor pemerintahan Propinsi Jawa Barat banyak bertempat di Kota Bandung.
2. Kota Bandung berfungsi sebagai Kota Pelajar, yaitu Kota Bandung menjadi tujuan bagi orang-orang dari luar Bandung datang ke Bandung untuk menimba ilmu pengetahuan dan tempat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Keberadaan Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Padjadajaran, Universitas Pendidikan Indonesia serta Universitas swasta ternama menjadi daya tarik untuk datang ke Bandung.

3. Kota Bandung berfungsi sebagai Kota perdagangan, banyaknya pusat-pusat perdagangan dan banyaknya outlet-outlet mengundang orang dari luar Bandung terutama Jakarta untuk berbelanja di Kota Bandung pada saat *weekend*. Dengan memiliki multi fungsi tersebut, sarana dan prasarana perkotaan harus mendukung. Namun saat ini kondisi sarana dan prasarana kota tidak mendukungnya akibatnya terjadi kemacetan, kesemrawutan kota tidak bisa dihindarkan.

Untuk bidang penataan kota, perumusan permasalahan dapat dilakukan dengan mengacu pada dokumen perencanaan yang ada baik dokumen Renstrada maupun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung 2013. Adapun tinjauan mengenai perumusan permasalahan di bidang penataan kota ini akan dilakukan pada beberapa aspek yaitu aspek struktur tata ruang, aspek transportasi, aspek prasarana kota dan aspek lingkungan. Berdasarkan hal itu, maka isu penataan kota yang berkembang di tengah masyarakat adalah:

*Pertama, isu penataan struktur tata ruang kota.* Isu ini bermula dari masalah struktur penataan yang masih memperlihatkan: (a) masih terpusatnya berbagai kegiatan di dalam Kota Bandung akibat penetapan lima fungsi kota (Bandung sebagai pusat Pemerintahan, Perdagangan, Pendidikan, Pariwisata/Budaya dan Pusat Industri). Meskipun fungsi pendidikan sudah diupayakan untuk dialihkan ke luar Kota Bandung (ke kawasan pendidikan Jatinangor, Kabupaten Bandung), namun permasalahan yang berkaitan dengan fungsi ini masih tetap tidak teratasi. Hal ini terutama diindikasikan dengan menjamurnya secara sporadis kegiatan-kegiatan pendidikan swasta di dalam Kota Bandung; (b) Pengembangan kawasan-kawasan pusat sekunder (Arcamanik, Sadang Serang, Setrasari, Turangga dan Kopo Kencana yang tidak berhasil dalam pelaksanaannya menghadapi kendala untuk dikembangkan ke kawasan Timur Bandung). Lebih lanjut ketidakberhasilan pengembangan pusat-pusat sekunder dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengembangan Setrasari Mall sebagai pusat sekunder WP Bojonagara tidak tercapai. Penyebab lumpuhnya pusat sekunder ini antara lain kurangnya akses jalan menuju Setrasari Mall, serta sulitnya mengikat penduduk sekitar dengan lokasi Setrasari Mall yang berada di perumahan menengah ke atas. Hal ini membuat penduduk lebih memilih pergi ke pusat kota atau kawasan perdagangan di Jl. Merdeka.
2. Tidak tercapainya fungsi Sadang Serang sebagai Pusat Sekunder WP Cibeunying. Perkembangan kegiatan di WP ini justru terjadi di Simpang Dago sebagai pusat perdagangan, yang melebar hingga sepanjang Jl. Ir. H. Juanda. Kegiatan di ruas jalan ini semakin ramai dengan munculnya *factory outlet* dan adanya aktivitas informal sepanjang jalan Dago pada setiap hari Sabtu dan Minggu malam.
3. Penetapan pusat WP Karees di Jl. Martanegara tidak berjalan semestinya, karena yang terjadi justru berkembangnya kegiatan di sekitar Jl. Gatot Subroto, dengan dibangunnya Bandung Supermall.
4. Pengembangan pembangunan sekunder Kopo Kencana di WP Tegallega belum optimal. Hal ini disebabkan antara lain karena pusat ini terletak di jalan yang berfungsi sebagai jalan arteri sekunder, sehingga lebih sulit diakses dibandingkan dengan pusat lokal lama yang masih bertahan, yaitu sekitar Astanaanyar. Adapun yang terjadi di pusat lokal lama ini adalah sudah terkonsentrasinya kegiatan yang sering menimbulkan kemacetan lalu lintas.
5. Pengembangan Pusat Sekunder Arcamanik di WP Ujungberung belum tercapai. Hal ini disebabkan antara lain oleh kurangnya akses jalan ke pusat tersebut, kurangnya fasilitas umum dan fasilitas sosial. Yang terjadi justru pergeseran pusat kegiatan ke sekitar Antapani.
6. Penetapan WP Gedebage sebagai kawasan jasa dan industri berkala regional belum dapat direalisasikan. Begitu pula dengan pembangunan sub pusat perdagangan primer Gedebage di Jl. Cipamokolan belum

terlaksana, sehingga pengalihan sebagian fungsi pusat kota ke arah Timur khususnya kawasan industri non polutan, jasa perkantoran, dan perdagangan belum tercapai.

7. Khusus pengembangan perkotaan ke arah Bandung Timur bagian tenggara (sekitar Gedebage) menghadapi kendala karena adanya lokasi genangan banjir dan banyak rawa.

*Kedua, isu penanganan transportasi.* Saat ini ini permasalahan penataan kota berkaitan dengan masalah transportasi yang didasarkan pada: (a) Pengembangan simpul terminal Kereta Api di Stasiun Kiara Condong, Cikudapateuh dan Stasiun Andir masih belum dapat berfungsi sebagai pengumpan untuk jaringan jalan raya; (b) hirarki jaringan jalan (arteri, kolektor dan lokal) dalam kenyataan tidak mengikuti hirarki jaringan jalan sebagaimana yang tercantum dalam RTRW terutama jalan arteri primer Soekarno Hatta yang sudah berubah fungsi menjadi jalan kolektor sekunder; dan (c) adanya kesenjangan pertumbuhan kendaraan yang mencapai lebih kurang 11% per tahun dengan pertumbuhan pertambahan jaringan jalan yang hanya lebih kurang 2% per tahun turut mempercepat kinerja lalu lintas Kota Bandung yang makin lama makin macet dan terakumulasi sepanjang tahun.

*Ketiga, isu penataan Sarana dan prasarana kota.* Isu ini didasarkan atas masalah: (a) terjadinya kesenjangan antara *supply* (penyediaan) prasarana oleh Pemerintah Daerah yang masih sangat kurang dibanding dengan demand (permintaan) masyarakat akan prasarana kota yang memadai dirasakan masih cukup besar; (b) *Level of Service* penyediaan prasarana kota antara yang direncanakan dalam RUTR Kota Bandung yang melayani rata-rata 80% penduduk kota dalam kenyataan mengalami penurunan hingga 70% yang antara lain diakibatkan oleh kendala pembiayaan, perencanaan, pengelolaan, kelembagaan kualitas prasarana dan aspek lokasi; dan (c) masalah prasarana



sosial, pendidikan, kesehatan, prasarana hiburan, taman kota kurang mendapat perhatian khusus dalam RUTR Bandung.

*Keempat, isu pemanfaatan ruang kota.* Isu ini berkaitan dengan masalah lingkungan yang ada di Kota Bandung, yakni: (a) masalah kawasan Bandung Utara yang mengalami perubahan fungsi, semula berfungsi sebagai kawasan lindung berubah menjadi kawasan permukiman; (b) masalah persampahan yang terutama menyangkut masalah tempat pembuangan akhir sampah Kawasan Pasir Impun di daerah Bandung Utara yang dekat dengan kawasan permukiman diperkirakan akan dapat menyebabkan konflik penggunaan ruang yang akan dapat menjadi permasalahan.

Dari keseluruhan isu pokok tersebut, dapatlah dirinci dalam bentuk isu strategis penataan kota menjadi sebagai berikut:

1. Masih terpusatnya kegiatan perkotaan di satu pusat yaitu Wilayah Bandung Barat, serta terdapat beberapa sub pusat (pusat sekunder) Kota Bandung yang belum berfungsi secara optimal.
2. Kurang cepatnya antisipasi perkembangan terutama yang disebabkan oleh tekanan ekonomi sehingga muncul berbagai persoalan perubahan pemanfaatan lahan yang pada akhirnya menurunkan kualitas lingkungan terutama pada lingkungan perumahan.
3. Terdesaknya bangunan-bangunan dan kawasan yang memiliki nilai sejarah oleh bangunan baru yang lebih memiliki nilai ekonomis.
4. Berkaitan dengan penetapan fungsi Kota Bandung sebagai Kota Jasa, untuk mendukung terciptanya visi Kota Bandung, fungsi sebagai kota jasa ini perlu lebih diarahkan.
5. Penggunaan ruang publik yang tidak sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dengan terjadinya beberapa kasus seperti penggunaan lapangan Tegallega, keberadaan sektor informal pada koridor-koridor jalan dan alih fungsi RTH.

6. Kualitas pelayanan publik yang belum optimal, meliputi kualitas pelayanan yang diberikan unit pelayanan satu atap, kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan masyarakat, kualitas kebersihan dan keindahan lingkungan kota dan masih terbatasnya kemampuan dalam menyediakan air bersih melalui PDAM.
7. Tingkat pelayanan (*level of service*) jalan yang rendah sehingga sering menimbulkan kemacetan, gangguan lalu lintas yang berasal dari kegiatan-kegiatan yang sering menggunakan badan jalan serta masalah yang berkaitan dengan sistem terminal dan penyediaan fasilitas jalan kaki.
8. Perlunya penanganan dan peningkatan kualitas lingkungan pada kawasan kumuh serta rendahnya kemampuan pemeliharaan dan pengendalian pemanfaatan ruang publik (taman, daerah milik jalan).

#### E. ISU STRATEGIS BIDANG PEMERINTAHAN KOTA

Bidang pemerintahan merupakan bidang yang sangat strategis bagi pelaksanaan pembangunan dalam suatu organisasi pemerintahan kota. Nilai strategis yang dimiliki oleh bidang ini disebabkan karena pemerintahan memiliki peran yang penting sebagai pendorong dan penggerak dalam pelaksanaan pembangunan yang harus mampu mensinergikan berbagai unsur yang ada dalam suatu komunitas masyarakat.

Dalam pengertian yang luas dalam sistem pemerintahan di Indonesia, pemerintahan sebenarnya meliputi unsur eksekutif, legislatif, dan lembaga-lembaga negara lainnya. Sedangkan dalam konteks pemerintahan daerah, pemerintahan meliputi unsur eksekutif dengan seluruh jajaran dan legislatif daerah. Pada konteks ini, pemerintahan daerah diartikan secara luas yang meliputi berbagai unsur eksekutif dan legislatif daerah di kota Bandung.

Dengan melihat peran pemerintahan dalam pembangunan kota Bandung, tentunya tidak bisa dilepaskan dari kondisi eksisting yang berkembang saat ini dengan memperhatikan berbagai kemungkinan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Hal ini terkait dengan perubahan jaman yang cenderung berlangsung cepat dan secara umum mempengaruhi terhadap daya kritis masyarakat sebagai dampak dari perkembangan global dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itulah maka, dalam bidang pemerintahan ini perlu dikembangkan berbagai program strategis yang diharapkan akan mampu mengatasi segala permasalahan yang muncul pada saat ini dan mampu mengantisipasi sekaligus menghadapi berbagai kemungkinan di masa depan.

Melihat kondisi yang ada saat ini dan perubahan yang cenderung berlangsung sangat cepat ini, maka beberapa hal yang perlu disikapi melalui bidang pemerintahan ini antara lain adalah dengan memperhatikan berbagai isu strategis yang berada pada lingkungan pemerintahan Kota Bandung. Dalam upaya mewujudkan visi Kota Bandung sebagai kota yang bermartabat dengan mengembangkan potensi daerah sebagai kota jasa, maka isu-isu strategis yang perlu disikapi secara baik antara lain adalah:

*Pertama, isu persaingan.* Untuk mensikapi isu persaingan ini, bidang pemerintahan di lingkungan Kota Bandung harus mampu mengembangkan segala potensi dirinya secara optimal dengan tidak mengabaikan keterbatasan yang ada sebagai langkah upaya antisipatif ke depan. Agar Kota Bandung dapat mengikuti arah persaingan ini secara efektif dan efisien, tentunya Kota Bandung harus mampu menunjukkan potensinya dengan berbagai faktor keunggulan yang dimilikinya. Di sisi lain, dalam melaksanakan pembangunan ini, tentunya tidak bisa diatasi sendiri tanpa melibatkan partisipasi dan kontribusi masyarakat secara efektif. Selain itu, *membangun kerjasama dan kemitraan* dengan para stakeholder juga menjadi faktor penting lainnya yang

harus diupayakan dalam rangka mengembangkan sistem pemerintahan di Kota Bandung. Karena selain Kota Bandung berpotensi sebagai sentra pembangunan sektor jasa sebagaimana visi yang ingin diwujudkan, juga karena posisi strategis sebagai Ibu Kota Propinsi, pada umumnya akan menjadi kota yang memiliki heterogenitas tinggi sebagai konsekuensi tujuan urban dari komunitas masyarakat di sekitarnya.

*Kedua, isu daya tarik investasi.* Terkait dengan isu persaingan di atas, hal lain yang perlu dikembangkan bahkan dapat dikatakan sebagai konsekuensi logis dari upaya untuk meningkatkan daya saing, maka aspek pemerintahan Kota Bandung juga harus mampu menjadi daya tarik investasi di daerahnya. Untuk itu, perlu dikembangkan berbagai aturan atau regulasi yang mampu menarik investor untuk turut mengembangkan investasi di Kota Bandung. Penyederhanaan birokrasi perijinan, kejelasan waktu dan biaya dengan persyaratan yang ringan dimungkinkan akan menjadi faktor-faktor strategis dalam menarik investasi. Untuk melihat tingkat daya saing yang ada saat ini, dapat dilakukan dengan cara melaksanakan proses evaluasi terhadap berbagai kebijakan khususnya untuk hal-hal yang terkait langsung dengan masalah perekonomian dan model investasinya di kota Bandung.

*Ketiga, isu Kemiskinan/disparitas sosial.* Masalah kemiskinan dan disparitas sosial juga dapat menjadi isu strategis yang perlu disikapi dan diatasi secara baik. Hal ini dikarenakan dari masalah ini akan memiliki pengaruh sosial yang sangat luas dan cukup mempengaruhi terhadap aspek-aspek lainnya. Apalagi masalah sosial ini sedang menjadi kecenderungan yang selalu muncul seiring dengan perkembangan kota. Oleh karena itulah, maka isu kemiskinan dan kesenjangan sosial ini menjadi faktor penting bahkan harus menjadi salah satu prioritas dalam penanganannya.

*Kelima, isu integrasi sosial.* Permasalahan yang seringkali muncul pada lingkungan perkotaan adalah masalah-masalah sosial yang kompleks.

Kompleksitas permasalahan ini perlu diatasi dengan mengembangkan pola integrasi sosial yang efektif agar mampu menyatukan berbagai kekuatan sosial menjadi suatu kekuatan yang efektif dalam mendorong pembangunan kota. Terjadinya eksklusivitas kelompok masyarakat akan menyebabkan terjadinya marginalisasi kelompok masyarakat lainnya. Faktor penyebabnya dapat dimungkinkan oleh masalah ekonomi, budaya, primordialisme, dan faktor-faktor lainnya yang memang berpotensi menyebabkan terpecahnya kelompok-kelompok sosial. Oleh karena itu, dalam hal ini langkah-langkah strategis dalam membangun integrasi sosial perlu untuk dirumuskan dan dikembangkan. Pembauran antar komunitas masyarakat menjadi sangat penting untuk dikembangkan secara terus menerus dengan tetap memperhatikan nilai-nilai lokal sebagai wujud jatidiri masyarakat Bandung.

*Keenam, isu pemberdayaan.* Isu pemberdayaan dalam konteks pemerintahan Kota Bandung merupakan isu penting lainnya yang perlu diperhatikan. Paradigma otonomi daerah yang sudah memberikan keluasaan kepada daerah untuk mengurus dan mengelola rumah tangganya sendiri akan lebih efektif apabila didukung dengan pola pemberdayaan yang baik. Pemberdayaan terhadap segala potensi dan sumber daya akan menjadi faktor menentukan bagi terciptanya pembangunan daerah yang komprehensif.

*Ketujuh, isu pengendalian mobilitas sosial dan bencana alam.* Hal lain yang seringkali menjadi isu di daerah perkotaan adalah masalah pengendalian mobilitas sosial. Masalah kependudukan, baik menyangkut pertumbuhan yang terjadi sebagai akibat dari meningkatnya angka kelahiran (fertilitas) maupun karena meningkatnya angka perpindahan penduduk (migrasi), selalu menjadi ciri tersendiri bagi daerah perkotaan. Oleh karena itu, sudah merupakan suatu tuntutan apabila pemerintahan kota harus mampu mengantisipasi sekaligus mengatasi masalah-masalah sosial yang diakibatkan oleh pertumbuhan penduduk di wilayahnya. Kompleksitas masalah kependudukan akan memiliki

dampak yang luas terhadap perkembangan dan pembangunan kota. Karena itu, sangat penting untuk mengembangkan sistem sosial yang di dalamnya menyangkut masalah kependudukan termasuk moda pergerakannya di wilayah perkotaan. Mengetahui dan memahami sistem sosial ini diharapkan akan menjadi salah satu modal bagi pengendalian sistem kependudukan di kota Bandung.

*Kedelapan, isu peningkatan Infrastruktur.* Perkembangan yang terjadi di daerah perkotaan, biasanya akan mempengaruhi pola pikir masyarakat kota menjadi lebih kritis dalam menghadapi berbagai persoalan di sekitarnya. Mensikapi kondisi seperti itu, penting bagi pemerintahan kota untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur kota, sehingga mampu mendukung terhadap pergerakan dan mobilitas penduduknya. Di samping itu, masalah yang berhubungan dengan pengelolaan limbah/sampah, juga harus menjadi salah satu perhatian yang utama oleh Kota Bandung. Tidak hanya menyangkut aspek administrasi dan manajemennya saja, melainkan juga menyangkut model atau bentuk infrastrukturnya yang relevan dan mampu menjawab permasalahan dalam jangka panjang. Untuk itu perlu dikembangkan model kerangka pembangunan infrastruktur, mulai dari kebutuhannya, perencanaannya, pemanfaatannya, sampai dengan kemampuan daya dukungnya di masa depan.

*Kesembilan, isu pemerataan kesejahteraan.* Peningkatan kesejahteraan penduduk merupakan salah tugas yang harus dijalankan oleh pemerintahan kota. Pembangunan dapat dikatakan berhasil apabila memiliki pengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakatnya. Berkurangnya disparitas, dan menyebarnya pelaksanaan pembangunan ke seluruh wilayah perkotaan dengan tetap memperhatikan aspek lingkungannya, merupakan indikator-indikator penting keberhasilan pembangunan.

*Kesepuluh, isu profesionalisme Aparatur/SDM.* Sumber daya manusia merupakan sumber daya penggerak pembangunan di wilayah perkotaan. Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas SDM aparatur dan kualitas masyarakat, telah menjadi isu strategis yang harus ditangani dengan baik oleh pemerintah. Profesionalisme aparat pemerintahan kota juga menjadi faktor penentu bagi keberhasilan pembangunan kota. Oleh karena itu, diperlukan adanya model-model pengembangan SDM aparat yang relevan dan tepat bagi terciptanya pembangunan kota yang efektif dan efisien.

*Kesebelas, isu kelembagaan Pemerintahan.* Isu lain yang tidak kalah pentingnya pada bidang pemerintahan ini adalah masalah kelembagaan pemerintahan kota. Masalah kelembagaan secara komprehensif akan menyangkut kepada berbagai aspek yang terkait dengan pengembangan sistem organisasi pemerintahan. Struktur kelembagaan, sistem dan tata laksana lembaga, serta mekanisme dan prosedur kerja lembaga sangat penting untuk dikaji secara optimal agar dapat diperoleh suatu informasi yang tepat dan akurat mengenai berbagai kebutuhan dan relevansi kelembagaan daerah dengan tuntutan kebutuhan yang sebenarnya. Terkait dengan masalah ini juga adalah mengenai mekanisme dan prosedur koordinasi yang efektif dalam pengelolaan pemerintahan daerah demi terlaksananya pembangunan kota secara optimal.

## BAB V

### ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM INDIKATIF KELITBANGAN KOTA BANDUNG

#### A. ARAH KEBIJAKAN KELITBANGAN

Kegiatan Penelitian dan Pengembangan dilakukan dengan 2 tujuan; *pertama*, adalah untuk menghasilkan penemuan baru (*new discoveries*) yaitu menemukan kebijakan, strategi atau teknik baru dalam melaksanakan pembangunan daerah; *kedua*, untuk "*revise and define new implementations of existing discoveries*" yaitu merevisi atau memperjelas pelaksanaan kebijakan, strategi dan atau teknik pelaksanaan pembangunan suatu daerah.

Di Kota Bandung sendiri, Kegiatan Penelitian dan Pengembangan (*Research and Development*) yang dilakukan, lebih banyak merupakan bentuk-bentuk penelitian aplikatif dan penelitian untuk kebijakan (*Policy Research*) baik yang bersifat evaluasi kebijakan (*Policy Evaluation*) maupun rekomendasi kebijakan (*Policy Recommendation*). Maksudnya adalah bahwa penelitian dilakukan untuk mengungkap fakta, kenyataan empiris atau permasalahan yang ada di lapangan yang kemudian dicarikan solusi, strategi atau teknik yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan ataupun untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan dari objek yang diteliti. Dalam penelitian aplikatif, seperti halnya *policy research*, penelitian dilakukan sampai tahapan aplikasi (*application*) dan pengembangan (*development*).

Mengingat selama ini Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Kota Bandung seolah berjalan sendiri-sendiri dan tidak terkoordinasi dengan baik, maka dipandang perlu untuk membuat suatu *guidance* atau pedoman bagi pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan. Pedoman ini hanya akan



mencakup kegiatan-kegiatan penelitian dan pengembangan yang bersifat makro strategis, bukan teknis, baik yang terkait dengan pembuatan kebijakan maupun evaluasi kebijakan.

Berdasarkan kondisi empirik yang ada saat ini dan kecenderungan perkembangan Kota Bandung ke depan serta isu-isu strategi yang muncul dan mungkin muncul di masa yang akan datang maka Arah kebijakan Kota Bandung ke depan adalah sebagai berikut:

1. Litbang Bidang Sumber Daya Manusia diarahkan kepada upaya untuk mendukung Peningkatan Kualitas SDM Kota Bandung yang mendukung terwujudnya Bandung sebagai Kota Jasa; Mendukung upaya reformasi kepegawaian di Pemerintah Kota Bandung; serta mendukung sinergitas pembangunan SDM Kota Bandung
2. Litbang Bidang ekonomi diarahkan kepada upaya untuk mendukung pemantapan perubahan struktur ekonomi masyarakat Kota Bandung dari sektor primer dan sekunder ke sektor tersier dalam konteks Bandung sebagai kota jasa di tingkat nasional dan regional.
3. Litbang Bidang Sosial budaya diarahkan kepada upaya untuk mendukung pengembangan dan pemantapan karakter masyarakat Bandung sebagai masyarakat kota jasa utama di tingkat nasional dan regional.
4. Litbang Bidang Penataan Kota diarahkan kepada upaya untuk mengembangkan dan memantapkan sistem penataan kota yang dibutuhkan masyarakat Kota Bandung dalam mencapai kota jasa utama di tingkat nasional dan regional.
5. Litbang Bidang Pemerintahan Kota diarahkan dalam upaya untuk mengembangkan dan memantapkan fungsi pemerintahan kota dalam wujud pemberdayaan dan pembangunan, pengaturan dan pelayanan kepada masyarakat Bandung sebagai masyarakat Kota jasa utama di tingkat nasional dan regional.

## B. PRIORITAS TEMA DAN TOPIK KAJIAN (PROGRAM/KEGIATAN INDIKATIF)

Dengan memperhatikan kondisi objektif dan isu strategis yang berkembang baik yang di tingkat lokal, nasional, regional dan global, maka diperlukan langkah antisipatif untuk merumuskan Kota Bandung masa depan.

Sebagaimana dipahami, Kota Bandung telah menentukan jalannya dengan kekuatan pada sektor jasa. Tepatnya Bandung adalah kota jasa. Dengan *trade mark* itu, Kota Bandung dalam sejarahnya telah, sedang dan akan berkompeten di bidang jasa yang sekaligus menjadi kekuatannya. Ada tiga fase yang akan dijalani, yakni: *Pertama*, fase perintisan kota Jasa yang berjalan sejak reformasi sampai tahun 2002; *kedua*, fase perkembangan kota jasa, yang terbagi dalam dua bagian, yakni fase perkembangan kota jasa awal dari tahun 2003-2008 dan perkembangan kota jasa lanjut dari tahun 2009-2013; dan *ketiga*, fase kematangan sebagai kota jasa yakni mulai tahun 2014 dan seterusnya.

Berdasarkan berbagai analisis, maka dapat diprediksi indikasi kebutuhan kajian Kota Bandung sebagai Kota Jasa di masa depan berdasarkan bidang kajian sebagaimana diuraikan dalam matrik, sebagai berikut:

### 1. Program Indikatif Sumber Daya Manusia

#### TERM I (2007-2008)

Isu Strategis	Program/Kegiatan/Tema Prioritas
<ul style="list-style-type: none"><li>• Bagaimana meningkatkan Sumber Daya Manusia (masyarakat dan aparatur pemerintah) agar dapat bersaing serta memiliki kompetensi yang direfleksikan dalam sikap, perilaku serta berkemampuan intelektualitas dan spiritualitas, sehingga terbentuk integritas yang didukung oleh pola disiplin yang baik dan amanah.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kajian Standarisasi Kesejahteraan Guru</li><li>• Pengkajian tingkat pemerataan pendidikan dalam upaya peningkatan Indeks Pembangunan di Kota Bandung.</li><li>• Kajian Efektivitas Pendidikan Luar Sekolah (PLS) dalam upaya menunjang program wajib belajar dasar 9 tahun di Kota Bandung</li><li>• Riset potensi dan keunggulan</li></ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagaimana memanfaatkan lembaga-lembaga pendidikan yang ada dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kota Bandung.</li> </ul>	<p>komprehensif masyarakat Kota Bandung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kajian pemberdayaan masyarakat dalam Bidang Pembiayaan Kesehatan Masyarakat</li> <li>• Uji Coba pelaksanaan JKPM Pra-bayar dalam wilayah terpilih</li> <li>• Operasionalisasi Sistem Kesehatan Kota Bandung.</li> <li>• Peran lembaga-lembaga dakwah dalam pembinaan kesadaran religius masyarakat Kota Bandung.</li> </ul>
--	--

## TERM II (2009-2013)

Isu Strategis	Program/Kegiatan/Tema Prioritas
Bagaimana meningkatkan keterkaitan/ Keterhubungan ( <i>matching</i> ) antara kompetensi yang dikembangkan di lembaga pendidikan dengan kebutuhan lapangan kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifikasi kompetensi yang dibutuhkan lapangan pekerjaan</li> <li>• Pengembangan strategi pemenuhan kebutuhan kompetensi yang dibutuhkan lapangan pekerjaan</li> <li>• Pengembangan kemitraan Sekolah dengan Perusahaan-perusahaan (Penyedia Lapangan Kerja)</li> <li>• Pengembangan pendidikan melalui <i>on the job training</i>.</li> </ul>
Bagaimana mengembangkan pendidikan dan kesehatan yang dapat terjangkau seluruh lapisan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan standar penyelenggaraan pendidikan.</li> <li>• Pengembangan Standar penyelenggaraan pelayanan kesehatan</li> <li>• Pengembangan alat ukur dan mekanisme pengawasan/ pengendalian penyelenggaraan pendidikan;</li> <li>• Pengembangan alat ukur dan mekanisme pengawasan/ pengendalian penyelenggaraan Kesehatan;</li> <li>• Pengembangan model Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota Bandung</li> </ul>
Bagaimana meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik dan tenaga kesehatan di Kota Bandung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kajian kebutuhan pegawai di Pemerintah Kota Bandung baik kualitas maupun kuantitas;</li> <li>• kajian kebutuhan kompetensi pegawai Pemerintah Kota Bandung;</li> <li>• Strategi pengembangan kompetensi SDM Aparatur dalam meningkatkan kinerja pemerintahan,</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan standar kompetensi jabatan struktural dan jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;</li> <li>• Identifikasi kebutuhan tenaga kesehatan di Kota Bandung</li> </ul>
Bagaimana meningkatkan sarana prasarana dan pembiayaan pendidikan dan kesehatan di Kota Bandung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifikasi besaran kebutuhan anggaran dalam penyelenggaraan pendidikan di Kota Bandung.</li> <li>• Identifikasi besaran kebutuhan biaya pendidikan yang harus disiapkan masyarakat kota Bandung</li> <li>• Pengembangan kesehatan dan pendidikan gratis mengetahui peluang dan kendala diterapkannya pendidikan dan kesehatan gratis.</li> <li>• Pengembangan Asuransi jaminan kesehatan seluruh masyarakat Kota Bandung</li> <li>• Pengembangan Strategi pencegahan komersialisasi Pendidikan dan kesehatan di Kota Bandung</li> </ul>
Bagaimana meningkatkan peran serta swasta dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan di Kota Bandung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengembangan kualitas penyelenggaraan pendidikan di Kota Bandung.</li> <li>• Pengembangan kapasitas LSM yang bertujuan mengembangkan/peduli Bidang pendidikan</li> </ul>
Bagaimana merubah pola hidup masyarakat tradisional yang kurang memperhatikan sektor pendidikan dan kesehatan;	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan lingkungan sehat di Kota Bandung</li> <li>• Internalisasi dan sosialisasi kesadaran akan pentingnya pendidikan dan kesehatan</li> <li>• Identifikasi kendala berubahnya pola pikir masyarakat terhadap kesadaran pentingnya kesehatan dan pendidikan</li> </ul>

## 2. Program Indikatif Bidang Perekonomian Kota dan Keuangan Daerah

### TERM I (PERIODE 2007-2008)

Isu Strategis	Program/Kegiatan/Tema Prioritas
Bagaimana mengurangi Tingkat pengangguran yang masih relatif tinggi, yang disebabkan oleh tidak seimbangnya antara jumlah usia kerja dengan jumlah kesempatan kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Litbang tentang sinkronisasi antara kesempatan kerja dengan kualifikasi tenaga kerja.</li> </ul>
Bagaimana meningkatkan Investasi di Kota Bandung yang tidak lepas dari situasi perekonomian secara nasional, mengingat posisi geografis Kota Bandung yang dekat dengan pusat kekuasaan baik Propinsi maupun Nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Litbang peningkatan Investasi prasarana Kota</li> <li>• Litbang tentang hubungan kewenangan antar tingkatan pemerintahan dalam upaya meningkatkan daya tarik investasi</li> <li>• Litbang profil investasi Kota Bandung.</li> <li>• Identifikasi potensi dan keunggulan investasi di Kota Bandung</li> </ul>
Bagaimana mengatasi keterbatasan anggaran Pemerintah Kota Bandung, sementara tuntutan masyarakat akan kualitas dan kuantitas layanan semakin meningkat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Litbang tentang Pengembangan Kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat</li> </ul>
Bagaimana mengoptimalkan Sektor unggulan yang dimiliki Kota Bandung yang meliputi antara lain: Sektor perdagangan, hotel dan restoran; Sektor industri pengolahan; Sektor jasa; dan Serta pengangkutan dan komunikasi. Selain memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PDRB, keempat sektor tersebut juga cukup besar dalam menyerap tenaga kerja.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Litbang Pengembangan produk Kepariwisata</li> <li>• Litbang pemasaran pariwisata</li> <li>• Litbang keterkaitan antar sektor dalam mengoptimalkan potensi dan keunggulan yang dimiliki Kota Bandung.</li> </ul>

### TERM II (PERIODE 2009-2013)

Isu Strategis	Program/Kegiatan/Tema Prioritas
Bagaimana mengurangi jumlah penduduk miskin yang ada di Indonesia yang hingga saat ini masih relatif tinggi	Litbang pengentasan kemiskinan
Bagaimana mengurangi Tingkat pengangguran yang masih relatif tinggi, yang disebabkan oleh tidak seimbangnya antara jumlah usia kerja dengan jumlah kesempatan kerja	Litbang kajian peningkatan kesempatan kerja melalui pemberdayaan UKM dan Koperasi
Bagaimana mengoptimalkan peran Sektor Informal yang selama ini sering dianggap sebagai	Litbang pembinaan dan pengembangan sektor informal

sektor yang merusak atau mengganggu kenyamanan kota. Padahal, sektor ini ternyata merupakan sektor yang menjadi katup pengaman perekonomian, terlebih lagi pasca krisis terjadi	
Bagaimana memelihara peran sektor tersier (jasa, perdagangan) dalam PDRB Kota Bandung, agar Kota Bandung benar-benar mampu menjadi Kota Jasa.	Program kajian peningkatan sinergitas antar sektor
Bagaimana meningkatkan investasi di Kota Bandung yang tidak lepas dari situasi perekonomian secara nasional, mengingat posisi geografis Kota Bandung yang dekat dengan pusat kekuasaan baik Propinsi maupun Nasional	Litbang peningkatan investasi dan peningkatan daya tarik investasi di Kota Bandung
Bagaimana mengatasi keterbatasan anggaran Pemerintah Kota Bandung, sementara tuntutan masyarakat akan kualitas dan kuantitas layanan semakin meningkat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program kajian peningkatan penerimaan daerah</li> <li>• Litbang hubungan kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.</li> </ul>
Bagaimana meningkatkan efisiensi pengeluaran pemerintah. Selain itu, struktur pengeluaran pemerintah ini pun belum menunjukkan struktur yang optimal. Semasa alokasi belanja dikategorikan ke dalam anggaran rutin dan pembangunan, anggaran rutin mendominasi belanja di Kota Bandung. Demikian juga saat ini, belanja aparatur masih jauh lebih tinggi dari pada belanja publik	Litbang efisiensi pengeluaran pemerintah
Kota Bandung juga memiliki keunggulan. Sektor unggulan kota Bandung meliputi: Sektor perdagangan, hotel dan restoran; Sektor industri pengolahan; Sektor jasa; dan Serta pengangkutan dan komunikasi. Selain memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PDRB, keempat sektor tersebut juga cukup besar dalam menyerap tenaga kerja.	Program kajian optimalisasi sektor unggulan

### 3. Program Indikatif Bidang Sosial Budaya

#### TERM I (2007-2008)

Isu Strategis	Program/Kegiatan/Tema Prioritas
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagaimana mengoperasionalkan partisipatif kemitraan yang dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan keluarga, ketetangan dan kelompok sosial kurang beruntung dalam memanfaatkan Bandung sebagai Kota Jasa Bermartabat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kajian partisipasi Kemitraan Ibu Rumah Tangga dalam menegakkan Peraturan Daerah mengenai K-3 dalam rangka mewujudkan Kota Bandung sebagai Kota Bermartabat.</li> <li>• Kajian partisipasi kemitraan pedagang kaki lima, pengemis, dan masyarakat kelas bawah dalam mendukung terwujudnya Kota Bandung yang bersih, taat, tertib dan bersahabat.</li> <li>• Kajian partisipasi kemitraan kelompok pengusaha untuk melakukan sosialisasi informasi tenaga kerja dan perlindungan tenaga kerja di dalam mendukung kehidupan masyarakat Kota Bandung yang sejahtera.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagaimana kontekstualisasi kearifan budaya lokal dapat diwujudkan dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Kota Bandung yang bermartabat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Studi kontekstual kearifan budaya lokal dalam mendorong program kepemudaan di Kota Bandung yang berciri kota jasa.</li> <li>• Studi kontekstual pengoperasian sistem kearifan budaya dalam perbedaan antarkelas sosial di wilayah perumahan yang dapat dijadikan model lingkungan masyarakat kota jasa yang bersahabat.</li> <li>• Studi penerapan dan pelembagaan transmisi nilai budaya lokal untuk menjadi landasan karakter generasi muda sebagai anggota masyarakat Kota Bandung yang Bermartabat.</li> </ul>

## TERM II (2009-2013)

Isu Strategis	Program/Kegiatan/Tema Prioritas
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagaimana mewujudkan kehidupan masyarakat Bandung sebagai kota jasa utama yang didasarkan atas azas <i>silih asah</i> dalam kehidupan antarkelompok masyarakat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kajian penanganan dan rehabilitasi berbagai penyakit sosial :ecara " cerdas" dalam perjudian, minuman keras, PSK, oleh masyarakat sehingga mewujudkan keseimbangan sosial dalam masyarakat Bandung yang berciri kota jasa pendidikan di Indonesia.</li> <li>• Kajian strategis mengenai perwujudan peberdayaan potensi gender dalam bidang jasa produktif yang mendukung Bandung sebagai Kota Jasa pendidikan utama di Indonesia.</li> <li>• Studi implementasi karakter budaya kreatif tinggi pada kelompok masyarakat kategori pemuda dalam Bandung sebagai kota jasa pendidikan utama di Indonesia.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagaimana mengkonkritkan kesetiakawanan sosial dalam kompleksitas kehidupan masyarakat Bandung dengan ladan nilai sosial budaya <i>silih asih</i> , sehingga mendukung terciptanya Kota Bandung sebagai kota jasa utama pariwisata di Indonesia.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kajian konteks penanganan masalah melemahnya sikap kesetiakawanan dengan melibatkan potensi budaya agamawan, kesenian dan olah ragawan dalam memperkuat Bandung sebagai Kota Jasa utama pariwisata di Indonesia.</li> <li>• Kajian implementatif pengembangan sikap toleransi yang strategis untuk memperkecil ketimpangan sosial ekonomi antarkelas untuk mewujudkan Bandung sebagai kota jasa utama pariwisata di Indonesia.</li> <li>• Studi pemantapan sistem ketahanan budaya lokal (kesenian) yang dapat memperkuat toleransi sosial dalam mencipta Bandung sebagai kota jasa utama pariwisata di Indonesia.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagaimana mengimplementasikan konsep <i>silih asuh</i> di bidang sosial ekonomi dalam menciptakan kehidupan Kota Bandung sebagai kota Jasa perdagangan di tingkat nasional.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Studi kompetensi pendampingan berkelanjutan pada kelompok relawan dalam memberdayakan kelompok sosial tidak beruntung (pemulung, pengemis, pengamen) di Kota Bandung yang mendukung tercapainya Bandung sebagai kota jasa perdagangan utama di Indonesia.</li> <li>• Studi pengembangan strategi partisipasi kelompok pengajian dan PKK dalam memelihara ketertiban sosial politik dalam mendukung Kota Bandung sebagai kota jasa perdagangan utama di Indonesia</li> <li>• Studi budaya partisipasi prima pada kelompok pengusaha dalam memantapkan tumbuhnya</li> </ul>



	ekonomi masyarakat bawah di Kota Bandung sebagai Kota jasa utama perdagangan di Indonesia.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagaimana mengkongkritkan Bandung sebagai kota yang terikat dengan <i>silih wangi</i> sehingga mampu menciptakan Kota Bandung sebagai kota jasa ternama di Indonesia.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Studi penanganan perilaku antimutualisma dalam kehidupan antar kelompok masyarakat</li> <li>• yang menghambat perwujudan Bandung sebagai kota jasa ternama di Indonesia.</li> <li>• Strategi pengembangan kolaborasi sosial budaya yang saling menguntungkan dalam mendukung Bandung sebagai kota jasa ternama di Indonesia.</li> <li>• Studi pemantapan tindakan kolaborasi dalam lingkungan masyarakat yang berdasarkan saling menguntungkan untuk menciptakan kota jasa ternama di Indonesia.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagaimana memanfaatkan sistem nilai positif, terbuka dan terkendali pada masyarakat Kota Bandung dalam menghadapi persaingan jasa utama di tingkat regional.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Studi perwujudan sikap terbuka dan terkendali dalam lingkungan masyarakat dalam menghadapi persaingan jasa utama di tingkat regional.</li> <li>• Studi pengembangan sikap terbuka dan terkendali pada masyarakat Bandung dalam menghadapi persaingan jasa utama di tingkat regional.</li> <li>• Studi pemantapan tindakan positif pada masyarakat Bandung dalam memperkuat persaingan jasa utama di tingkat regional.</li> </ul>

#### 4. Program Indikatif Bidang Penataan Kota

##### TERM I (2007-2008)

Isu Strategis	Program/Kegiatan/Tema Prioritas
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagaimana menyediakan prasarana dasar perkotaan yang memadai bagi seluruh masyarakat kota;</li> <li>• Bagaimana menyediakan prasarana ekonomi yang memadai untuk menarik investasi baru dan mendukung usaha yang ada, khususnya dalam pengembangan sistem transportasi;</li> <li>• Bagaimana mengarahkan pembangunan kota ke kawasan timur kota agar terwujud</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kajian ketersediaan prasarana dasar perkotaan di Kota Bandung</li> <li>• Kajian tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan prasarana dasar di Kota Bandung</li> <li>• Kajian identifikasi usaha pengembangan potensi ekonomi di Kota Bandung</li> <li>• Kajian identifikasi lokasi pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan Bandung Timur</li> <li>• Identifikasi strategi penanganan banjir di Kota Bandung</li> <li>• Identifikasi strategi pengelolaan kebersihan</li> </ul>

<p>pemerataan aktivitas kota;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagaimana mengatasi permasalahan banjir pada kawasan-kawasan tertentu;</li> <li>• Bagaimana menyempurnakan sistem pengelolaan kebersihan kota yang efektif dan efisien.</li> </ul>	<p>kota yang efektif dan efisien.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kajian model pengelolaan sampah di Kota Bandung</li> </ul>
---	---

### TERM I (2009-2013)

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih terpusatnya kegiatan perkotaan di satu pusat yaitu Wilayah Bandung Barat, serta terdapat beberapa sub pusat (pusat sekunder) Kota Bandung yang belum berfungsi secara optimal.</li> <li>• Kurang cepatnya antisipasi perkembangan terutama yang disebabkan oleh tekanan ekonomi sehingga muncul berbagai persoalan perubahan pemanfaatan lahan yang pada akhirnya menurunkan kualitas lingkungan terutama pada lingkungan perumahan.</li> <li>• Terdesaknya bangunan-bangunan dan kawasan yang memiliki nilai sejarah oleh bangunan baru yang lebih memiliki nilai ekonomis.</li> <li>• Berkaitan dengan penetapan fungsi Kota Bandung sebagai Kota Jasa, untuk mendukung terciptanya visi Kota Bandung, fungsi sebagai kota jasa ini perlu lebih diarahkan.</li> <li>• Penggunaan ruang publik yang tidak sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dengan terjadinya beberapa kasus seperti penggunaan lapangan tegalga, keberadaan sektor informal pada koridor-koridor jalan dan alih fungsi RTH.</li> <li>• Kualitas pelayanan publik yang belum optimal, meliputi kualitas pelayanan yang diberikan unit pelayanan satu atap, kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan masyarakat, kualitas kebersihan dan keindahan lingkungan kota dan masih</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kajian pengembangan pusat-pusat pertumbuhan sekunder di Kota Bandung</li> <li>• Kajian penataan dan pengembangan pusat pertumbuhan baru Gedebage dan sekitarnya.</li> <li>• Kajian strategi penataan pusat kota lama</li> <li>• Kajian alih fungsi lahan di Kota Bandung</li> <li>• Kajian penyebaran dan pendistribusian beberapa kegiatan di luar pusat Kota Bandung.</li> <li>• Kajian strategi pengembangan Kota Bandung sebagai Kota Jasa.</li> <li>• Kajian Identifikasi kelayakan ruang publik</li> <li>• Kajian model pengelolaan RTH di Kota Bandung</li> <li>• Kajian Penanganan kemacetan di beberapa ruas jalan seperti Ir. H. Juanda, RE Martadinata, Otto Iskandardinata</li> <li>• Kajian Identifikasi Tingkat Pelayanan (Level of service) jalan di Kota Bandung dan peningkatan fungsi jalan</li> <li>• Kajian penataan dan peningkatan kualitas lingkungan di beberapa kawasan kumuh di Kota Bandung</li> <li>• Kajian Identifikasi pengamanan dan pengendalian kawasan lindung di Kota Bandung</li> <li>• Kajian identifikasi upaya rehabilitasi dan konservasi kawasan lindung.</li> <li>• Kajian identifikasi strategi penataan transportasi Kota Bandung</li> <li>• Identifikasi upaya peningkatan kapasitas pelayanan sistem jaringan jalan di Kota Bandung</li> <li>• Identifikasi penetapan kawasan parkir pada ruas jalan dengan tingkat kemacetan tinggi</li> <li>• Studi kelayakan manajemen pengelolaan sampah terpadu Kota Bandung</li> </ul>
---	--

<p>terbatasnya kemampuan dalam menyediakan air bersih melalui PDAM.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingkat pelayanan (<i>level of service</i>) jalan yang rendah sehingga sering menimbulkan kemacetan, gangguan lalu lintas yang berasal dari kegiatan-kegiatan yang sering menggunakan badan jalan serta masalah yang berkaitan dengan sistem terminal dan penyediaan fasilitas jalan kaki.</li> <li>• Perlunya penanganan dan peningkatan kualitas lingkungan pada kawasan kumuh serta rendahnya kemampuan pemeliharaan dan pengendalian pemanfaatan ruang publik (taman, daerah milik jalan).</li> </ul>	
--	--

#### 5. Program Indikatif Bidang Pemerintahan Kota

##### TERM I (2007-2008)

Isu Strategis	Program/Kegiatan Indikatif
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Bagaimana meningkatkan profesionalisme Aparatur/SDM.</i> Sumber daya manusia merupakan sumber daya penggerak pembangunan di wilayah perkotaan. Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas SDM aparatur dan kualitas masyarakat, telah menjadi isu strategis yang harus ditangani dengan baik oleh pemerintah. Profesionalisme aparat pemerintahan kota juga menjadi faktor penentu bagi keberhasilan pembangunan kota. Oleh karena itu, diperlukan adanya model-model pengembangan SDM aparat yang relevan dan tepat bagi terciptanya pembangunan kota yang efektif dan efisien.</li> <li>• <i>Bagaimana kelembagaan Pemerintah Daerah, khususnya Kota Bandung dalam mengakomodasi aspirasi dari bawah dengan mempertimbangkan kebijakan-</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembinaan tertib hukum dan hak asasi manusia</li> <li>• Evaluasi terhadap produk-produk hukum agar sesuai dengan dinamika perkembangan kota</li> <li>• Sosialisasi dan pendekatan dialogis produk-produk hukum baik daerah maupun nasional kepada masyarakat</li> <li>• Pelayanan bantuan hukum dan pembinaan PPNS</li> <li>• Publikasi dan penataan jaringan dokumentasi</li> <li>• Penerbitan Naskah Akademik</li> <li>• Perumusan dan penerbitan produk hukum</li> <li>• Pelaksanaan sosialisasi tentang tugas, fungsi, dan wewenang partai politik</li> <li>• Penyelenggaraan Pemilu 2004</li> <li>• Pembinaan Organisasi Masyarakat dan Politik</li> <li>• Terasilitasinya sarana dan prasarana Parpol</li> <li>• Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur pemerintah</li> </ul>

<p>kebijakan dari atas. Isu lain yang tidak kalah pentingnya pada bidang pemerintahan ini adalah masalah kelembagaan pemerintahan kota. Masalah kelembagaan secara komprehensif akan menyangkut kepada berbagai aspek yang terkait dengan pengembangan sistem organisasi pemerintahan. Struktur kelembagaan, sistem dan tata laksana lembaga, serta mekanisme dan prosedur kerja lembaga sangat penting untuk dikaji secara optimal agar dapat diperoleh suatu informasi yang tepat dan akurat mengenai berbagai kebutuhan dan relevansi kelembagaan daerah dengan tuntutan kebutuhan yang sebenarnya. Terkait dengan masalah ini juga adalah mengenai mekanisme dan prosedur koordinasi yang efektif dalam pengelolaan pemerintahan daerah demi terlaksananya pembangunan kota secara optimal.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyusun Pola dasar pembangunan daerah</li> <li>• Menyusun program pembangunan daerah</li> <li>• Menyusun rencana Kerja Tahunan Daerah</li> <li>• Menyusun rencana-rencana detail teknis pembangunan fisik kota</li> <li>• Melakukan pendidikan dan pelatihan aparat pemerintah kota</li> <li>• Membuat sistem informasi kepegawaian kota</li> <li>• Melakukan analisis jabatan fungsional dan struktural</li> <li>• Penyusunan petunjuk operasional dan prosedur tetap pelayanan perijinan</li> <li>• Pembangunan sistem informasi penyelenggaraan pemerintahan yang mudah diakses oleh masyarakat</li> <li>• Koordinasi dengan Kabupaten dan Kota yang berhubungan dengan pengaluran arus masuk - keluar kendaraan</li> <li>• Penjajagan kerjasama dengan kota lain</li> <li>• Melakukan kerjasama dalam pengelolaan sampah dengan Kabupaten - Kota</li> <li>• Peningkatan kerjasama yang bersifat saling menguntungkan dengan Kabupaten - Kota</li> <li>• Kerjasama pembangunan prasarana kota di batas-batas wilayah kota/ kabupaten</li> </ul>
---	--

## TERM II (2009-2013)

Isu Strategis	Program/Kegiatan Indikator
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagaimana meningkatkan profesionalisme Aparatur/SDM. Sumber daya manusia merupakan sumber daya penggerak pembangunan di wilayah perkotaan. Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas SDM aparatur dan kualitas masyarakat, telah menjadi isu strategis yang harus ditangani dengan baik oleh pemerintah. Profesionalisme aparat pemerintahan kota juga menjadi faktor penentu bagi keberhasilan pembangunan kota. Oleh karena itu, diperlukan adanya model-model pengembangan SDM aparat yang relevan dan tepat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kajian dan evaluasi tentang produk-produk hukum daerah yang sesuai dengan nilai dan akar budaya masyarakat;</li> <li>• Evaluasi dan Analisis Kebijakan Daerah;</li> <li>• Kajian tentang Tingkat Kesadaran Hukum masyarakat dalam menunjang pembangunan daerah kota;</li> <li>• Evaluasi Implementasi Sistem Pelayanan Bantuan dan Pembinaan Hukum PPNS;</li> <li>• Kajian tentang tingkat partisipasi politik masyarakat di daerah kota Bandung</li> <li>• Kajian tentang model partisipasi politik masyarakat Kota Bandung</li> <li>• Kajian tentang pengembangan model sistem</li> </ul>

<p>bagi terciptanya pembangunan kota yang efektif dan efisien.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Isu tentang kelembagaan Pemerintahan.</i> Isu lain yang tidak kalah pentingnya pada bidang pemerintahan ini adalah masalah kelembagaan pemerintahan kota. Masalah kelembagaan secara komprehensif akan menyangkut kepada berbagai aspek yang terkait dengan pengembangan sistem organisasi pemerintahan. Struktur kelembagaan, sistem dan tata laksana lembaga, serta mekanisme dan prosedur kerja lembaga sangat penting untuk dikaji secara optimal agar dapat diperoleh suatu informasi yang tepat dan akurat mengenai berbagai kebutuhan dan relevansi kelembagaan daerah dengan tuntutan kebutuhan yang sebenarnya. Terkait dengan masalah ini juga adalah mengenai mekanisme dan prosedur koordinasi yang efektif dalam pengelolaan pemerintahan daerah demi terlaksananya pembangunan kota secara optimal.</li> </ul>	<p>pembinaan organisasi masyarakat dan politik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kajian tentang kualitas pendidikan dan komunikasi politik di Kota Bandung</li> <li>• Kajian tentang pengembangan model pendidikan dan komunikasi politik di Kota Bandung dalam upaya peningkatan kualitas partisipasi politik masyarakat</li> <li>• Kajian tentang fungsi dan peranan partai politik dalam pembangunan di daerah Kota Bandung</li> <li>• Kajian tentang sikap dan perilaku politik masyarakat di Kota Bandung</li> <li>• Kajian tentang implementasi sistem manajemen aset daerah</li> <li>• Kajian tentang sistem perencanaan dan pengadaan aset daerah</li> <li>• Kajian tentang sistem pelaporan aset daerah</li> <li>• Kajian tentang kualitas sarana dan prasarana kerja pelayanan daerah</li> <li>• Kajian tentang penataan standar sarana dan prasarana kerja yang efektif dan efisien</li> <li>• Kajian tentang Implementasi Sistem Publikasi Daerah yang efektif dan efisien;</li> <li>• Penataan Sistem Jaringan Dokumentasi Daerah</li> <li>• Kajian tentang implementasi pola dasar pembangunan di daerah Kota Bandung</li> <li>• Kajian tentang sistem pemantauan dan pengendalian perencanaan kota</li> <li>• Kajian tentang model pengendalian dan penyesuaian rencana detail teknis pembangunan fisik kota</li> <li>• Kajian tentang Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan aparat pemerintah kota</li> <li>• Analisis sistem informasi kepegawaian kota</li> <li>• Kajian tentang model Pengendalian dan pemantauan implementasi hasil analisis jabatan fungsional dan struktural</li> <li>• Kajian tentang model pengembangan dan penataan Sistem Karier (Pola Karier) Pegawai</li> <li>• Kajian tentang pengembangan model penilaian kinerja pegawai</li> <li>• Kajian tentang pengembangan model insentif kerja</li> </ul>
---	---

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kajian tentang Pengembangan model sistem pelayanan yang efektif, efisien, dan ekonomis</li> <li>• Kajian tentang Pengembangan sistem penyelenggaraan pemerintahan di Kota Bandung</li> <li>• Kajian tentang Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan</li> <li>• Kajian tentang standar pelayanan di Kota Bandung</li> <li>• Kajian tentang kualitas kinerja pelayanan di Kota Bandung</li> <li>• Kajian tentang Model Kerjasama pengembangan dan pembangunan daerah perbatasan</li> <li>• Kajian tentang Model Kerjasama pengendalian arus urban</li> <li>• Kajian tentang Pengembangan Model Kerjasama dalam pengelolaan limbah dan sampah di Kota Bandung</li> <li>• Kajian tentang Kerjasama dalam pengelolaan sistem transportasi lintas batas</li> <li>• Kajian tentang Kerjasama dalam penataan sistem pemanfaatan sumber daya alam</li> <li>• Kajian tentang model kemitraan di daerah</li> <li>• Kajian tentang hubungan Pusat dan Daerah dalam pelaksanaan Otonomi daerah di Kota Bandung</li> <li>• Analisis model hubungan Daerah Kota dengan Provinsi di Kota Bandung</li> </ul>
--	--

## BAB VI

### PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN MEKANISME KOORDINASI KELITBANGAN DI KOTA BANDUNG

Sekarang ini kondisi kelitbangan Kota Bandung memang sudah lebih baik daripada sebelumnya, namun mengingat semakin tingginya tuntutan pembangunan maka semestinyalah kapasitas Kelitbangan di Kota Bandung ditingkatkan. Berlatar belakang hal tersebut, selanjutnya dinilai perlu untuk melakukan upaya pengembangan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan baik dari aspek sarana prasarana maupun dari aspek kapasitas kelembagaannya. Hal ini juga perlu dikaitkan dengan upaya pengembangan kapasitas kelitbangan baik dari sisi Individu, Institusi maupun Sistem.

Sisi individu ditekankan pada upaya pengembangan sumber daya manusianya yaitu peningkatan kapasitas dan kompetensi dari para peneliti. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai diklat teknis fungsional, pendidikan formal dan lain-lain. Sementara sisi Institusi lebih ditekankan pada bagaimana membuat mekanisme dan prosedur yang jelas, sistematis dan praktis dalam pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan. Dan terakhir sisi sistem lebih ditekankan pada bagaimana mengembangkan kapasitas kelembagaan kelitbangan Kota Bandung yang memiliki posisi koordinatif dan mampu memberikan insentif kelitbangan di Kota Bandung.

#### A. PENGEMBANGAN KAPASITAS

Peran Kelitbangan di Kota Bandung pada masa 2007-20013 kecenderungan akan semakin meningkat, dimana setiap kebijakan yang dibuat Pemerintahan Kota Bandung perlu mendasarkan pada hasil kajian/litbang yang validitas dan reliabilitas dapat diandalkan. Kapasitas SDM Litbang Kota Bandung ditujukan untuk mampu mencari alternatif solusi sebagai bahan kebijakan untuk

memecahkan berbagai permasalahan pemerintahan yang terus mengalami perkembangan. Pengembangan Kapasitas SDM Litbang Kota Bandung meliputi beberapa aspek yaitu :

✓ 1. *Pengembangan kuantitas Peneliti*

Jumlah Peneliti dan Jumlah tenaga pendukung untuk melaksanakan penelitian di Kota Bandung dalam hal ini di Kantor Litbang Kota Bandung pada saat ini masih jauh dari kondisi memadai apalagi untuk menangani kelitbitangan di masa yang akan datang yang semakin kompleks dan dinamis, untuk itu penambahan jumlah peneliti mutlak dibutuhkan saat ini dan kedepan. Strategi pengembangan jumlah SDM Penelitian dilakukan dengan :

Pertama : Mengidentifikasi kebutuhan peneliti dapat dilakukan dengan melakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- a. Melakukan job analysis, untuk menghasilkan job description dan job spesifcation yang nantinya akan menjadi dasar bagi pengukuran beban kerja
- b. Melakukan Pengukuran Beban Kerja dan memperkirakan kebutuhan pegawai, untuk memperhitungkan beban kerja Kantor Litbang dan memperhitungan jumlah pegawai yang dibutuhkan.

Kedua : Pemenuhan Kebutuhan pegawai dengan melakukan upaya:

- a. Meningkatkan daya tarik untuk mau menjadi fungsional peneliti yaitu dengan memberikan insentif tertentu baik dalam hal kesejahteraan, pengumpulan angka kredit untuk mempercepat kenaikan jabatan fungsional, fasilitas kerja dan faktor-faktor yang lain yang dapat menggairahkan pegawai untuk menjadi peneliti.
- b. pengadaan pegawai untuk memenuhi kualifikasi tertentu yang dibutuhkan baik pegawai baru (CPNS) maupun pegawai dimutasikan ke Kantor Litbang Kota Bandung dari SKPD yang lain. Jumlah secara



kasar yang dibutuhkan Kantor Litbang Kota Bandung untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya minimal dibutuhkan peneliti sebanyak 12 orang peneliti. Idealnya kebutuhan peneliti di Litbang Kota Bandung sebanyak 5 orang untuk setiap bidang dengan asumsi Peneliti Utama, Peneliti Madya, Peneliti Muda dan Peneliti Pertama (2 orang). Kebutuhan peneliti secara rinci adalah sebagai berikut :

Tabel 6.1  
Kebutuhan Peneliti di Litbang Kota Bandung

No	Bidang Keahlian	Jumlah Minimal yang dibutuhkan	Jumlah Ideal yang dibutuhkan	Kualifikasi Pendidikan Minimal
1	SDM	2 orang	5 orang	S1 MSDM (Ekonomi dan Administrasi)
2	Perekonomian	2 orang	5 orang	S1 Ekonomi
3	Sosial Budaya	2 orang	5 orang	S1 Sosial
4	Penataan Kota	2 orang	5 orang	S1 Teknik
5	Pemerintahan	2 orang	5 orang	S1 Administrasi Negara, Ilmu Pemerintahan, Hukum
6	Keuangan Daerah	2 orang	5 orang	S1 Ekonomi, Akuntansi
	Total	12 orang	30 orang	

## 2. Pengembangan Kompetensi Peneliti

Kompetensi SDM peneliti dalam penyelenggara Litbang dapat dikelompokkan kedalam 3 aspek yaitu sesuai dengan konsep kompetensi yang meliputi pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*Skill*) serta sikap

(*Atitude*) yang dimiliki seorang peneliti. Dari ketiga aspek tersebut Kompetensi yang perlu dimiliki peneliti meliputi :

*Pertama*, seorang peneliti harus memiliki Pengetahuan, baik pengetahuan dasar-dasar metodologi penelitian, pengetahuan merencanakan kegiatan Litbang maupun pengetahuan substantif spesialisasi yaitu Bidang SDM, Perekonomian, Sosial Budaya, Penataan Kota, Pemerintahan dan Keuangan Daerah.

*Kedua*; seorang peneliti harus memiliki keterampilan-keterampilan dalam mengolah data, menuangkan idea dalam bentuk tulisan serta keterampilan dalam membina jejaring kerja (*networking*) dengan pihak-pihak yang berkepentingan.

*Ketiga* : Seorang peneliti harus memiliki sikap-sikap antara lain, Kritis, Kreatif, Inovatif dan selalu penasaran (*curiosity*) untuk mengetahui secara mendalam sesuatu hal.

✓ Apabila dijabarkan kompetensi yang perlu dimiliki seorang peneliti adalah sebagai berikut :

**Tabel 6.2**  
**Kompetensi yang dibutuhkan Peneliti**

Pengetahuan (Knowledge)	Keterampilan (Skill)	Sikap (Attitude)
Umum		
▪ Memahami perencanaan Litbang aparatur;	▪ Mampu merencanakan suatu penelitian	▪ Bersikap Netral dan Objektif
▪ Memahami Metodologi Penelitian	▪ Mampu membuat Proposal Penelitian;	▪ Dapat bekerja secara individual dan tim (kelompok)
▪ Memahami Metode Analisis Data;	▪ Mampu membuat Instrumen dan rancangan Penelitian;	▪ Bersikap Toleran terhadap perbedaan pendapat
▪ Memahami Instrumen Penelitian;	▪ Mampu melakukan studi kepustakaan dan studi lapangan	▪ Jujur

	(mengumpulkan data)	
▪ Memahami proses Penelitian	▪ Mampu berkomunikasi dan meyakinkan orang lain	▪ Kreatif dan Inovatif
	▪ Mampu melakukan pengolahan data;	▪ Kritis
	▪ Mampu mendeskripsikan dan menginterpretasikan hasil pengolahan data;	▪ Penasaran (curiosity)
Khusus		
Menguasai dan memahami substansi yang menjadi spesialisasinya	Mampu menganalisis fenomena-fenomena yang sesuai dengan substansi spesialisasinya	
Menguasai dan memahami metode analisis yang sesuai dengan substansi spesialisasinya	Mampu menerapkan teknik analisis yang sesuai dengan substansi spesialisasinya	

Dengan uraian kompetensi tersebut maka pengembangan kompetensi peneliti dapat diarahkan untuk memenuhi uraian tersebut. Untuk itu pengembangan kompetensi pegawai dapat dilakukan dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Analisis Kebutuhan Pengembangan yaitu dapat memetakan kondisi empirik yang ada saat ini sejauhmana kesesuaian antara kompetensi yang dibutuhkan dengan kompetensi yang dimiliki. Gambaran ini menjadi anjakan awal untuk pengembangan kompetensi peneliti di Litbang Kota Bandung.
- b. program pengembangan kompetensi peneliti dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
  - 1) Pengiriman pegawai untuk mengikuti diklat/seminar/ lokakarya dan atau pertemuan ilmiah lainnya tentang kelitbangan baik diklat/seminar/lokakarya/ pertemuan ilmiah metodologi

penelitian maupun diklat/seminar/ lokakarya/pertemuan ilmiah yang terkait dengan substantif.

- 2) Penyelenggaraan program pemagangan dengan mengirimkan pegawai ke lembaga-lembaga Litbang profesional baik yang dimiliki oleh instansi pemerintah maupun swasta
- 3) Penyelenggaraan program in-house training bagi para pegawai yang diselenggarakan sendiri oleh unit Litbang dengan memanfaatkan para pegawai yang sudah memiliki pengalaman di bidang kelitbangan.

## B. MEKANISME KOORDINASI

Dari perspektif fungsi manajemen terdapat 3 (tiga) jenis koordinasi, yakni koordinasi perencanaan, koordinasi pelaksanaan serta koordinasi evaluasi. Masing-masing jenis koordinasi ini dapat dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:

### 1. Koordinasi Perencanaan

- a Kegiatan utama yang harus dikoordinasikan pada tahap perencanaan ini meliputi proses pemrograman, perumusan dan penetapan Rencana Kegiatan (RK). Unit-unit kerja teknis bertanggungjawab untuk melakukan pembahasan dan revisi RK, serta menyampaikan kepada pimpinan atau atasan langsungnya, yang selanjutnya dibahas di Kantor LITBANG.
- b Setelah RK disetujui dan/atau ditetapkan oleh Kepala SKPD dan pimpinan SKPD melakukan koordinasi administratif dengan lembaga terkait (dalam hal ini Bappeda dan Kantor Kas Daerah) guna membahas aspek pembiayaan/ penganggaran .
- c Hasil pembahasan akhir baik substantif maupun administratif, untuk selanjutnya disampaikan kembali kepada unit-unit kerja teknis untuk

ditindaklanjuti dengan penyusunan ROK (Rencana Operasional Kegiatan).

- d. Dalam hal kegiatan kajian merupakan hasil kerjasama dengan bidang yang berbeda, maka unit yang bersangkutan harus melakukan koordinasi secara vertikal dengan atasannya, serta secara horizontal dengan pejabat pada level yang sama di unit kajian.
- e. Dalam hal kegiatan kemitraan, pembahasan aspek substansi maupun administrasi tidak perlu melibatkan lembaga Bappeda maupun Kepala SKPD.

## 2. Koordinasi Pelaksanaan

- a. Pada tahap pelaksanaan, koordinasi dimulai sejak tahap pembuatan desain dan instrumen penelitian, termasuk penentuan lokasi penelitian, penetapan jadwal penelitian lapangan, dan kegiatan lainnya.
- b. Selanjutnya, dengan dukungan administratif dari unit *auxiliary* (Sekretariat atau Bagian Tata Usaha), unit-unit substantif menyelenggarakan penelitian lapangan yang dilanjutkan dengan pengolahan data, analisis data, dan penyusunan draft laporan penelitian akhir.
- c. Tahap berikutnya adalah diseminasi atau ekspose hasil penelitian dan publikasi serta pembuatan dan penyampaian laporan berkala dan/ atau laporan akhir. Pada tahap inipun, rangkaian kegiatan perlu dikoordinasikan dengan unit *auxiliary*.
- d. Untuk kegiatan non penelitian, tahapan koordinasi lebih sederhana, cukup didahului oleh penyusunan rencana kegiatan kemudian dilanjutkan dengan operasionalisasinya.
- e. Tahapan koordinasi pada tahap pelaksanaan ini pada dasarnya berlaku juga untuk kegiatan kemitraan.

### 3. Koordinasi Evaluasi

- a. Koordinasi pada tahap evaluasi dilakukan dengan kegiatan berupa penyerahan laporan hasil penelitian kepada Walikota melalui Kantor Litbang.
- b. Selanjutnya, unit kerja substantif perlu melakukan tindak lanjut berdasarkan rekomendasi Walikota demi penyempurnaan kegiatan di masa-masa berikutnya.
- c. Evaluasi ini akan memuat Evaluasi Hasil Kajian dan Tindak Lanjut Kajian yang akan melibatkan BAPPEDA, BAGIAN PEMBANGUNAN dan BAWASDA.

# MEKANISME KOORDINASI KEGIATAN PENELITIAN DI KOTA BANDUNG

KEGIATAN	PELAKSANA						
	WALIKOTA	BAPPEDA	KANTOR LITBANG	INS. TEKNIK	BAGIAN KEUANGAN	BAGIAN PEMBANGUNAN	PANGGAR LEGISLATIF
<b>PERENCANAAN:</b>							
1. Perumusan dan pengajuan kegiatan				○			
2. Pembahasan kegiatan tahap I (Dilihat dari Aspek Substantif)			○				
3. Penetapan Rencana Kegiatan (RK) Penelitian			○				
4. Pembahasan Rencana Kegiatan (RK) Tahap II (Aspek Sinergitas dengan Kegiatan Non Penelitian dan Aspek Anggaran)			○	○	○	○	○
5. Penetapan RK hasil pembahasan terakhir		○					
6. Persetujuan/Penetapan RK oleh Walikota	○						
7. Pembahasan antara Panggar Eksekutif dengan Panggar Legislatif		○	○	○	○	○	○
8. Dikembalikan kepada Eksekutif (Walikota)	○						
9. Diterbitkan kepada Kantor Litbang Melalui BAPPEDA, selanjutnya diserahkan kepada instansi Teknis			○	○			
10. Penyusunan Rencana Operasional Kegiatan (ROK)							

KEGIATAN	PELAKSANA					
	WALIKOTA	BAPPEDA	KANTOR LITBANG	INS. TEKNIK	BAGIAN KEUANGAN	BAGIAN PEMBANGUNAN
PELAKSANAAN:						
11. Pembuatan Desain dan instrumen penelitian <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penentuan lokasi penelitian</li> <li>• Penetapan jadwal penelitian lapangan</li> <li>• Kegiatan lainnya</li> </ul>						
12. Penelitian lapangan						
13. Pengolahan data, analisis data, dan penyusunan draft laporan penelitian akhir						
14. Penyusunan dan pencetakan laporan akhir (final report)						
15. Diseminasi hasil penelitian (Expose hasil penelitian)						
16. Publikasi hasil penelitian (penyebaran buku hasil penelitian)						
TINDAK LANJUT HASIL PENELITIAN						
17. Penyerahan laporan hasil penelitian kepada Walikota untuk Bahan Rekomendasi Kebijakan						
18. Penyusunan Draft Kebijakan Berdasarkan Rekomendasi Penelitian (Untuk substansi tertentu sebagai bahan RAPERDA)						
19. Tindak lanjut kebijakan						
EVALUASI						
20. Evaluasi Hasil Kajian & Tindak Lanjut Hasil Kajian						

Keterangan: Garis putus = Tahapan; Garis putus-putus = Koordinasi



## DAFTAR PUSTAKA

- Bandung Dalam Angka Tahun 2001-2005
- Database Kegiatan Penelitian/Kajian/Studi Pemerintah Kabupaten Bandung tahun 2001-2005
- Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Bandung tahun 2004
- Laporan Pertanggungjawaban Walikota Bandung Akhir Masa Jabatan (2003)
- Nota Keuangan perihal Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung pada tahun 2002-2005
- Peraturan Daerah Kota Bandung No. 03 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung
- Rencana Kerja (Renja) Kantor Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung tahun 2006.
- Rencana Strategis (Renstra) 2004-2008 SKPD se Kota Bandung
- Rencana Strategis Kota Bandung tahun 2004-2008
- Ringkasan Eksekutif Efektivitas Bantuan Dana Bergulir kepada Masyarakat di Kota Bandung (Kantor Litbang dan LPM-UPI) tahun 2003
- Ringkasan Eksekutif Identifikasi Peluang Kota Bandung sebagai Kota Jasa (Kantor Litbang dan LPM UNPAR) tahun 2001
- Ringkasan Eksekutif Kajian Efektifitas Perencanaan Pembangunan Melalui Musbang dan UDKP (Kerjasama Kantor Litbang dengan Pusat Kajian STPDN 2002).
- Ringkasan Eksekutif Kajian Pemberdayaan Puskesmas dalam Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat (Kantor Litbang dan PT Dua Ribu Satu Pangriptaloka) tahun 2004
- Ringkasan Eksekutif Kajian Penanganan dan Penataan Reklame di Kota Bandung (Kantor Litbang dan PT. Massuka Pratama) tahun 2004
- Ringkasan Eksekutif Kajian Penataan Rumah Kumuh di Kota Bandung
- Ringkasan Eksekutif Kajian Pengembangan Wilayah Gede Bage menjadi Pusat Sekunder (Kerjasama Kantor Litbang dan LPM UNPAR tahun 2003)

Ringkasan Eksekutif Kajian Sosial Pengembangan Wilayah Gedebage (Kantor Litbang bekerjasama dengan LPM UNPAD) tahun 2002

Ringkasan Eksekutif Kajian Strategi Implementasi Tahapan Pengembangan Jaringan Jalan Tol Dalam Kota Bandung (Kerjasama Kantor Litbang dengan LPPM-ITB tahun 2003

Ringkasan Eksekutif Model Pengembangan Seni dan Budaya Kota Bandung

Ringkasan eksekutif Pengkajian Pola Penghijauan di Kota Bandung (Kerjasama Kantor Litbang dan PPSDAL-UNPAD) tahun 2003

Ringkasan Eksekutif Studi Strategi Pengembangan Kota Bandung sebagai Kota Jasa (Kantor Litbang bekerjasama dengan LPM UNPAR) tahun 2002

